



KADIN INDONESIA SAMBUT AGENDA BESAR PRESIDEN, MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI 6% TAHUN 2027

Di Hadapan Presiden Prabowo,
Anindya Bakrie Paparkan Kontribusi
Kadin Dukung Target Pertumbuhan
Ekonomi 8 Persen

Dunia Usaha Siap Bergotong Royong
Mendorong Indonesia Incorporated

Kadin Dorong Penguatan Ekonomi
Indonesia sebagai Makna
Kemerdekaan Generasi Saat Ini

Indonesia-Thailand Business Forum:
Kadin Optimistis Nilai Perdagangan
Tembus 30 Miliar Dolar AS pada 2030

INDONESIA DALAM RANTAI PASOK DUNIA

Anindya Novyan Bakrie



JAKARTA— Pada Jumat, 31 Juli 2026, saya bersama sekitar 150 pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dari pusat dan daerah serta pimpinan asosiasi dan himpunan dunia usaha mendapat kehormatan diterima Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta. Pertemuan tersebut mempunyai arti penting bagi kami karena menjadi ruang dialog langsung antara pemerintah dan dunia usaha mengenai kondisi perekonomian nasional, pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah, serta langkah-langkah yang perlu kita kerjakan bersama untuk membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Kadin Indonesia hadir dalam pertemuan itu membawa semangat kolaborasi. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987,

Kadin merupakan mitra pemerintah dalam membangun perekonomian nasional. Bagi kami, kemitraan tersebut bukan sekadar kedudukan formal. Kemitraan harus diwujudkan dalam kerja nyata yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kekuatan dunia usaha, dari perusahaan besar hingga UMKM, dari pusat hingga seluruh daerah di Indonesia.

Kita memahami bahwa sebagian sangat besar aktivitas ekonomi Indonesia digerakkan oleh konsumsi masyarakat, investasi swasta, dan ekspor. Karena itu, dunia usaha mempunyai tanggung jawab besar untuk ikut menjaga sekaligus memperkuat ketiga mesin pertumbuhan tersebut. Pemerintah mempunyai berbagai program pembangunan dan instrumen kebijakan, sementara dunia usaha memiliki modal, teknologi, jaringan, kapasitas produksi, kewirausahaan, serta akses ke pasar domestik maupun internasional. Apabila seluruh kekuatan tersebut dapat disinergikan, saya meyakini Indonesia mempunyai kemampuan untuk tumbuh jauh lebih tinggi.

Indonesia selama sekitar dua dekade telah menunjukkan ketahanan ekonomi dengan pertumbuhan yang relatif konsisten di kisaran 5 persen. Ini merupakan modal yang sangat berharga. Namun, kita tidak boleh berhenti di sana. Untuk keluar dari middle income trap, menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, meningkatkan produktivitas, dan membawa kesejahteraan kepada lebih banyak masyarakat, Indonesia membutuhkan lompatan pertumbuhan.

Karena itulah Kadin mendukung visi Presiden Prabowo untuk membawa pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen. Target tersebut memang tidak ringan, tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Kuncinya adalah kerja bersama: memperbesar investasi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, meningkatkan produktivitas, memperluas pasar ekspor, memperkuat sumber daya manusia, serta menempatkan semakin banyak perusahaan Indonesia dalam rantai pasok dunia.

Salah satu pesan yang saya sampaikan di hadapan Bapak Presiden pada 31 Juli 2026 adalah bahwa sesungguhnya Indonesia sudah jauh lebih terintegrasi ke dalam global supply chain daripada yang selama ini banyak dibayangkan. Indonesia kerap dipersepsikan dunia semata-mata sebagai negara pengekspor sumber daya alam dan komoditas. Batu bara, minyak kelapa sawit, mineral, dan berbagai komoditas lainnya memang tetap mempunyai arti penting bagi perekonomian kita. Namun, di balik itu terdapat kekuatan lain yang terus berkembang: produk manufaktur, komponen industri, furnitur, tekstil dan alas kaki, produk pertahanan, barang konsumsi, serta berbagai produk UMKM Indonesia telah menjadi bagian dari mata rantai produksi dan perdagangan dunia.

Produk yang dibuat oleh tenaga kerja dan perusahaan Indonesia hari ini dapat ditemukan dalam jaringan produksi berbagai perusahaan internasional. Ada produk dan komponen Indonesia yang terhubung dengan rantai pasok perusahaan global seperti Tesla, Airbus, KIA, IKEA, Uniqlo, dan berbagai perusahaan kelas dunia lainnya. Produk PT Pindad, sepatu yang diproduksi untuk merek internasional seperti On, furnitur, komponen kendaraan, serta beragam barang konsumsi dan produk UMKM memperlihatkan bahwa kemampuan industri Indonesia sesungguhnya sangat luas. Ini merupakan kekuatan yang harus kita sadari dan kemudian kita perbesar.

Data yang kami petakan memberikan gambaran menarik. Dari nilai ekspor Indonesia sekitar 300 miliar dolar AS per tahun, sekitar 60 miliar dolar AS berasal dari tiga kelompok besar, yakni batu bara, stainless steel, dan kelapa sawit. Artinya, sekitar 240 miliar dolar AS lainnya berasal dari spektrum produk dan komoditas yang jauh lebih luas. Di sanalah terdapat ribuan perusahaan, produk, komponen, dan mata rantai industri Indonesia yang sesungguhnya telah terhubung dengan ekonomi dunia.

Persoalannya, kekuatan tersebut selama ini belum terpetakan dan dikomunikasikan secara optimal. Atas dasar pemikiran itulah Kadin Indonesia menggagas We Buy From Indonesia. Inisiatif ini bukan sekadar buku atau katalog yang menampilkan barang buatan Indonesia. We Buy From Indonesia kami bangun sebagai platform teknologi dan perdagangan untuk memetakan hubungan antara produk Indonesia, produsennya, eksportir, pembeli internasional, hingga mata rantai industri global tempat produk tersebut digunakan.

Melalui pendekatan berbasis data, kita ingin mengetahui secara lebih presisi: siapa membeli apa dari Indonesia, perusahaan Indonesia mana yang telah menjadi pemasok, industri global mana yang menggunakan produk Indonesia, dan di bagian mana peluang ekspor kita masih dapat diperbesar.

Dengan pemetaan tersebut, strategi ekspor Indonesia dapat bergerak dari pendekatan yang bersifat umum menuju pendekatan yang semakin terarah. Jika suatu perusahaan global sudah membeli produk dari Indonesia, tugas berikutnya adalah bagaimana meningkatkan nilai pembeliannya. Jika sebuah perusahaan Indonesia sudah mampu masuk ke satu mata rantai produksi internasional, tugas kita adalah meningkatkan kapasitas dan kualitasnya agar dapat memasok lebih banyak perusahaan dan lebih banyak negara.

Pada saat yang sama, kita harus membantu lebih banyak perusahaan Indonesia—terutama UMKM dan perusahaan di daerah—agar mampu memenuhi standar untuk memasuki rantai pasok global. Karena itulah We Buy From Indonesia kami persiapkan dalam Bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Kami bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, untuk memperkuat akurasi data dan menjadikan informasi tersebut bukan hanya alat promosi, tetapi juga salah satu referensi dalam pengembangan ekspor nasional.

Kadin juga terus memperkuat diplomasi ekonomi melalui Kadin Global Engagement Office (GEO). Kami ingin memastikan berbagai kerja keras pemerintah dalam membuka akses pasar melalui Free Trade Agreement (FTA), Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), serta berbagai kesepakatan perdagangan dan investasi internasional benar-benar dapat diterjemahkan menjadi transaksi, investasi, ekspor, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

Diplomasi ekonomi pada akhirnya harus menghasilkan manfaat yang nyata. Perjanjian perdagangan bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah semakin banyak produk Indonesia yang dibeli dunia, semakin banyak investasi berkualitas masuk ke Indonesia, semakin banyak perusahaan nasional naik kelas, dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta bagi masyarakat.

Semangat kolaborasi yang sama kami terapkan dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, Kadin telah menjalankan sejumlah program quick wins, antara lain mendukung Makan Bergizi Gratis melalui MBG Gotong Royong, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, peningkatan kualitas dan kompetensi pekerja migran Indonesia, serta renovasi rumah tidak layak huni untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah.

Semua itu merupakan bagian dari keyakinan kami bahwa dunia usaha tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan. Dunia usaha harus ikut bekerja.

Pertemuan di Istana Negara pada 31 Juli 2026 juga memperlihatkan sesuatu yang sangat penting: membangun ekonomi Indonesia membutuhkan kekompakan. Pemerintah, dunia usaha, pekerja, akademisi, masyarakat, serta pemerintah daerah harus bergerak menuju tujuan yang sama. Indonesia terlalu besar untuk dibangun oleh satu pihak saja.

Kadin mempunyai jaringan di 38 provinsi serta asosiasi dan himpunan dunia usaha dari berbagai sektor. Jaringan ini harus menjadi kekuatan ekonomi yang menghubungkan kebijakan nasional dengan potensi daerah. Sebab, pertumbuhan 8 persen tidak mungkin hanya berasal dari Jakarta atau kota-kota besar. Pertumbuhan harus lahir dari investasi dan aktivitas ekonomi di seluruh Indonesia.

Saya percaya bahwa Indonesia mempunyai semua modal yang diperlukan untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia: jumlah penduduk yang besar, pasar domestik yang kuat, sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, kelas menengah yang berkembang, tenaga kerja yang besar, serta basis industri yang semakin matang.

Tantangan kita sekarang adalah mengubah seluruh potensi tersebut menjadi produktivitas dan nilai tambah. Kita tidak cukup hanya menjual apa yang terdapat di dalam bumi Indonesia. Kita harus semakin mampu mengolahnya. Kita tidak cukup hanya menjadi pasar bagi produk dunia. Kita harus menjadi produsen. Kita tidak cukup hanya mengundang investasi. Kita harus memastikan investasi tersebut memperkuat industri nasional, meningkatkan kemampuan teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan membawa perusahaan Indonesia masuk semakin dalam ke rantai pasok dunia.

Di sinilah makna penting We Buy From Indonesia. Nama tersebut membawa sebuah pesan sederhana tetapi kuat: belilah dari Indonesia.

Namun, di balik pesan sederhana itu terdapat sebuah cita-cita yang jauh lebih besar. Kita ingin dunia melihat Indonesia bukan hanya sebagai sumber komoditas, tetapi sebagai negara industri; bukan hanya sebagai pasar dengan lebih dari 280 juta penduduk, tetapi sebagai basis produksi; bukan hanya sebagai tempat menjual barang, tetapi sebagai tempat perusahaan-perusahaan dunia mendapatkan produk, komponen, inovasi, dan mitra usaha yang berkualitas.

Produk Indonesia sebenarnya sudah berada di banyak bagian dunia. Komponen kita telah masuk ke industri global. Produk manufaktur kita telah digunakan oleh merek-merek internasional. Tenaga kerja Indonesia telah membuktikan kemampuannya menghasilkan barang dengan standar dunia.

Sekarang tugas kita adalah memperbesar skalanya. Dari satu pemasok menjadi seratus pemasok. Dari satu produk menjadi ribuan produk. Dari satu pasar menjadi puluhan pasar. Dari perusahaan besar menuju UMKM dan pengusaha daerah. Dari sekadar bagian kecil rantai pasok menuju posisi yang semakin strategis dalam jaringan produksi dunia.

Apabila pemerintah dan dunia usaha dapat terus berjalan bersama, saya percaya target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat kita capai. Lebih penting lagi, pertumbuhan tersebut dapat diterjemahkan menjadi investasi, industrialisasi, ekspor, kesempatan berusaha, dan jutaan lapangan kerja baru.

Inilah semangat yang kami bawa ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto pada 31 Juli 2026. Dan inilah semangat yang ingin kami teruskan melalui We Buy From Indonesia: menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan sekadar memiliki potensi.

Indonesia sudah memproduksi untuk dunia. Kini saatnya dunia membeli lebih banyak dari Indonesia.

DAFTAR ISI

Di Hadapan Presiden Prabowo, Anindya Bakrie Paparkan Kontribusi Kadin Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen	9
Kadin Indonesia Sambut Agenda Besar Presiden, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 6% Tahun 2027	13
Dunia Usaha Siap Bergotong Royong Mendorong Indonesia Incorporate	18
Indonesia-Thailand Business Forum: Kadin Optimistis Nilai Perdagangan Tembus 30 Miliar Dolar AS pada 2030	24
Kadin Dorong Penguatan Ekonomi Indonesia sebagai Makna Kemerdekaan Generasi Saat Ini	28
Hashim: Tailan Mitra Strategis Hadapi Ketidakpastian Dunia	30
Anindya Bakrie: Indonesia dan Tailan Harus Jadi Pemimpin Pangan dan Ekonomi Masa Depan	32
Ketum Kadin Temui Seskab, Bahas Pengembangan Industri Listrik hingga Perkenalkan Buku "We Buy From Indonesia"	36
Buku "We Buy From Indonesia" Tampilkan Rantai Pasok Global Berbasis Produk RI	37
ICEF-IPFE 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Pengadaan Modern yang Pertemukan Pelaku Usaha dengan 15 Ribu Buyer Pemerintah	39
Kadin Tegaskan Komitmen Menjadi Jembatan Pemerintah dan Dunia Usaha Hadapi Ketidakpastian Global	42
<i>Rumuskan Kurikulum Berbasis Industri, Kadin Jatim dan Swisscontact Siapkan Fasilitator Job and Occupational Analysis</i>	45
Anindya Bakrie Ungkap Investasi Sektor Kesehatan Berpotensi Ciptakan Efek Berganda bagi Ekonomi Nasional	47

DAFTAR ISI

Kadin Dukung KUNCI BERSAMA, Anindya Bakrie Dorong Aglomerasi Jadi Motor Pertumbuhan Kawasan	48
Ketum Kadin Sambut Investasi Rp5,2 Triliun LiuGong di Karawang, Indonesia Disiapkan Jadi Export Hub Alat Berat	50
<i>Survei Kadin Business Pulse: Sentimen Dunia Usaha Melemah pada Kuartal II 2026, Rupiah dan Kebijakan Fiskal Jadi Sorotan</i>	52
Kadin Indonesia dan Kemenperin Dorong Implementasi P2KDBK untuk Perkuat Keselamatan dan Keberlanjutan Industri	55
Kadin dan Kementerian PPPA RI Bersinergi Kembangkan Care Economy dan Daycare di Dunia Usaha	57
Kadin Serukan Stop Kriminalisasi Perempuan Pengusaha, Dorong Implementasi Hukum Berperspektif Gender	59
Kadin Indonesia Dorong Penguatan Ekonomi Umat sebagai Pilar Daya Saing Bangsa di Kancah Global Pada KUII VIII 2026	61
Surplus Perdagangan Indonesia-Tiongkok Tembus 5,8 Miliar Dolar AS, Kadin Dorong Kolaborasi Green Energy dan Teknologi Masa Depan	63
Kadin Dorong Kerja Sama Indonesia-Swis, Fokus Trading Academy hingga Investasi Logistik	66
Anindya Bakrie Terima Audiensi Dubes Sri Lanka, Sepakat Perkuat Hubungan Dagang, Investasi dan Business Council	68
Indonesia dan Davao Perkuat Kemitraan Agribisnis Melalui Networking Meeting dan Penandatanganan MoU B2B Bidang Pertanian	70
Kadin Indonesia dan Hubei Business Council Tiongkok, Jajaki Kerja Sama Strategis di Bidang Pertanian	72

DAFTAR ISI

Kadin Indonesia Perkuat Ekspor UMKM dan Produk Pertanian ke Jepang melalui Kolaborasi Strategis

74

Titi Khoiriah Ungkap Peran Penting Pengusaha Perempuan jadi Penggerak Transformasi dan Ketahanan Ekonomi

75

Anindya Bakrie Ajak Investor Global Lirik Maluku Utara, Kadin Siap Dorong Investasi Lebih Inklusif

77

Anindya Bakrie Lantik Pengurus Kadin Kalteng 2026-2031, Dorong Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Nasional

79

Kadin Kalsel Tekankan Kepatuhan Korporasi Lewat Sistem Administrasi Badan Hukum

81

Festival Fulan Fehan IV Perkuat Pariwisata Belu, Kadin NTT Dorong Masuk Kalender Wisata Dunia

82

Kadin Jatim Gelar Sarasehan Nasional: Kupas Aturan Kemasan Polos dan Pelarangan Bahan Tambahan yang Menekan Sektor Strategis Tembakau

83

Tekan Inflasi Jangka Panjang, Kadin Aceh Minta Fondasi Ekonomi Daerah Diperkuat

85

Kadin Manggarai Timur Salurkan 107 Paket Sembako untuk Korban Gempa di Kisol

86

Kadin NTT Gerak Cepat Salurkan Bantuan ke 7 Wilayah Terdampak Gempa Flores

87

Kadin Kabupaten Sikka dan PSMTI Salurkan Bantuan untuk Keluarga Korban Gempa Flores NTT

89

Di Hadapan Presiden Prabowo, Anindya Bakrie Paparkan Kontribusi Kadin Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen



Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dalam agenda bertajuk “Pertemuan Presiden Republik Indonesia dengan Pengusaha Kadin Pusat dan Daerah Seluruh Indonesia” yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (31/07/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie bersama jajaran pengurus Kadin Indonesia dan para Ketua Umum Kadin Provinsi menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda bertajuk “Pertemuan Presiden Republik Indonesia dengan Pengusaha Kadin Pusat dan Daerah Seluruh Indonesia” yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (31/07/2026).

Dalam arahannya, Presiden menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pengusaha dari berbagai daerah di Indonesia. Kepala Negara menilai pertemuan dengan Kadin penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam pembangunan nasional.

“Saya juga ingin ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara di sini. Waktu saya dilaporkan bahwa Kadin ingin datang, saya bilang ini sangat penting, dan saya prioritaskan untuk menerima saudara-saudara,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa pembangunan bangsa bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, seluruh kekuatan bangsa harus dapat dihimpun dan dipersatukan agar setiap sumber daya yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan rakyat.

“Bahwa pembangunan suatu bangsa adalah pembangunan lintas sektor. Karena itu, nation building memerlukan kekuatan, kekuatan dari bangsa itu untuk bisa dikerahkan, untuk bisa dipersatukan, sehingga bangsa itu dapat memanfaatkan semua sumber daya yang ada di bangsa itu,” ungkap Presiden.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie melaporkan berbagai inisiatif strategis yang telah dijalankan Kadin untuk mendukung program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), peningkatan kualitas dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI), hingga renovasi rumah tidak layak huni (RTLH). Anin juga menegaskan komitmen dunia usaha untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8 persen.

Di hadapan Presiden Prabowo, Anin sapaan akrabnya mengatakan Kadin sejak awal memilih untuk tetap optimistis menghadapi dinamika ekonomi global dengan menghadirkan solusi bagi dunia usaha.

“Karena ke mana pun kami pergi, setiap negara juga menghadapi tantangan yang sama. Bahkan Indonesia dalam keadaan yang lebih baik dilihat dari sisi pertumbuhannya selama 20 tahun 5 persen, inflasi yang juga under control,” kata Anin.

Menurut Anin, kondisi perekonomian global saat ini telah menjadi the new normal yang harus dihadapi melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

"Kami izin, Pak Presiden, banyak keliling juga ke daerah untuk melihat kerja sama antara pemerintah daerah dan juga Kadin. Karena kami lihat korelasinya sangat positif," ujarnya.

Anin menuturkan, hasil kunjungannya ke berbagai daerah menunjukkan bahwa sinergi yang erat antara pemerintah daerah dan Kadin mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Ketika kami datang misalnya ke Maluku Utara atau ke Kaltara (Kalimantan Utara), Kalteng (Kalimantan Tengah), NTB, ketika kerja samanya sangat erat, bermitra strategis, pertumbuhannya juga sangat kuat. Dan yang menarik, pertumbuhannya itu tidak hanya datang dari APBN dan APBD, tapi dari kreativitas mereka semua," kata Anin.

Dalam kesempatan itu, Anin juga melaporkan perkembangan empat program quick win Kadin yang diluncurkan sejak awal 2025 sebagai bentuk dukungan nyata terhadap agenda pembangunan pemerintah dan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Program pertama adalah Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Gotong Royong. Hingga saat ini, Kadin telah berkontribusi melalui 866 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk 128 SPPG yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Dan ini kami fokuskan karena kami mengetahui bahwa berdasarkan riset UNICEF, setiap 1 dolar juga menghasilkan 3 sampai 15 dolar AS multiplier effect," kata Anin.

Program kedua adalah Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Untuk mendukung program tersebut, Kadin meluncurkan white paper bertajuk Health is the New Wealth yang mengulas besarnya potensi ekonomi sektor kesehatan.

"Di sini kami ketahui bahwa health itu adalah Rp670 triliun dan ini setiap Rp1 yang dikeluarkan bisa menghasilkan Rp2 sampai Rp3," ujar Anin.

Selain itu, Kadin juga menjalankan program perlindungan dan peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia melalui sertifikasi dan pelatihan bagi sekitar 208 ribu pekerja migran.

"Karena jumlah devisa yang bisa dicapai adalah nomor empat sebanyak 17,1 miliar dolar AS. Dan ini sehabis besi baja, batu bara, dan sawit," kata Anin.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyampaikan paparannya dalam agenda bertajuk "Pertemuan Presiden Republik Indonesia dengan Pengusaha Kadin Pusat dan Daerah Seluruh Indonesia" yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (31/07/2026).

Program quick win berikutnya adalah renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai dukungan terhadap Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

"Ini kami mulai dari awal bagaimana perubahan itu mempunyai suatu dampak yang luar biasa dan bisa menciptakan 19 juta lapangan kerja sehingga program 3 juta rumah memang kami dukung sejak awal," papar Anin.

Lebih lanjut, Anin juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan jajaran menteri atas sinergi yang telah terjalin dengan Kadin dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penguatan diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat global. Menurut Anin, Kadin terus dilibatkan dalam berbagai misi ke luar negeri untuk membuka peluang perdagangan, investasi, dan industrialisasi bagi Indonesia.

"Pak Presiden, bersama kami diberikan kesempatan untuk melakukan lawatan ke luar negeri yang tujuannya kalau dalam bahasa kami adalah mencari lawan main. Mencari lawan main untuk berdagang, untuk berinvestasi, dan berindustrialisasi," ujar Anin.

Anin menambahkan, realisasi investasi nasional pada semester pertama 2026 menunjukkan tren yang positif. Dari target investasi sebesar Rp2.041 triliun pada tahun ini, sekitar separuhnya telah terealisasi dan berhasil menciptakan hampir 1,5 juta lapangan kerja baru. Untuk memastikan berbagai peluang kerja sama internasional dapat dimanfaatkan secara optimal oleh dunia usaha nasional, Kadin membentuk Kadin Global Engagement Office (GEO).

Presiden Prabowo Subianto menyimak paparan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dalam agenda bertajuk “Pertemuan Presiden Republik Indonesia dengan Pengusaha Kadin Pusat dan Daerah Seluruh Indonesia” yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (31/07/2026).



“Tujuannya untuk menjadi project management dalam memastikan bahwa apa yang telah diperjuangkan pemerintah, baik Free Trade Agreement (FTA) maupun Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), dapat juga termaksimalkan,” kata Anin.

Selain itu, Kadin kata Anin secara rutin menggelar forum diplomasi ekonomi bersama para duta besar guna memperkuat hubungan perdagangan Indonesia dengan berbagai negara.

“Setiap hari Jumat pada minggu kedua kami mengadakan suatu acara diplomasi dengan seluruh duta besar dan kami keliling dari kementerian ke kementerian untuk memastikan bahwa hubungan antara luar negeri dan juga kepada Kadin daerah serta asosiasi dapat berjalan dengan lancar,” ujar Anin.

Dalam kesempatan tersebut, Anin turut memperkenalkan inisiatif We Buy From Indonesia, sebuah platform perdagangan dan teknologi yang menampilkan berbagai produk Indonesia yang telah menjadi bagian dari rantai pasok global.

“Perkenalkanlah kami ingin sekali menyampaikan suatu inisiatif yang berjudul We Buy From Indonesia. Ini adalah inisiatif yang bukan saja sebuah katalog, tapi ini adalah suatu platform teknologi dan juga perdagangan, di mana digambarkan bahwa banyak sekali produk-produk dunia dan Indonesia yang sudah menjadi bagian daripada supply chain dunia dan dibuat di Indonesia,” kata Anin.

Anin menjelaskan, platform tersebut tidak hanya menampilkan produk nasional seperti Pindad dan Kopiko, tetapi juga menunjukkan keterlibatan industri Indonesia dalam rantai pasok berbagai merek global.

“Bukan saja di antaranya Indonesia, Pindad, sepatu On Cloud, Kopiko, tapi juga di seberang sana dipakai oleh Tesla, Airbus, Kia, sampai kepada IKEA dan juga yang lain-lain,” ujar Anin.

Anin mengatakan, platform tersebut dikembangkan untuk memperlihatkan potensi ekspor Indonesia secara lebih komprehensif sekaligus meningkatkan kapasitas produsen nasional agar semakin terintegrasi dalam rantai pasok global. Anin menambahkan, We Buy From Indonesia disusun dalam tiga bahasa, yakni Indonesia, Inggris, dan Mandarin, serta dikembangkan bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Perdagangan RI, agar dapat menjadi referensi data ekspor Indonesia.

Menutup laporannya kepada Presiden, Anin menegaskan bahwa Indonesia perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap hingga mencapai 8 persen agar mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Anin juga menegaskan kesiapan Kadin untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ke depannya kami berharap Kadin bisa bekerja sama dan bahu-membahu dengan pemerintah. Mudah-mudahan Pak Presiden juga selalu sehat dan bisa memimpin kita bukan saja keluar daripada tantangan ini, tapi juga bisa maju menuju ke 8 persen,” pungkas Anin.



Presiden RI Prabowo Subianto berfoto bersama jajaran pengurus Kadin Indonesia, Perwakilan Kadin Provinsi dan Pimpinan Asosiasi, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (31/07/2026).

Hadir pula jajaran Ketua Umum (Ketum) Kadin Provinsi di antaranya Ketum Kadin Provinsi Sumatra Barat Buchari Bachter, Ketum Kadin Provinsi Sumatra Selatan Affandi Udji, Ketum Kadin Provinsi Jambi Usman, Ketum Kadin Provinsi Bangka Belitung Ritchie Glen Yapranadi, Ketum Kadin Provinsi Jawa Barat Almer Faiq Rusydi, Ketum Kadin Provinsi Jawa Timur Adik Dwi Putranto, Ketum Kadin Provinsi Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono, Ketum Kadin Provinsi Kalimantan Tengah Rahmat Nasution Hamka, Ketum Kadin Provinsi Kalimantan Timur Putri Amanda Nurramadhani, Ketum Kadin Provinsi Kalimantan Utara Kilit Laing, Ketum Kadin Provinsi Maluku Utara Muksin Thalib, Ketum Kadin Provinsi Sulawesi Barat Zaneth Raodathul Djannah, Ketum Kadin Provinsi Sulawesi Selatan Andi Iwan Darmawan Aras, Ketum Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara Anton Timbang, Ketum Kadin Provinsi Sulawesi Tengah Gufran Ahmad, Ketum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Timur Bobby Lianto, Ketum Kadin Provinsi Papua Jacleana Joku dan Ketum Kadin Provinsi Papua Barat Suriyati Faisal.

Presiden Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie di sela-sela agenda yang bertajuk “Pertemuan Presiden Republik Indonesia dengan Pengusaha Kadin Pusat dan Daerah Seluruh Indonesia” yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (31/07/2026).



HEADLINE

KADIN INDONESIA SAMBUT AGENDA BESAR PRESIDEN, MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI 6% TAHUN 2027



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Senin, 17 Agustus 2026, di Istana Merdeka, Jakarta.

Jakarta, 14 Agustus 2026 — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut positif arah kebijakan ekonomi dan pembangunan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di hadapan DPR RI, Jumat (14/08/2026).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menilai berbagai agenda yang disampaikan Presiden menunjukkan tekad pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mempercepat transformasi struktural. Kadin, sebagai mitra strategis pemerintah, siap mendukung implementasi kebijakan tersebut melalui semangat Indonesia Incorporated, kolaborasi pemerintah, dunia usaha, BUMN, Danantara, pemerintah daerah, UMKM, perguruan tinggi, pekerja, serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Berikut pandangan Kadin Indonesia terhadap sepuluh isu utama yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

1. Fundamental Ekonomi Kuat, Momentum Menarik Investasi

Kadin Indonesia menyambut positif pengakuan lembaga pemeringkat internasional terhadap ketahanan fundamental ekonomi Indonesia. Presiden menyampaikan bahwa S&P Global Ratings pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil, sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. Penilaian tersebut antara lain ditopang prospek pertumbuhan ekonomi, kebijakan makroekonomi yang berhati-hati dan posisi utang pemerintah.

Pengakuan juga datang dari China Lianhe Credit Rating yang, menurut paparan Presiden, memberikan rating AAA dengan outlook stabil dalam penerbitan Panda Bond Indonesia. Pemerintah menyampaikan bahwa lembaga tersebut melihat fundamental ekonomi Indonesia tetap solid, kebijakan pemerintah efektif, perekonomian memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal dan inflasi tetap terkendali.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie memandang kepercayaan lembaga internasional tersebut sebagai modal penting bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi. Stabilitas ekonomi, disiplin fiskal dan kredibilitas kebijakan merupakan tiga faktor yang sangat diperhatikan dunia usaha sebelum mengambil keputusan investasi jangka panjang.

“Bagi dunia usaha, trust adalah modal. Ketika lembaga pemeringkat internasional dari Barat maupun Timur memberikan penilaian positif terhadap Indonesia, ini memperkuat pesan bahwa Indonesia memiliki fundamental yang baik dan prospek jangka panjang yang menjanjikan,” kata Anindya.

Menurut Anindya, momentum tersebut perlu diterjemahkan menjadi investasi riil. Stabilitas makroekonomi harus diperkuat dengan kepastian hukum, konsistensi regulasi, kemudahan perizinan, biaya logistik yang kompetitif dan pelayanan investasi yang semakin baik. Tujuannya agar modal tidak ber-



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat menghadiri Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPRD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026).

henti pada investasi portofolio, melainkan masuk ke sektor riil, membangun pabrik, melakukan hilirisasi, membawa teknologi dan menciptakan pekerjaan.

Kadin siap bekerja bersama pemerintah dalam semangat Indonesia Incorporated. Pemerintah menjaga stabilitas dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, sedangkan dunia usaha membawa modal, teknologi, inovasi dan jaringan pasar. Kolaborasi tersebut harus bermuara pada penciptaan pekerjaan, penurunan pengangguran dan kemiskinan, penyempitan kesenjangan serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

2. RAPBN Rp4.097,2 Triliun Harus Menjadi Pengungkit Investasi

Kadin Indonesia mencermati RAPBN 2027 yang dirancang dengan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, dibandingkan Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026. Pembiayaan anggaran direncanakan Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40% terhadap PDB, lebih rendah daripada target defisit APBN 2026 sebesar 2,68% PDB.

Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, yield SBN 10 tahun 6,9%, harga minyak mentah Indonesia US\$75 per barel, lifting minyak 610.000 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari.



Dari kiri) Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Kamrussamad menghadiri acara Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Kadin menilai postur tersebut menunjukkan pemerintah tetap menggunakan kebijakan fiskal sebagai instrumen pembangunan sekaligus berupaya menjaga disiplin fiskal. Besarnya belanja negara memberikan peluang untuk menciptakan daya ungkit yang jauh lebih besar apabila dikombinasikan dengan investasi BUMN, Danantara, dan sektor swasta.

"Belanja negara di atas Rp4.000 triliun merupakan kekuatan ekonomi yang sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana setiap rupiah APBN mampu menciptakan multiplier effect dan menarik investasi swasta berkali-kali lipat," ujar Anindya.

Kadin berpandangan, pemerintah tentu tidak sendirian. Proyek APBN yang mempunyai kelayakan ekonomi dapat dikembangkan melalui kemitraan pemerintah dan swasta sehingga ruang fiskal dapat lebih banyak diarahkan kepada pelayanan dasar, perlindungan sosial dan sektor yang belum dapat dibiayai secara komersial.

Dalam optimalisasi pendapatan negara, Kadin mendukung perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan dan penutupan kebocoran. Pada saat yang sama, kebijakan penerimaan perlu menjaga keberlanjutan dunia usaha. Perusahaan yang berkembang, investasi yang meningkat dan pekerjaan yang bertambah pada akhirnya akan memperluas basis pajak secara berkelanjutan.

3. Delapan Program Prioritas Membuka Ruang Kolaborasi Besar

RAPBN 2027 akan difokuskan untuk mendukung delapan Program Kerja Prioritas Nasional, meliputi kemandirian pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0%-6,5%, tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30%-4,87%, rasio Gini menjadi sekitar 0,362-0,367, serta Indeks Modal Manusia meningkat menjadi 0,575.



Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani berfoto bersama Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Senin, 17 Agustus 2026, di Istana Merdeka, Jakarta. .

Kadin menilai hampir seluruh prioritas tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan dunia usaha. Ketahanan pangan membutuhkan investasi produksi, pengolahan, pergudangan, cold chain dan logistik. Kemandirian energi membutuhkan investasi pembangkit dan jaringan. Program perumahan menggerakkan industri semen, baja, keramik, furnitur dan jasa keuangan. Hilirisasi membutuhkan modal, teknologi dan akses pasar.

"Kadin mendukung penuh delapan prioritas pemerintah karena seluruhnya bermuara pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Yang perlu kita bangun adalah efek pengganda sehingga satu program pemerintah menggerakkan sebanyak mungkin kegiatan ekonomi," kata Anindya.

Kadin juga mendorong keterlibatan UMKM, koperasi dan pengusaha daerah dalam rantai pasok program nasional. Konsep Indonesia Incorporated harus menjangkau seluruh lapisan dunia usaha, bukan hanya perusahaan besar.

Ukuran akhirnya adalah kesejahteraan. Investasi harus menciptakan pekerjaan, pekerjaan meningkatkan pendapatan keluarga, dan peningkatan pendapatan memperkuat konsumsi serta daya beli. Dengan mekanisme tersebut, pertumbuhan ekonomi dapat secara nyata menurunkan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan.

4. Giant Sea Wall, Proyek Lintas Generasi Harus Dimulai

Kadin menyambut baik rencana pemerintah memulai pembangunan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa. Pemerintah memperkirakan pembangunan membutuhkan waktu sekitar 15-20 tahun dan akan dibagi menjadi 15 segmen dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

Giant Sea Wall tidak hanya dirancang sebagai tanggul laut, tetapi juga sebagai infrastruktur pendukung air bersih, konektivitas serta perlindungan kawasan ekonomi dan industri Pantura. Proyek tersebut penting karena kawasan pantai utara Jawa merupakan rumah bagi jutaan penduduk sekaligus lokasi berbagai pusat manufaktur, logistik dan aktivitas ekonomi nasional.

"Kadin mendukung keberanian pemerintah memulai Giant Sea Wall. Ini adalah proyek lintas generasi. Yang dilindungi bukan hanya daratan, tetapi juga jutaan penduduk, pusat industri, jaringan logistik dan aset ekonomi nasional," kata Anindya.

Kadin melihat ruang yang sangat besar bagi pembiayaan inovatif. APBN dapat menjadi katalis, sementara Danantara, BUMN, investor institusi dan swasta dapat berpartisipasi pada bagian proyek yang memiliki kelayakan komersial.

Kadin juga mendorong penggunaan sebanyak mungkin produk, teknologi dan keahlian nasional. Proyek tersebut dapat menjadi sarana peningkatan kapasitas industri konstruksi, baja, semen, rekayasa, konsultansi dan teknologi Indonesia.

Pelaksanaannya tetap membutuhkan kajian lingkungan, hidrologi, tata ruang dan sosial yang komprehensif. Dengan demikian, Giant Sea Wall bukan sekadar proyek fisik, melainkan proyek pembangunan kawasan dan peningkatan kemampuan teknologi nasional.

5. PFI Jakarta-Bali, Indonesia Bisa Menjadi Magnet Modal Global

Kadin Indonesia menyambut positif rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFI), dengan Jakarta sebagai lokasi awal sebelum dikembangkan ke Bali dan kemungkinan wilayah lain.

PFI dirancang menjadi pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase dan penyelesaian sengketa komersial berstandar internasional. Aktivitasnya dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif, bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office serta manajemen investasi.

Menurut Kadin, Indonesia mempunyai skala ekonomi, populasi, sumber daya alam dan kebutuhan investasi yang cukup besar untuk membangun pusat keuangan regional yang kompetitif.

"Selama ini terdapat transaksi dengan underlying assets Indonesia, tetapi pembiayaan atau penyelesaian transaksinya dilakukan di luar negeri. PFI memberikan kesempatan untuk membawa lebih banyak aktivitas bernilai tambah itu ke Indonesia," ujar Anindya.

Jakarta mempunyai keunggulan sebagai pusat korporasi, pemerintahan, perbankan dan pasar modal, sementara Bali mempunyai daya tarik internasional yang kuat bagi investor dan profesional global. Kombinasi keduanya berpotensi menjadi kekuatan tersendiri.

Namun, keberhasilan pusat keuangan internasional bergantung pada kepercayaan. Kepastian hukum, regulator kredibel, penyelesaian sengketa cepat, sistem perpajakan kompetitif dan kemudahan mobilitas talenta global menjadi prasyarat. Kadin siap membantu mempromosikan PFI kepada jaringan dunia usaha dan investor internasional.



(Dari kiri) Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Senin, 17 Agustus 2026, di Istana Merdeka, Jakarta.

perbaikan rata-rata sekitar Rp4 miliar per puskesmas, serta memperbaiki 514 laboratorium kesehatan masyarakat.

Pemerintah juga menargetkan seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan selesai direnovasi paling lambat 2029. Program tersebut akan dibarengi peningkatan digitalisasi pendidikan dan akses pembelajaran jarak jauh.

"Infrastruktur terpenting suatu negara bukan hanya jalan, pelabuhan dan bandara. Manusia adalah infrastruktur utama pembangunan. Sekolah yang baik dan pelayanan kesehatan yang baik akan menentukan produktivitas Indonesia dalam puluhan tahun mendatang," kata Anindya.

Kadin melihat program renovasi tersebut juga memiliki efek ekonomi yang luas. Pembangunan ribuan fasilitas pendidikan dan kesehatan akan menggerakkan industri konstruksi, bahan bangunan, furnitur, alat kesehatan, teknologi pendidikan dan menciptakan pekerjaan di berbagai daerah.

Karena itu, Kadin mendorong keterlibatan pengusaha daerah, UMKM dan produk industri nasional sepanjang memenuhi standar kualitas dan harga yang kompetitif. Dengan demikian, belanja pemerintah memberikan manfaat ganda: kualitas pelayanan publik meningkat sekaligus ekonomi daerah bergerak.

Kadin mendukung pengadaan yang semakin terkonsolidasi, transparan dan efisien agar penghematan anggaran dapat dialihkan kembali untuk memperbaiki lebih banyak sekolah, puskesmas dan fasilitas publik.

8. Kadin Sambut Pelibatan Swasta, Aset Negara Harus Lebih Produktif

Kadin menyambut positif rencana pemerintah memperluas keterlibatan swasta dalam pemanfaatan aset negara dan BUMN yang belum optimal. Tanah, gedung, jaringan, kawasan, bandara maupun fasilitas lainnya dapat dikerjasamakan melalui proses terbuka dan kompetitif tanpa harus melepaskan kepemilikan strategis negara.

Pemerintah melihat model monetisasi aset yang diterapkan sejumlah negara sebagai salah satu referensi. Swasta memperoleh kesempatan mengoperasikan atau mengembangkan aset, sementara kepemilikan tetap berada pada negara dan nilai ekonomi yang dihasilkan dapat digunakan untuk pembangunan berikutnya.

"Aset negara jangan dibiarkan tidur ketika masyarakat membutuhkan pekerjaan dan Indonesia membutuhkan investasi. Kalau sektor swasta dapat meningkatkan produktivitas aset tanpa negara kehilangan kepemilikan strategisnya, ini dapat menciptakan win-win solution," ujar Anindya.

6. Bursa Mineral Harus Memperkuat Posisi Indonesia dalam Penentuan Harga

Kadin mendukung rencana pemerintah melanjutkan kebijakan ekspor satu pintu dan membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan beroperasi mulai 1 Januari 2027 di bawah pengawasan OJK.

Indonesia merupakan produsen utama berbagai komoditas strategis dunia, tetapi pembentukan harga internasional masih banyak berlangsung di luar negeri. Pemerintah ingin membangun mekanisme harga referensi Indonesia melalui pasar yang transparan, likuid dan dipercaya dunia.

"Kalau Indonesia mempunyai pangsa produksi yang besar, Indonesia juga harus mempunyai price discovery mechanism yang kredibel. Kita tidak cukup menjadi produsen. Indonesia harus naik kelas dalam rantai nilai perdagangan dunia," kata Anindya.

Kadin memandang keberhasilan bursa akan sangat ditentukan oleh likuiditas dan kredibilitas. Bursa harus memiliki tata kelola berstandar internasional, infrastruktur perdagangan yang andal, biaya transaksi kompetitif serta partisipasi produsen dan pembeli global.

Peran OJK menjadi penting untuk menjamin integritas pasar. Pengawasan harus mempersempit ruang manipulasi, under-invoicing dan transaksi yang merugikan negara tanpa menciptakan tambahan birokrasi yang menghambat eksportir.

Prinsip yang didorong Kadin adalah transparansi yang semakin tinggi dengan birokrasi semakin sederhana. Dengan desain yang tepat, pemerintah memperoleh penerimaan dan devisa yang lebih optimal, sedangkan produsen mendapatkan pasar dan pembentukan harga yang lebih kredibel.

7. Belanja Rp4.097 Triliun Harus Terasa di Sekolah dan Puskesmas

Kadin menyambut komitmen pemerintah menggunakan kekuatan RAPBN 2027 untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan, dengan kebutuhan -



Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie saat menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Senin, 17 Agustus 2026, di Istana Merdeka, Jakarta.

Kadin mendorong agar kebijakan dirancang secara selektif, transparan dan berbasis kebutuhan strategis nasional. Bidang kesehatan, AI, semikonduktor, energi, bioteknologi, manufaktur maju, keuangan serta sektor teknologi lainnya dapat menjadi prioritas.

Tujuannya adalah mengubah brain drain menjadi brain circulation dan brain gain. Talenta Indonesia tidak harus memilih antara karier global dan tanah air. Kemampuan serta jaringan global mereka justru perlu dihubungkan dengan peluang investasi dan pembangunan di Indonesia.

10. Danantara dan DSI Bisa Menjadi Mesin Baru Investasi dan Industrialisasi

Kadin memandang Danantara Indonesia dan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) mempunyai peran strategis dalam transformasi ekonomi nasional. Danantara diarahkan menjadi instrumen untuk menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia.

DSI, pada sisi lain, diarahkan untuk membantu memperkuat tata kelola sumber daya dan transaksi ekspor, termasuk mempersempit praktik under-invoicing dan transfer pricing yang dapat mengurangi penerimaan negara dan devisa.

“Kadin mendukung Danantara menjadi katalis, bukan bekerja sendirian. Kalau satu rupiah modal Danantara dapat menarik beberapa rupiah investasi swasta domestik maupun asing, daya ungkitnya terhadap perekonomian akan sangat besar,” kata Anindya.

Kadin mendorong Danantara memprioritaskan investasi dengan multiplier effect tinggi, antara lain hilirisasi, energi, infrastruktur, manufaktur maju, ketahanan pangan dan teknologi. Kemitraan dengan sektor swasta akan memungkinkan pembagian risiko sekaligus menjaga disiplin komersial proyek.

Kadin juga mendukung penguatan transparansi transaksi sumber daya alam melalui DSI. Namun, sistem tersebut perlu sepenuhnya digital, terintegrasi dan mudah digunakan agar pengawasan yang semakin kuat tidak menambah birokrasi bagi dunia usaha.

“Prinsipnya adalah more transparency, less bureaucracy. Kekayaan Indonesia harus menjadi modal Indonesia. Modal menjadi investasi, investasi membangun industri, industri menciptakan pekerjaan, dan pekerjaan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itulah semangat Indonesia Incorporated yang ingin kita wujudkan bersama,” ujar Anindya.

Swasta dapat membawa modal, teknologi, kemampuan manajerial, kreativitas dan jaringan pasar. Aset seperti bandara, misalnya, dapat dikembangkan secara terintegrasi dengan penerbangan, hotel, pariwisata, logistik dan kawasan komersial.

Kadin mendorong pemerintah menyiapkan pipeline aset yang transparan, valuasi independen, pembagian risiko yang proporsional, proses tender kompetitif serta kepastian kontrak jangka panjang.

Inilah salah satu wujud konkret Indonesia Incorporated: pemerintah menjaga kepentingan publik dan memberikan kepastian regulasi, BUMN dan Danantara menjadi katalis, sementara sektor swasta membawa investasi dan entrepreneurship. Hasil akhirnya harus berupa peningkatan produktivitas, pekerjaan dan penerimaan negara.

9. Dwikewarganegaraan Terbatas Bisa Mengubah Brain Drain Menjadi Brain Gain

Kadin menyambut positif usulan pemerintah membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi diaspora dengan talenta istimewa yang dapat memberikan kontribusi strategis kepada Indonesia.

Diaspora Indonesia mencakup ilmuwan, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet dan profesional kelas dunia. Sebagian harus mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier dan keluarga.

“Kompetisi antarnegara hari ini bukan hanya kompetisi mendapatkan modal, tetapi juga kompetisi mendapatkan the best brains and the best talents. Indonesia mempunyai diaspora luar biasa dan kita harus membuat mereka tetap menjadi bagian dari pembangunan Indonesia,” kata Anindya.

Keterhubungan diaspora dengan perekonomian nasional dapat mempercepat transfer teknologi, pengetahuan, jaringan internasional dan modal. Indonesia membutuhkan semakin banyak talenta kelas dunia untuk mempercepat industrialisasi dan transformasi digital.

DUNIA USAHA SIAP BERGOTONG ROYONG MENDORONG INDONESIA INCORPORATED



Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama jajaran pimpinan MPR RI, DPR RI dan DPD RI di sela-sela acara Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyambut positif arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026). Bagi dunia usaha, berbagai agenda pemerintah —mulai reformasi birokrasi, pembangunan sumber daya manusia, swasembada pangan dan energi, penguatan ekonomi desa, investasi, reformasi BUMN dan Danantara, hingga supremasi hukum—memiliki satu benang merah: Indonesia membutuhkan pemerintahan yang efektif dan kolaborasi erat pemerintah dengan dunia usaha.

Kadin memandang kemitraan tersebut perlu dibangun dalam semangat gotong royong dan Indonesia Incorporated. Pemerintah berperan menciptakan regulasi yang jelas, konsisten dan memberikan kepastian; birokrasi memastikan pelayanan cepat dan mudah; sedangkan dunia usaha menghadirkan investasi, teknologi, inovasi, jaringan pasar dan lapangan kerja. Dengan pembagian peran yang jelas, kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

1. Reformasi Birokrasi: Dunia Usaha Membutuhkan Kepastian, Bukan Sekadar Kecepatan

Presiden Prabowo memberikan perhatian sangat kuat terhadap reformasi birokrasi. Presiden mengakui masih terdapat birokrasi yang berbelit, tidak efisien, bahkan aparatur yang menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri, keluarga maupun kelompok.

Menurut Presiden, praktik seperti itu harus diberantas dan tidak boleh ditutup-tutupi karena birokrasi yang korup dan tidak efisien pada akhirnya dapat menghancurkan bangsa.

Pesan Presiden bahwa “negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit” juga sangat relevan bagi dunia usaha. Pemerintah telah menunjukkan bahwa deregulasi dapat menghasilkan dampak nyata, antara lain melalui penghapusan 145 aturan penyaluran pupuk, digitalisasi bantuan sosial, pembangunan Mal Pelayanan Publik, serta integrasi layanan pemerintah berbasis digital.



(Dari kiri) Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia Kamrussamad bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menghadiri acara Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).



Presiden Prabowo Subianto menyampaikan salam di sela-sela acara Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026).

Kadin Indonesia mendukung penuh arah reformasi tersebut. Bagi dunia usaha, reformasi birokrasi bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan salah satu faktor utama yang menentukan daya saing Indonesia. Investor membutuhkan izin yang cepat, tetapi lebih penting lagi membutuhkan kepastian aturan, konsistensi kebijakan, transparansi proses dan kepastian waktu penyelesaian. Perizinan yang cepat tetapi aturannya sering berubah tetap menciptakan risiko bagi investasi jangka panjang.

Karena itu, Kadin mendorong agar semangat deregulasi Presiden diterjemahkan secara konsisten dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Jangan sampai sebuah kebijakan sudah dipermudah di tingkat pusat, tetapi kembali menjadi rumit ketika pelaku usaha berhadapan dengan aturan daerah, izin teknis ataupun interpretasi berbeda antarinstansi. Digitalisasi juga perlu diarahkan menuju prinsip *once only*, yakni data yang sudah diserahkan perusahaan kepada satu instansi pemerintah tidak perlu berulang kali diminta oleh instansi lain.

Kadin siap menjadi mitra pemerintah untuk mengidentifikasi hambatan berusaha yang masih terjadi di lapangan. Semangat Indonesia Incorporated membutuhkan pemerintah dan dunia usaha duduk dalam satu meja untuk menyelesaikan bottleneck investasi. Pemerintah membuat aturan yang jelas dan menjaga integritas birokrasi, sedangkan dunia usaha menjalankan investasi secara patuh, menciptakan pekerjaan dan membayar kewajibannya kepada negara. Reformasi birokrasi yang berhasil pada akhirnya harus terlihat pada turunnya biaya berusaha, meningkatnya investasi, dan bertambahnya lapangan kerja.



2. MBG: Investasi SDM Sekaligus Mesin Ekonomi Daerah

Presiden Prabowo menempatkan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi pembangunan manusia. Presiden menegaskan anak tidak dapat belajar secara optimal dalam keadaan lapar, sementara stunting dapat menghambat perkembangan otak, otot dan tulang. Karena itu, MBG dipandang bukan sekadar program pemberian makanan, tetapi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Presiden pada saat yang sama memberikan peringatan sangat keras terhadap kemungkinan korupsi dalam MBG. Dana yang diperuntukkan bagi makanan anak harus dijaga integritasnya. Program akan diteruskan, tetapi Presiden menekankan pentingnya perbaikan, efisiensi dan pengawasan agar manfaat benar-benar sampai kepada penerima. Pernyataan ini sangat melegakan.

Kadin melihat MBG memiliki dua manfaat strategis sekaligus. Pertama adalah investasi pada human capital Indonesia. Anak yang lebih sehat, memperoleh gizi memadai dan mampu belajar dengan baik akan menjadi tenaga kerja yang lebih produktif pada masa mendatang. Dalam perspektif dunia usaha, pembangunan manusia sama pentingnya dengan pembangunan jalan, pelabuhan, kawasan industri ataupun pembangkit listrik.

Kedua, MBG dapat menjadi penggerak ekonomi lokal yang sangat besar apabila rantai pasoknya dirancang dengan tepat. Kebutuhan beras, telur, ayam, ikan, susu, sayuran, buah, bumbu, kemasan, transportasi dan jasa logistik menciptakan *backward linkage* yang luas. Kadin mendorong agar petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM dan perusahaan nasional menjadi bagian utama dari ekosistem tersebut. Dengan begitu, anggaran MBG tidak hanya menghasilkan makanan bergizi, tetapi juga berputar di daerah dan menciptakan lapangan kerja.

Suasana acara Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026).



Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan acara Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/08/2026).

Dunia usaha siap membantu pemerintah membangun sistem pengadaan, logistik, cold chain, keamanan pangan, standardisasi dan digital traceability. Kuncinya adalah tata kelola yang transparan, standar yang jelas dan mekanisme pengadaan yang memberi kesempatan luas kepada pelaku ekonomi lokal yang kompeten. Dalam semangat Indonesia Incorporated, MBG dapat menjadi contoh bagaimana belanja pemerintah sekaligus digunakan untuk membangun generasi sehat dan basis produksi nasional.

3. Swasembada Pangan dan Energi: Kadin Siap Memperkuat Industrialisasi

Presiden menyatakan Indonesia pada 2026 telah mencapai swasembada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Pemerintah berikutnya menargetkan swasembada bawang putih serta daging sapi dan kerbau. Presiden mengaitkan keberhasilan tersebut dengan perbaikan kebijakan, termasuk pemangkasan 145 aturan penyaluran pupuk.

Agenda kemandirian juga diperluas ke energi. Presiden menyatakan penerapan biodiesel B50 memungkinkan Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut ditempatkan dalam konteks ketidakpastian geopolitik global: Indonesia harus memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan strategisnya sendiri ketika rantai pasok internasional terganggu.

Kadin memandang ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional. Namun, swasembada perlu dibangun dengan prinsip produktivitas dan daya saing, bukan sekadar mengurangi impor. Produksi pangan harus efisien, pendapatan petani meningkat, harga konsumen tetap terjangkau dan industri pengolahan memperoleh bahan baku yang berkesinambungan. Karena itu, teknologi pertanian, benih, irigasi, mekanisasi, pembiayaan, pergudangan dan logistik harus dikembangkan secara terintegrasi.

Demikian pula B50 membuka peluang membangun rantai industri energi nasional yang lebih kuat. Dunia usaha membutuhkan roadmap jangka panjang yang jelas mengenai biodiesel dan transisi energi agar investasi pada perkebunan, refinery, infrastruktur distribusi, otomotif dan teknologi mesin dapat direncanakan dengan baik. Kepastian kebijakan penting karena investasi pada sektor energi mempunyai horizon puluhan tahun.

Kadin siap menjembatani pemerintah, petani, industri, lembaga pembiayaan dan investor. Indonesia Incorporated berarti kekayaan sumber daya nasional diolah bersama menjadi kekuatan industri. Sawit jangan hanya menghasilkan CPO, pertanian jangan berhenti pada komoditas mentah, dan sektor pangan harus masuk semakin jauh ke pengolahan bernilai tambah. Dengan demikian, swasembada tidak hanya menghemat devisa tetapi juga menciptakan industri, ekspor dan pekerjaan baru.

4. Koperasi Merah Putih: Perkuat Rakyat, Jangan Mematikan Swasta

Presiden Prabowo mengatakan sekitar 10.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah beroperasi hingga 14 Agustus 2026, dengan sekitar 3.300 di antaranya telah beroperasi optimal. Pemerintah menargetkan 30.000 koperasi beroperasi optimal pada akhir 2026. Koperasi diarahkan menjadi offtaker hasil produksi, pusat distribusi, pengelola logistik serta penyalur barang bersubsidi.

Presiden juga menegaskan negara harus memiliki kemampuan mengendalikan rantai pasok agar masyarakat tidak dipermainkan oleh pihak yang memiliki kekuatan modal besar. Namun, Presiden menegaskan pemerintah bukan antipasar. Penguatan koperasi dimaksudkan untuk memperbaiki posisi tawar petani, nelayan dan masyarakat desa.

Kadin mendukung penguatan koperasi sepanjang koperasi dibangun sebagai mitra dan bagian dari ekosistem pasar, bukan sebagai pengganti atau pesaing yang memperoleh perlakuan istimewa terhadap swasta. Indonesia mempunyai jutaan pedagang, distributor, perusahaan logistik, UMKM dan perusahaan nasional yang telah membangun jaringan distribusi selama puluhan tahun. Infrastruktur tersebut sebaiknya diintegrasikan dengan Koperasi Merah Putih.

Model yang dapat dikembangkan adalah kemitraan. Koperasi menjadi agregator produksi masyarakat; perusahaan membantu teknologi, standardisasi, pembiayaan, pengolahan dan akses pasar. Dengan model ini, koperasi tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Koperasi dapat berkonsentrasi memperkuat anggota dan produksi desa, sementara sektor swasta menyediakan keahlian yang telah dimilikinya.



Presiden Prabowo Subianto memberikan salam usai menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPRD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Kadin siap membantu membangun kemitraan tersebut, termasuk untuk Kampung Nelayan Merah Putih. Cold storage, pengolahan ikan, logistik berpendingin, packaging dan akses ekspor membutuhkan investasi serta keahlian bisnis. Prinsipnya, negara hadir memperkuat pasar, bukan menggantikan pasar. Gotong royong antara koperasi, UMKM, BUMN dan swasta akan menghasilkan rantai pasok nasional yang jauh lebih kuat.

5. Investasi Rp1.010 Triliun dan Target Pertumbuhan 6%: Kuncinya Kepastian Berusaha

Presiden melaporkan realisasi investasi semester I-2026 mencapai Rp1.010 triliun dan menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Pada 2025, investasi mencapai Rp1.931 triliun dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta pekerjaan. Di tengah ketidakpastian global, capaian tersebut dinilai menunjukkan tetap kuatnya kepercayaan terhadap Indonesia.

Dengan pertumbuhan ekonomi semester I-2026 sebesar 5,45%, Presiden optimistis ekonomi dapat tumbuh hingga sekitar 6% pada akhir tahun apabila pemerintah menjalankan kebijakan yang tepat dan rasional. Namun Presiden mengingatkan investasi dan pertumbuhan bukan tujuan akhir; keduanya harus menghasilkan pekerjaan dan kesejahteraan.

Kadin sependapat bahwa Indonesia membutuhkan investasi yang bukan hanya besar secara nominal, tetapi juga berkualitas. Investasi idealnya mempunyai multiplier effect besar: menyerap tenaga kerja, menggunakan pemasok lokal, melakukan transfer teknologi, memperbesar kapasitas industri, menghasilkan ekspor dan menciptakan basis produksi baru. Karena itu, investasi manufaktur dan industri berorientasi ekspor perlu terus diperkuat.

Untuk mengejar pertumbuhan 6% dan selanjutnya menuju pertumbuhan yang lebih tinggi, Indonesia membutuhkan investasi swasta dalam skala jauh lebih besar. Dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi, stabilitas kebijakan fiskal, kepastian perpajakan, energi kompetitif, infrastruktur, akses pembiayaan, sumber daya manusia berkualitas dan terutama kepastian hukum. Investor menghitung return, tetapi mereka juga menghitung regulatory risk.

Kadin siap menjadi jembatan antara pemerintah dengan investor domestik maupun internasional. Indonesia Incorporated harus menjadi cara kerja: pemerintah membuka jalan dan menghilangkan hambatan, BUMN dan Danantara menjadi katalis, sementara swasta menjadi mesin utama penciptaan investasi dan pekerjaan. Apabila iklim usaha semakin mudah dan predictable, target pertumbuhan pemerintah akan semakin realistis dicapai.

6. Reformasi BUMN: Harus Menciptakan Kompetisi yang Sehat

Presiden menegaskan BUMN merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik direksi, komisaris ataupun sumber dana penguasa. Pemerintah karena itu melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap struktur 1.074 BUMN beserta anak, cucu dan cicit perusahaan. Presiden menyebut 290 entitas telah ditutup dan jumlahnya ditargetkan menyusut menjadi maksimal 300 pada akhir 2026.

Pemerintah juga melaporkan efisiensi biaya overhead lebih dari Rp50 triliun, dengan target melebihi Rp70 triliun hingga akhir tahun. Laba BUMN disebut meningkat dari Rp186 triliun pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025, sedangkan dividen diproyeksikan mencapai Rp200 triliun pada 2026 tanpa PMN.

Kadin mendukung BUMN yang sehat, efisien, transparan dan profesional. BUMN yang kuat merupakan aset ekonomi nasional dan dapat menjadi mitra strategis swasta. Namun reformasi BUMN juga perlu memastikan terciptanya level playing field. BUMN, swasta nasional, koperasi maupun investor asing yang beroperasi di Indonesia harus memiliki ruang untuk bertumbuh sesuai fungsi dan keunggulannya masing-masing.

Kadin memandang BUMN idealnya menjadi pionir pada sektor strategis, pembangunan infrastruktur atau investasi yang belum dapat sepenuhnya dilakukan swasta, kemudian membangun kemitraan yang luas dengan dunia usaha. Pengadaan barang dan jasa BUMN juga dapat menjadi instrumen memperbesar kapasitas perusahaan nasional dan UMKM, sepanjang dilakukan secara transparan dan kompetitif.

Restrukturisasi BUMN akan semakin bernilai apabila menghasilkan crowding-in, bukan crowding-out terhadap investasi swasta. Indonesia membutuhkan seluruh sumber modal untuk tumbuh: APBN, BUMN, Danantara, perbankan, pasar modal, investor domestik dan investasi asing. Tidak ada satu pihak yang dapat membiayai transformasi Indonesia sendirian.



Iring-iringan kendaraan Kepresidenan memasuki Kompleks Parlemen RI, di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

7. Danantara: Harus Menjadi Katalis, Bukan Menggantikan Swasta

Presiden menempatkan Danantara sebagai mesin restrukturisasi BUMN sekaligus mesin industrialisasi. Sepanjang 2026, sebanyak 26 proyek hilirisasi telah dimulai, meliputi DME, tembaga dan emas, garam industri, alumina menjadi aluminium hingga waste-to-energy. Keuntungan BUMN diarahkan kembali menjadi modal investasi produktif.

Presiden juga membuka strategi investasi global. Danantara dapat membeli atau berinvestasi pada perusahaan terbaik dunia untuk memperoleh teknologi, intellectual property, kemampuan manajemen, pengalaman industri dan akses pasar internasional. Dengan strategi tersebut, Danantara diarahkan bukan hanya sebagai pengelola aset, tetapi sebagai instrumen transformasi ekonomi.

Kadin melihat Danantara dapat memainkan peran besar sebagai catalytic capital. Indonesia membutuhkan modal sangat besar untuk hilirisasi, energi, pangan, kesehatan, digitalisasi dan infrastruktur. Danantara dapat masuk sebagai anchor investor yang meningkatkan bankability proyek dan kemudian menarik modal swasta domestik maupun global.

Karena itu, Kadin mendorong model co-investment. Danantara tidak perlu membiayai seluruh proyek sendiri. Untuk setiap rupiah modal negara yang ditempatkan, idealnya dapat menarik beberapa rupiah modal swasta. Dengan cara tersebut, kapasitas investasi nasional membesar tanpa seluruh risiko terkonsentrasi pada aset negara.

Governance menjadi syarat mutlak. Setiap investasi harus memiliki business case, target return, transparansi, manajemen risiko dan ukuran manfaat ekonomi yang jelas. Jika Danantara mampu menjalankan standar investasi kelas dunia dan sekaligus bermitra dengan swasta, lembaga ini dapat menjadi salah satu instrumen terpenting Indonesia Incorporated dalam membawa teknologi, modal dan pasar global ke Indonesia.

8. Hilirisasi Harus Naik Kelas Menjadi Industrialisasi

Presiden menegaskan proyek Danantara tidak berhenti pada pengolahan mineral. Pemerintah ingin bergerak dari hilirisasi menuju industrialisasi yang lebih luas, termasuk upstreaming dan akuisisi teknologi. Tujuannya adalah memperkuat rantai nilai, mengurangi impor dan membawa Indonesia semakin dalam ke rantai pasok global.

Restrukturisasi BUMN menjadi bagian dari strategi tersebut. Entitas yang tidak produktif dipangkas, biaya ditekan dan laba BUMN digunakan untuk membangun aset produktif baru. Dengan demikian, kekayaan negara diharapkan menciptakan siklus investasi yang terus berkembang.

Kadin menilai fase berikutnya dari hilirisasi memang harus bergerak menuju industrial deepening. Indonesia jangan berhenti pada smelter. Nikel harus bergerak menuju material baterai dan industri turunannya; tembaga menuju kabel, komponen listrik dan elektronik; aluminium menuju industri manufaktur; serta sektor pertanian dan perikanan menuju produk pangan bernilai tambah.

Untuk itu, kebijakan industri perlu memiliki roadmap yang konsisten setidaknya 10–20 tahun. Dunia usaha tidak dapat membangun pabrik hanya berdasarkan insentif jangka pendek. Kepastian pasokan energi, bahan baku, lahan, perpajakan, perdagangan, ekspor-impor dan regulasi lingkungan harus dapat diproyeksikan dalam jangka panjang.

Kadin siap mempertemukan BUMN, Danantara, perusahaan swasta nasional, UMKM dan investor global dalam ekosistem industri tersebut. Keberhasilan hilirisasi seharusnya diukur bukan hanya dari nilai investasi, tetapi dari berapa teknologi yang dikuasai Indonesia, berapa tenaga kerja berketerampilan tinggi yang tercipta, berapa kandungan lokal meningkat, dan berapa produk Indonesia masuk pasar dunia.

9. Supremasi Hukum: Modal Paling Fundamental bagi Investasi

Presiden Prabowo menegaskan hukum dan keadilan tidak boleh hanya melindungi mereka yang kuat. Demokrasi tidak cukup berhenti pada pemilu, tetapi harus menjamin hak dasar masyarakat. Presiden juga menyoroti peningkatan produktivitas Mahkamah Agung, digitalisasi layanan Mahkamah Konstitusi, peningkatan remunerasi hakim dan penguatan pengawasan etik.

Presiden menyebut pengadilan sebagai benteng terakhir masyarakat memperoleh keadilan. Prinsip tersebut sangat penting karena supremasi hukum baru mempunyai makna apabila orang kecil maupun pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik memperoleh perlakuan yang sama.



(Dari kiri) Wakil Presiden (Wapres) RI Ke-11 Boediono bersama Presiden RI Ke-7 Joko Widodo, Wapres RI Ke-13 Ma'ruf Amin, dan Wapres RI Ke-12 Jusuf Kalla saat menghadiri Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Bagi Kadin, kepastian hukum merupakan salah satu infrastruktur ekonomi paling penting. Jalan tol dapat dibangun, pelabuhan dapat diperbesar dan insentif pajak dapat diberikan, tetapi investor tetap akan berhitung ulang apabila kontrak tidak pasti, aturan berubah tiba-tiba atau sengketa bisnis membutuhkan waktu terlalu lama untuk diselesaikan.

Dunia usaha membutuhkan regulasi yang tidak tumpang tindih, perlindungan hak milik, kepastian kontrak, penyelesaian sengketa yang cepat dan independen, serta penegakan hukum yang konsisten. Prinsip yang sama harus berlaku terhadap pemerintah, BUMN, perusahaan swasta besar maupun UMKM. Equality before the law juga merupakan equality before the economy, karena kepastian hukum memberi kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha untuk bersaing.

Kadin siap bekerja bersama pemerintah untuk memperkuat rule of law dalam kegiatan ekonomi, termasuk memberikan masukan terhadap regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian di lapangan. Indonesia Incorporated hanya dapat bekerja apabila terdapat trust. Dan trust lahir ketika pemerintah konsisten pada aturan, birokrasi memberikan pelayanan, hukum ditegakkan secara adil, sementara dunia usaha menjalankan bisnis dengan integritas.

Indonesia Incorporated: Pemerintah dan Dunia Usaha Harus Berlari Bersama

Secara keseluruhan, Kadin melihat Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo memberikan arah yang kuat mengenai pembangunan manusia, kemandirian pangan dan energi, industrialisasi, reformasi BUMN, penguatan ekonomi rakyat serta reformasi institusi. Tantangan berikutnya adalah memastikan arah besar tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten dan dapat dieksekusi sampai tingkat paling bawah.

Bagi dunia usaha, pemerintah tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Tugas utama pemerintah adalah menciptakan aturan main yang jelas, menjaga kepastian hukum, menyediakan infrastruktur, menghilangkan hambatan birokrasi dan menciptakan iklim persaingan yang sehat. Dunia usaha kemudian masuk membawa modal, teknologi, inovasi, entrepreneurship, jaringan pasar dan menciptakan pekerjaan.

Itulah esensi Indonesia Incorporated yang didorong Kadin. Pemerintah, BUMN, Danantara, swasta nasional, investor global, koperasi dan UMKM bukanlah kekuatan yang harus saling menggantikan. Semuanya merupakan bagian dari satu mesin ekonomi Indonesia. Apabila pemerintah mampu memberikan kepastian dan dunia usaha diberi ruang untuk berkembang, gotong royong tersebut dapat menjadi kekuatan besar untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.***

Sumber pokok: Pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Indonesia-Thailand Business Forum: Kadin Optimistis Nilai Perdagangan Tembus 30 Miliar Dolar AS pada 2030



(Dari Kanan) Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Ketua Dewan Perdagangan Tailan (Board of Trade of Thailand) Poj Aramwattananont, serta Perdana Menteri Kerajaan Tailan H.E. Anutin Charnvirakul dalam acara Indonesia-Thailand Business Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Thai Chamber of Commerce Indonesia (TCCI) menyelenggarakan Indonesia-Thailand Business Forum bertajuk “Advancing the Indonesia-Thailand Strategic Partnership: Building Integrated Value Chains in Industry, Services, and the Halal Economy” bertepatan dengan kunjungan resmi Perdana Menteri Kerajaan Tailan H.E. Anutin Charnvirakul ke Indonesia. Forum tersebut berlangsung di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (04/08/2026).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan forum bisnis tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat dialog dan kolaborasi antara pelaku usaha Indonesia dan Tailan. Menurut Anin sapaan akrabnya, penyelenggaraan forum ini merupakan bagian dari mandat Kadin Indonesia sebagai representasi resmi dunia usaha nasional.

Dituturkan Anin, hubungan Indonesia dan Tailan telah terjalin jauh sebelum lahirnya ASEAN maupun terbentuknya negara modern saat ini. Selama berabad-abad, kedua bangsa telah terhubung melalui jalur perdagangan maritim, pertukaran budaya, serta hubungan antar-kerajaan di kawasan Asia Tenggara.

“Sejarah menunjukkan bahwa persahabatan Indonesia dan Tailan telah berlangsung selama berabad-abad. Kita saling bertukar barang, gagasan, dan tradisi. Bahkan hingga kini berbagai peninggalan sejarah menjadi pengingat bahwa perjalanan kedua bangsa selalu saling berkaitan,” kata Anin.

Anin juga menyoroti kunjungan Perdana Menteri Kerajaan Tailan ke Indonesia yang merupakan kunjungan pertama dalam 15 tahun terakhir. Menurut Anin, momentum tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan strategis kedua negara.

Sebagai dua ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia dan Tailan, Lanjut Anin, memiliki potensi yang sangat besar. Dengan populasi gabungan sekitar 357 juta jiwa dan nilai ekonomi mendekati 2 triliun dolar AS, kedua negara dinilai memiliki peluang untuk memperluas kerja sama perdagangan maupun investasi.

“Saat ini nilai perdagangan bilateral telah mencapai sekitar 17,5 miliar dolar AS. Kami optimistis target peningkatan menjadi 30 miliar dolar AS pada 2030 dapat diwujudkan, seiring dengan semakin eratnya hubungan investasi dan hubungan antar-masyarakat kedua negara,” ujar Anin.

Anin menegaskan Indonesia dan Tailan juga memiliki komitmen yang sama dalam memperkuat multilateralisme serta menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan. Sebagai negara pendiri ASEAN, kedua negara memiliki peran strategis dalam mendorong integrasi ekonomi regional.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Ketua Dewan Perdagangan Tailan (Board of Trade of Thailand) Poj Aramwattananont usai menandatangani MoU mengenai kerja sama pasar karbon (Carbon Market Cooperation) di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).

Anin menyampaikan dukungan Kadin Indonesia terhadap kepemimpinan Tailan sebagai Ketua ASEAN pada 2028 melalui kolaborasi dengan ASEAN Business Advisory Council maupun APEC Business Advisory Council.

Lebih lanjut, Anin turut mengapresiasi peluncuran Strategic Partnership Plan 2026–2030 oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kerajaan Tailan H.E. Anutin Charnvirakul sebagai arah baru hubungan bilateral kedua negara.

Anin menambahkan forum bisnis kali ini memfokuskan kerja sama pada sektor ekonomi halal, jasa, hilirisasi, serta manufaktur yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing kedua negara. Anin meyakini Indonesia dan Tailan memiliki peluang menjadi pemimpin dunia di sejumlah sektor strategis apabila mampu menggabungkan inovasi dengan skala ekonomi yang dimiliki kedua negara.

“Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia dan Tailan mampu bersaing, tetapi apakah kita bisa menjadi yang terbaik di dunia pada bidang tertentu. Saya percaya jawabannya adalah bisa, jika kita mengedepankan inovasi dalam skala besar,” kata Anin.

Anin juga menyebut sektor pangan sebagai bidang yang paling potensial untuk dikembangkan bersama. Tailan, menurut Anin, telah dikenal dunia sebagai negara dengan keunggulan pertanian melalui produk seperti beras melati dan buah-buahan tropis, sementara Indonesia memiliki sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta kapasitas produksi dalam skala besar.

“Ketika skala Indonesia dipadukan dengan keunggulan Tailan, kita dapat menghadirkan solusi pangan bagi dunia. Mari membangun bukan hanya untuk kepentingan kedua negara, tetapi juga untuk masyarakat global,” ujar Anin.

Anin mengajak dunia usaha kedua negara untuk terus meningkatkan perdagangan, investasi, kolaborasi antar-pengusaha, serta mendorong inovasi bersama demi menciptakan kemakmuran yang lebih inklusif.

“Sejarah telah mempertemukan kita, dunia usaha memperkuat hubungan itu, dan inovasi akan menentukan masa depan kita. Indonesia membawa skala, Tailan membawa keunggulan. Bersama-sama, kita dapat menciptakan kemakmuran yang lebih besar, bukan hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi dunia,” terang Anin.

Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Kerajaan Tailan H.E. Anutin Charnvirakul menyambut baik semakin eratnya hubungan bisnis antara Indonesia dan Thailand. Menurutnya, kedua negara masih memiliki ruang yang sangat besar untuk meningkatkan investasi, perdagangan, dan berbagai bentuk kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sektor swasta di negara ini. Izinkan saya menegaskan bahwa Pemerintah Tailan akan sepenuh hati mendukung seluruh komitmen dan upaya para mitra kami dari Indonesia untuk memperkuat hubungan perdagangan dan bisnis ke tingkat yang lebih erat dan lebih kuat,” ujarnya.



Foto bersama jajaran delegasi Indonesia dan delegasi Tailan di sela-sela acara Indonesia-Thailand Business Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo, mengajak dunia usaha Indonesia dan Tailan memperkuat kolaborasi ekonomi untuk menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian geopolitik, kenaikan harga energi, hingga perubahan iklim.

Hashim optimistis hubungan ekonomi kedua negara akan terus berkembang dengan peningkatan nilai perdagangan menuju target bersama pada 2030.

"Kami akan terus mendukung seluruh upaya untuk memperkuat kerja sama Indonesia dan Tailan. Dunia usaha Indonesia siap mendukung peningkatan hubungan ekonomi kedua negara," kata Hashim.

Menurut Hashim, Indonesia dan Tailan menghadapi tantangan yang sama akibat meningkatnya ketidakpastian global. Salah satu dampaknya adalah kenaikan harga energi yang memicu meningkatnya harga berbagai komoditas pokok di kedua negara.

"Kita berbagi nasib yang sama. Karena itu, ada dorongan yang lebih besar bagi kita untuk berkolaborasi sehingga mampu membentengi diri dari berbagai guncangan eksternal," kata Hashim.

Lebih lanjut Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengatakan bahwa peningkatan perdagangan dengan Thailand akan difokuskan pada kenaikan volume ekspor komoditas yang selama ini sudah berjalan, serta perluasan jenis produk yang diperdagangkan.

"Jadi kan kita memang banyak ekspor kita ke sana (Tailan). Mungkin (peningkatan) dari sisi volume yang sudah ada. Dari sisi volume akan kita tingkatkan terus" ucap Budi.

Budi menyatakan, selain meningkatkan volume, Kementerian Perdagangan RI juga akan mendorong diversifikasi produk ekspor. Kemudian, skema dagang RI dengan Tailan disebut bersifat saling melengkapi. Dengan demikian, skema tersebut diyakini berpotensi mempermudah peningkatan transaksi dagang kedua negara.

"Yang kedua, kita tentu akan diversifikasi produk kita, tetapi kita dengan Tailan ini saling melengkapi. Jadi, produknya tidak sama. Saling melengkapi itu lebih mudah karena biasanya kalau saling melengkapi berarti saling membutuhkan," pungkas Budi.

Lebih jauh, Ketua Dewan Perdagangan Tailan (Board of Trade of Thailand) Poj Aramwattananont mengatakan kerja sama yang lebih erat antara Kadin Indonesia dengan Kamar Dagang Tailan akan menjadi fondasi penting dalam mendorong peningkatan investasi, membuka peluang bisnis baru, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan ASEAN.

"Seiring dengan terus berkembangnya rantai pasok global, Tailan dan Indonesia memiliki peluang yang unik untuk membangun rantai nilai regional yang lebih kuat dengan menghubungkan keunggulan yang saling melengkapi. Melalui kerja sama yang lebih erat antara Kadin Indonesia dan Kamar Dagang Tailan, kita dapat mengubah kemitraan menjadi investasi, peluang bisnis, dan pertumbuhan berkelanjutan bagi ASEAN," ujar Poj Aramwattananont.

Dalam forum ini juga dilakukan pertukaran dua Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Kerajaan Tailan H.E. Anutin Charnvirakul.

MoU pertama antara Kadin Indonesia dan Board of Trade of Thailand mengenai kerja sama pasar karbon (Carbon Market Cooperation). Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari MoU tentang Kerja Sama di Bidang Perdagangan dan Investasi yang ditandatangani kedua kamar dagang di Bangkok pada 19 Mei 2025. Kesepakatan sebelumnya menjadi kerangka kerja untuk mendorong perdagangan dan investasi, pertukaran informasi bisnis, dukungan terhadap partisipasi dalam pameran dagang dan konferensi, serta fasilitasi misi bisnis kedua negara.

Melalui MoU terbaru ini, ruang lingkup kerja sama diperluas ke sektor pasar karbon, termasuk dialog kebijakan dan regulasi, pengembangan standar serta sistem pengukuran, identifikasi proyek karbon yang layak investasi, business matching, mobilisasi investasi, hingga peningkatan interoperabilitas pasar karbon di kawasan ASEAN.

MoU kedua antara Kadin Indonesia dan TCCI mengenai pembentukan Thailand Business Ecosystem-Indonesia (TBES-Indonesia). Kerangka kerja ini dirancang untuk menghubungkan pelaku usaha, instansi pemerintah, lembaga keuangan, asosiasi industri, kalangan akademisi, penyedia jasa profesional, serta investor dalam mendukung kerja sama di bidang perdagangan dan investasi, ekonomi halal, keberlanjutan dan inovasi, serta pengembangan sumber daya manusia.

Hadir dalam acara tersebut jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Luar Negeri, James T. Riady, WKUK Bidang Pangan Mulyadi Jayabaya, WKU Bidang Hubungan Luar Negeri Bernadino M. Vega, WKU Bidang Peternakan Cecep Mohammad Wahyudin, WKU Bidang Pertanian Devi Erna Rachmawati, WKU Bidang Kerja Sama Pengembangan Profesi SDM Teknik dan Industri Insannul Kamil dan Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Titi Khoiriah.



Ketua Umum Kadin Indonesia bersama Perdana Menteri Kerajaan Tailan H.E. Anutin Charnvirakul saat menyampaikan keterangan pers di sela-sela acara Indonesia-Thailand Business Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).

Kadin Dorong Penguatan Ekonomi Indonesia sebagai Makna Kemerdekaan Generasi Saat Ini



(Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James T. Riady (kiri) dan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie (dua dari kanan) berfoto bersama tim pengibar bendera di sela-sela rangkaian acara Economic Diplomatic Breakfast yang digelar dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (14/08/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kembali menggelar Kadin Indonesia Economic Diplomatic Breakfast dengan tema “The Next Independence: Building Indonesia’s Economic Strength in a Changing World” dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (14/08/2026).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, pemilihan Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai lokasi kegiatan menjadi bagian dari upaya Kadin untuk memaknai momentum kemerdekaan sekaligus mengedukasi publik dan korps diplomatik mengenai pentingnya memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia.

“Kali ini kita adakan di musim proklamasi untuk menjunjung suatu perjuangan yang kita apresiasi sebagai insan Indonesia dan juga merupakan rentetan daripada acara 17 Agustusan,” ujar Anindya atau Anin sapaan akrabnya.

Menurut Anin, diplomasi ekonomi memiliki peran penting dalam mendorong perdagangan, investasi, hingga industrialisasi yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ini adalah bentuk hormat kita kepada Merah Putih dan upaya kita untuk menguatkan diplomasi ekonomi sebaik mungkin,” kata Anin.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady mengatakan, makna kemerdekaan bagi Indonesia saat ini tidak lagi sebatas kemerdekaan politik yang telah dicapai pada 1945. Menurutnya, setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan makna baru terhadap kemerdekaan.

“Kemerdekaan bukan sekadar kata-kata, melainkan harus menjadi kenyataan. Setiap generasi harus kembali membangun dan memaknai kemerdekaan tersebut,” ujar James.

Ia menilai, bagi generasi saat ini, kemerdekaan harus diwujudkan melalui penguatan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, sumber daya manusia yang kuat, serta kemampuan teknologi.

Indonesia, lanjutnya, tidak cukup hanya menjadi konsumen teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), tetapi harus mampu berpartisipasi dalam pengembangan teknologi tersebut, termasuk di sektor hulu AI dan robotika. Selain itu, Indonesia perlu membangun industri yang kompetitif, menciptakan lapangan kerja produktif, serta memperkuat institusi yang mampu memberikan keyakinan kepada masyarakat terhadap masa depan.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Ketua Dewan Perdagangan Tailan (Board of Trade of Thailand) Poj Aramwattananont usai menandatangani MoU mengenai kerja sama pasar karbon (Carbon Market Cooperation) di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).

James menegaskan, penguatan kemandirian ekonomi tidak berarti Indonesia harus menutup diri dari dunia internasional. Sebaliknya, Indonesia harus kuat di dalam negeri sekaligus tetap terbuka dan percaya diri untuk bekerja sama dengan berbagai negara.

"Justru sebaliknya. Indonesia yang percaya diri harus kuat di dalam negeri, terbuka terhadap dunia, dan cukup percaya diri untuk bekerja sama dengan semua pihak," ujar James.

James juga menegaskan pentingnya peran Kadin dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah dapat menetapkan arah dan kebijakan, tetapi kekuatan ekonomi pada akhirnya dibangun oleh para pelaku usaha, pekerja, petani, pendidik, inovator, serta masyarakat di berbagai daerah.

"Indonesia tidak akan dibangun hanya dari Jakarta. Indonesia harus dibangun dari seluruh provinsi, kota, kabupaten, dan komunitas di seluruh Nusantara," katanya.

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, James mengajak seluruh pihak untuk memikirkan Indonesia seperti apa yang ingin dibangun dalam 20 hingga 30 tahun mendatang.

"Kemerdekaan berikutnya harus memberikan kemampuan kepada setiap orang untuk belajar, bekerja secara produktif, membangun usaha, berpartisipasi dalam teknologi, memiliki rumah, dan hidup dengan bermartabat," katanya.

la menambahkan, 81 tahun lalu, bangsa Indonesia memutuskan untuk menentukan nasibnya sendiri. Kini, tanggung jawab generasi saat ini adalah memastikan kemerdekaan tersebut terus memiliki substansi dan kekuatan.

"Kuat di dalam negeri, terbuka terhadap dunia, dan cukup percaya diri untuk bekerja sama dengan semua pihak," tutup James.

Hadir dalam acara tersebut jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Azis Syamsuddin, WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Juan Permata Adoe, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, WKU Bidang Keanggotaan Widiyanto Saputra, WKU Wilayah Kalimantan Andi Yuslim Patawari, WKU Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjourang, WKU Bidang Perindustrian Saleh Husin, WKU Bidang Perencanaan Nasional Bayu Priawan Djokosoetono, WKU Bidang Hubungan Luar Negeri Bernardino M. Vega, WKU Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Pahala Mansury, WKU Bidang Diplomasi Multilateral Andi Anzhar Cakra Wijaya, WKU Bidang Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Pembangunan Pedesaan serta Transmigrasi Thomas Djusman, WKU Bidang Kerja Sama Investasi dengan Pemerintah Daerah Zulhanar Usman dan WKU Bidang Pembinaan dan Koordinasi Eksportir Frits Novianto Suhendar.

Hadir pula jajaran Ketua Umum (Ketum) Kadin Provinsi di antaranya Ketum Kadin Sumatra Barat Buchari Bachter, Ketum Kadin Provinsi Sumatra Utara Faisal Ferial (Dida) Mutyara dan Ketum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat, Faurani.



Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia, Bernardino M. Vega (dua dari kanan) dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James T. Riady bersama dengan para Duta Besar negara sahabat menghadiri acara Economic Diplomatic Breakfast, di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (14/08/2026).

Hashim: Tailan Mitra Strategis Hadapi Ketidakpastian Dunia

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo saat menyampaikan sambutannya dalam Indonesia-Thailand Business Forum yang bertajuk "Advancing the Indonesia-Thailand Strategic Partnership: Building Integrated Value Chains in Industry, Services, and the Halal Economy" di Jakarta, Selasa (4/8/2026).



Jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan Indonesia merupakan salah satu negara paling aman bagi investasi global karena konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, menjaga netralitas, serta menghormati seluruh komitmen kepada para investor.

Pesan tersebut disampaikan Hashim dalam Indonesia-Thailand Business Forum bertajuk Advancing the Indonesia-Thailand Strategic Partnership: Building Integrated Value Chains in Industry, Services, and the Halal Economy, Selasa (4/8/2026), yang digelar dalam rangka kunjungan resmi Perdana Menteri Kerajaan Tailan H.E. Anutin Charnvirakul ke Indonesia.

"Indonesia menerima investasi dari seluruh dunia. Kami menerima investor dari Amerika Serikat, China (Tiongkok), Jepang, Eropa, Australia, Rusia, dan berbagai negara lainnya. Investasi di Indonesia aman, dan pemerintah akan selalu menghormati komitmennya kepada seluruh investor," kata Hashim.

Menurut dia, kepastian investasi tersebut menjadi salah satu keunggulan Indonesia di tengah meningkatnya fragmentasi geopolitik dunia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia tetap mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak berpihak kepada blok kekuatan mana pun.

"Indonesia tidak memiliki musuh. Itulah sebabnya kami dapat bekerja sama dengan semua negara dan memberikan rasa aman kepada seluruh investor," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Hashim mengajak dunia usaha Tailan memperbesar investasi di Indonesia seiring semakin eratnya hubungan ekonomi kedua negara. Ia mengingatkan bahwa Indonesia dan Tailan telah memiliki hubungan yang sangat panjang, bahkan jauh sebelum terbentuknya ASEAN. Kedua negara juga pernah mengalami ujian yang sama ketika krisis finansial Asia 1997 menghantam kawasan.

"Saya masih ingat bagaimana krisis Asia 1997 hampir menghancurkan banyak perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan yang saya kenal. Namun, perusahaan-perusahaan Tailan mampu bangkit dan bertahan. Itu menunjukkan ketangguhan ekonomi kedua negara," katanya.

Hashim juga menggambarkan eratnya keterhubungan rantai pasok Indonesia dan Tailan melalui pengalaman pribadinya ketika harus menunggu hampir satu tahun pengiriman mobil Toyota Alphard akibat banjir besar yang melanda Tailan.

Peristiwa tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa gangguan yang terjadi di satu negara akan langsung memengaruhi negara lainnya karena kedua ekonomi telah saling terintegrasi.

"Kita benar-benar saling terhubung. Apa yang terjadi di Thailand akan berdampak pada Indonesia, begitu pula sebaliknya," ujarnya.

Ia menambahkan, ketergantungan tersebut kini semakin terlihat akibat meningkatnya ketidakpastian global, termasuk gangguan terhadap jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz yang memicu lonjakan harga energi dan komoditas.

Karena itu, Indonesia dan Tailan perlu memperkuat kolaborasi agar mampu mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal sekaligus membangun ketahanan ekonomi kawasan.

"Kita menghadapi tantangan yang sama. Karena itu, ada alasan yang jauh lebih kuat bagi Indonesia dan Tailan untuk bekerja sama dan mengurangi ketergantungan terhadap faktor-faktor di luar kendali kita," kata Hashim.

Sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim juga memperkenalkan salah satu terobosan pemerintah Indonesia dalam agenda transisi energi, yakni pengembangan pasar karbon nasional yang resmi beroperasi pada 9 Juli 2026. Menurutnya, pasar karbon Indonesia membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan internasional, termasuk dari Tailan, untuk memperoleh kredit karbon sekaligus berinvestasi pada proyek-proyek rendah emisi di Indonesia.

"Perusahaan yang ingin mengimbangi emisi karbonnya kini dapat memanfaatkan pasar karbon Indonesia. Ini merupakan peluang baru bagi perusahaan-perusahaan Tailan untuk berinvestasi sekaligus mendukung agenda dekarbonisasi global," ujarnya.

Hashim menegaskan Indonesia juga berkomitmen memenuhi target-target perubahan iklim internasional dan akan terus memainkan peran aktif dalam agenda global, termasuk menjelang penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31).

Di akhir sambutannya, Hashim menyampaikan optimisme bahwa target peningkatan perdagangan Indonesia-Tailan akan tercapai lebih cepat melalui dukungan kuat dunia usaha kedua negara.

"Saya yakin hubungan ekonomi Indonesia dan Tailan akan terus berkembang. Komunitas bisnis Indonesia siap mendukung peningkatan perdagangan, investasi, dan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua negara," pungkasnya.



(Dari Kanan) Ketua Dewan Perdagangan Tailan (Board of Trade of Thailand) Poj Aramwattananont bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie di sela-sela acara acara Indonesia-Thailand Business Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).

Anindya Bakrie: Indonesia dan Tailan Harus Jadi Pemimpin Pangan dan Ekonomi Masa Depan



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat menyampaikan sambutannya dalam Indonesia-Thailand Business Forum yang bertajuk "Advancing the Indonesia-Thailand Strategic Partnership: Building Integrated Value Chains in Industry, Services, and the Halal Economy" di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengajak Indonesia dan Tailan melampaui hubungan dagang tradisional dan membangun kemitraan strategis yang mampu melahirkan pemimpin global baru di sektor pangan, ekonomi halal, energi bersih, manufaktur, hingga ekonomi digital. Dua negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN itu memiliki modal yang saling melengkapi untuk menciptakan rantai nilai regional yang lebih kuat sekaligus meningkatkan daya saing kawasan di tengah perubahan ekonomi dunia yang berlangsung sangat cepat.

"Kita tidak hanya ingin menjadi kompetitif atau sukses. Indonesia dan Tailan harus menjadi pemain kelas dunia. Kuncinya adalah inovasi yang inklusif, yang mampu menciptakan manfaat bagi masyarakat luas," ujar Anindya atau Anin sapaan akrabnya saat membuka Indonesia-Thailand Business Forum bertajuk Advancing the Indonesia-Thailand Strategic Partnership: Building Integrated Value Chains in Industry, Services, and the Halal Economy di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Anin mengatakan hubungan Indonesia dan Tailan sesungguhnya telah terjalin jauh sebelum lahirnya ASEAN maupun berdirinya negara modern kedua bangsa. Selama berabad-abad, masyarakat kedua negara telah terhubung melalui perdagangan, budaya, tradisi, serta peradaban Asia Tenggara yang saling memengaruhi.

"Sejarah menghubungkan kita. Kini, bisnis harus memperkuat hubungan itu, dan inovasi akan menentukan masa depan kita bersama," katanya.

Saat ini Indonesia dan Tailan merupakan dua ekonomi terbesar di ASEAN dengan total populasi sekitar 357 juta jiwa dan nilai output ekonomi mendekati 2 triliun dolar AS. Nilai perdagangan bilateral telah mencapai sekitar 17,5 miliar dolar AS, sementara kedua pemimpin negara menargetkan peningkatannya menjadi 30 miliar dolar AS pada 2030, disertai kenaikan investasi dua arah.

Anin menegaskan dunia usaha siap mendukung target tersebut melalui peningkatan investasi, kolaborasi industri, dan pengembangan rantai pasok yang lebih terintegrasi.

Dalam kesempatan itu, Kadin Indonesia dan Board of Trade of Thailand menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerja sama bisnis kedua negara. Selain itu, juga ditandatangani MoU pengembangan pasar karbon yang bertujuan mempercepat mobilisasi investasi pada proyek-proyek rendah emisi dan mendukung terbentuknya pasar karbon yang kredibel di kawasan.

Menurut Anin, keberadaan pasar karbon akan menjadi semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan energi akibat pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), pusat data, dan industrialisasi global.

"Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia membutuhkan mekanisme yang kredibel untuk mengimbangi emisi karbon mereka. Pasar karbon menjadi salah satu peluang investasi masa depan yang sangat besar," ujarnya.

Selain pasar karbon, Kadin juga mendorong kerja sama yang lebih erat di sektor ekonomi halal, jasa, hilirisasi industri, manufaktur berteknologi tinggi, energi bersih, serta konektivitas digital. Namun demikian, Anin menilai sektor yang paling berpotensi menjadikan Indonesia dan Tailan sebagai pemimpin dunia adalah ketahanan pangan.

Tailan, katanya, telah diakui dunia sebagai salah satu kekuatan utama pertanian global dengan berbagai produk unggulan, mulai dari beras jasmine hingga buah-buahan tropis. Di sisi lain, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, keanekaragaman hayati yang sangat besar, serta skala pasar domestik yang luar biasa.

“Tailan memiliki pengalaman, inovasi, dan kepemimpinan global di bidang pertanian. Indonesia memiliki sumber daya, biodiversitas, dan skala yang besar. Jika kekuatan ini digabungkan, kita dapat menciptakan solusi pangan yang bermanfaat bukan hanya bagi ASEAN, tetapi juga bagi dunia,” katanya.

Anin menilai perubahan geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta meningkatnya tantangan ketahanan pangan dan energi menuntut kedua negara memperkuat kolaborasi strategis. Karena itu, ia mengajak dunia usaha kedua negara meningkatkan investasi bersama, memperbanyak kemitraan antarpengusaha, memperluas kolaborasi keluarga bisnis, serta mempercepat inovasi bersama agar Indonesia dan Thailand mampu menjadi motor pertumbuhan baru kawasan.

“Sejarah telah menghubungkan kita. Bisnis akan memperkuat kita. Inovasi akan menentukan masa depan kita. Indonesia membawa skala, Thailand membawa keunggulan. Bersama-sama kita dapat memberikan manfaat yang lebih besar, bukan hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi dunia,” pungkash Anin.



Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo (kiri) bersama Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memberikan cinderamata kepada Perdana Menteri Kerajaan Tailan H.E. Anutin Charnvirakul dalam acara Indonesia-Thailand Business Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).

James Riady: Indonesia & Tailan Harus Beralih dari Tetangga Baik Menjadi Mitra Hebat ASEAN



Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James Riady menyampaikan sambutannya dalam Indonesia-Thailand Business Forum bertajuk "Advancing the Indonesia-Thailand Strategic Partnership: Building Integrated Value Chains in Industry, Services, and the Halal Economy", yang digelar di Ballroom Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Jakarta - Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia James Riady, mengajak Indonesia dan Thailand memasuki babak baru hubungan ekonomi ASEAN melalui investasi, inovasi, dan integrasi rantai nilai industri. Menurutnya, kedua negara tidak cukup hanya menjadi good neighbours, tetapi harus berkembang menjadi great partners yang bersama-sama membentuk masa depan ASEAN.

Ajakan tersebut disampaikan James dalam Indonesia-Thailand Business Forum bertajuk "Advancing the Indonesia-Thailand Strategic Partnership: Building Integrated Value Chains in Industry, Services, and the Halal Economy", yang digelar Kadin Indonesia bekerja sama dengan Thai Chamber of Commerce di Ballroom Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Forum bisnis itu merupakan bagian dari kunjungan resmi Perdana Menteri Kerajaan Tailan Anutin Charnvirakul ke Indonesia sekaligus menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha kedua negara guna memperkuat perdagangan, investasi, serta kemitraan bisnis sebagai implementasi Kemitraan Strategis Indonesia-Tailan.

Dalam pidatonya yang bertajuk "The Next Chapter of ASEAN: From Good Neighbours to Great Partners", James mengatakan hubungan hangat yang diperlihatkan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul pada pertemuan kenegaraan sehari sebelumnya merupakan modal strategis yang jauh melampaui diplomasi formal.

"Semalam kita menyaksikan sesuatu yang mungkin lebih penting daripada jamuan kenegaraan itu sendiri. Kita melihat dua pemimpin yang tidak sekadar menjalankan diplomasi, tetapi menikmati kebersamaan, berbincang hangat, tertawa bersama, berbagi musik, dan menjalin persahabatan. Di Asia, hubungan personal sering kali mendahului transaksi bisnis. Kepercayaan lahir sebelum investasi. Persahabatan menjadi fondasi kemitraan. Ketika para pemimpin saling percaya dan menikmati bekerja bersama, dunia usaha akan jauh lebih mudah membangun kerja sama," ujar James.

Menurut dia, momentum hubungan politik yang semakin erat harus segera diterjemahkan menjadi kolaborasi konkret di bidang perdagangan, investasi, manufaktur, jasa, hingga pengembangan industri halal.

James menilai Indonesia dan Tailan memiliki keunggulan yang saling melengkapi, bukan saling bersaing. Tailan telah membangun daya saing global di sektor pertanian modern, industri pengolahan pangan, pariwisata, otomotif, logistik, hingga ekonomi digital. Sementara Indonesia menawarkan pasar domestik sekitar 285 juta penduduk, kekayaan sumber daya alam, program hilirisasi industri yang berkembang pesat, serta bonus demografi yang menjadi modal pertumbuhan jangka panjang.

"Kekuatan kedua negara justru bersifat komplementer. Karena itu, forum bisnis ini hadir pada waktu yang sangat tepat untuk membuka babak baru kerja sama ekonomi ASEAN," katanya.



Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James Riady (tiga dari kiri) bersama President of Thai Chamber of Commerce Indonesia (TCCI) Pathama Sirikul (tiga dari kanan) usai penandatanganan MoU mengenai pembentukan Thailand Business Ecosystem-Indonesia (TBES-Indonesia), disaksikan langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo, Perdana Menteri Kerajaan Tailan H.E. Anutin Charnvirakul, serta Ketua Dewan Perdagangan Tailan (Board of Trade of Thailand) Poj Aramwattananont dalam acara Indonesia-Thailand Business Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).

James juga mengajak para pelaku usaha Tailan untuk melihat Indonesia bukan sekadar pasar tujuan ekspor, melainkan sebagai basis produksi dan inovasi regional.

“Saya mengajak sahabat-sahabat dari Tailan untuk tidak hanya mengekspor produknya ke Indonesia. Datanglah membangun industri bersama kami, memproduksi bersama kami, berinovasi bersama kami, dan berinvestasi bersama kami. Indonesia kini tidak lagi hanya menjadi tujuan penjualan produk, tetapi sedang berkembang menjadi pusat produksi, inovasi, dan ekspansi bisnis kawasan,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa selama lebih dari lima dekade perusahaan-perusahaan Jepang berhasil mentransformasi ekonomi ASEAN melalui strategi lokalisasi manufaktur. Kini, menurut James, perusahaan-perusahaan Thailand memiliki peluang besar untuk ikut menulis babak baru pembangunan ekonomi kawasan dengan memperluas investasi di Indonesia.

Apresiasi Bangkok Bank

Dalam kesempatan itu James juga memberikan apresiasi kepada Bangkok Bank yang dinilainya telah berkontribusi besar terhadap perkembangan dunia usaha di Asia Tenggara. Selama lebih dari empat dekade mengenal keluarga Sophonpanich, ia menyaksikan bagaimana Bangkok Bank tidak sekadar menyediakan pembiayaan, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang kepada para pelaku usaha.

“Banyak kelompok usaha Indonesia bertumbuh bersama dukungan Bangkok Bank. Kemitraan jangka panjang seperti inilah yang layak diapresiasi karena menjadi fondasi pembangunan ekonomi kawasan,” katanya.

James menambahkan bahwa masa depan kerja sama ASEAN tidak hanya dibangun melalui hubungan antar-pemerintah (government-to-government) maupun antarperusahaan (company-to-company), tetapi juga melalui kolaborasi antar-keluarga pengusaha (family-to-family). Menurutnya, perusahaan keluarga masih menjadi tulang punggung perekonomian Asia sehingga sinergi lintas negara di antara keluarga-keluarga bisnis akan memperkuat arus investasi dan mempercepat integrasi ekonomi kawasan.

Ia juga menyambut baik langkah Kasikorn Bank Indonesia yang dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat konektivitas sektor keuangan Indonesia dan Thailand. “Lembaga keuangan tidak hanya memindahkan modal. Mereka membangun kepercayaan. Dan kepercayaan adalah fondasi utama bagi tumbuhnya investasi,” ujarnya.

Menutup pidatonya, James menegaskan bahwa apabila abad ke-21 benar-benar menjadi Pacific Century, maka ASEAN berada di pusat pertumbuhan dunia. Sebagai dua ekonomi terbesar dan paling dinamis di Asia Tenggara, Indonesia dan Thailand memiliki tanggung jawab untuk tidak sekadar mengikuti perubahan global, melainkan ikut membentuk arah perubahan tersebut.

“Masa depan ASEAN tidak akan dibangun melalui persaingan di antara negara-negara anggotanya. Masa depan kawasan akan lahir dari integrasi yang lebih dalam, investasi bersama, inovasi bersama, dan kepercayaan jangka panjang. Forum hari ini menjadi langkah penting menuju masa depan ASEAN yang lebih kuat dan lebih terintegrasi,” pungkask James.

Ketum Kadin Temui Seskab, Bahas Pengembangan Industri Listrik hingga Perkenalkan Buku “We Buy From Indonesia”



Anindya Novyan Bakrie memberikan buku We Buy From Indonesia kepada Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya saat melakukan audiensi di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Senin, (27/07/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie melakukan audiensi dengan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Senin, (27/07/2026).

Dilansir dari instagram resmi @sekretariat.kabinet, dalam pertemuan tersebut keduanya membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pembahasan mencakup penguatan peran pengusaha daerah sebagai motor penggerak ekonomi nasional, pengembangan industri listrik, garmen, dan tekstil, serta dukungan terhadap agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Selain itu, dibahas pula kesiapan ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong lahirnya motor listrik nasional. Pertemuan juga menyoroti penguatan industri kendaraan listrik pasca-peresmian pabrik bus dan mobil listrik PT VKTR Sakti Industries di Magelang oleh Presiden, beberapa waktu lalu.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam kesempatan tersebut juga memperkenalkan buku ‘We Buy from Indonesia’.

We Buy From Indonesia adalah sebuah buku yang menggambarkan bahwa Indonesia memiliki peran penting pada rantai pasok dunia. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.



Anindya Novyan Bakrie dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya usai audiensi di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Senin, (27/07/2026).

"Di dalam buku ini penuh data dan bukti bahwa perusahaan Indonesia telah mendunia dan dibutuhkan brand-brand besar dunia. Ada 80 perusahaan atau brand kelas dunia yang komponennya membeli dari Indonesia. Ada Tesla, IKEA, Uniqlo, sampai Boeing. Indonesia terlibat dari membuat part sampai membuat utuh lalu diekspor," ujar Anindya atau Anin sapaan akrabnya dilansir dari Instagram @anindyabakrie.

Anin menjelaskan, buku tersebut telah diperlihatkan kepada Presiden Prabowo saat kunjungannya ke Prancis. Presiden Prabowo kemudian menyerahkan buku itu kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menurut Anin, Presiden Macron memberikan apresiasi terhadap buku tersebut dan meminta agar disiapkan edisi khusus yang memuat berbagai brand asal Prancis.

"Terhadap buku ini, Pak Seskab memberikan apresiasi dan masukannya. Kami juga berdiskusi singkat baik soal buku ini maupun topik lainnya," kata Anin.

Buku "We Buy From Indonesia" Tampilkan Rantai Pasok Global Berbasis Produk RI



Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta masukan sekaligus dukungan pemerintah terhadap peluncuran buku "We Buy From Indonesia", yang diharapkan menjadi instrumen pemasaran sekaligus sumber inspirasi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan perdagangan Indonesia di pasar global.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan, buku "We Buy From Indonesia" merupakan kontribusi Kadin Indonesia dalam memperkuat promosi produk nasional dengan menampilkan berbagai komponen dan produk buatan Indonesia yang telah menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan-perusahaan global.

"Buku ini adalah alat marketing dan memberikan inspirasi untuk berdagang atau meningkatkan trade," kata Anin, sapaan akrab Anindya.

Anin berharap, publik, khususnya generasi muda, semakin terdorong untuk menekuni sektor perdagangan karena perdagangan yang tumbuh akan menarik investasi dan pada akhirnya mempercepat industrialisasi nasional.

Lebih lanjut, Anin menambahkan, sebagian besar komponen yang ditampilkan dalam buku We Buy From Indonesia telah melalui proses produksi di Indonesia sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

"Karena kalau perdagangannya maju, pasti orang mau berinvestasi. Kalau berinvestasi, industrialisasi terjadi," kata Anin.

Menurut Anin, buku "We Buy From Indonesia" bertujuan memperkuat promosi ekspor Indonesia agar semakin banyak perusahaan dunia membeli produk dan komponen buatan Indonesia.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie (tiga dari kanan), Sekretaris I Kadin Indonesia Institute sekaligus Asisten Khusus Presiden Republik Indonesia Dirgayuza Setiawan (dua dari kanan), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto (tiga dari kiri) berfoto bersama tim penyusun buku We Buy From Indonesia usai audiensi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, pada Jum'at (24/7/2026).



(Dari kiri) Sekretaris I Kadin Indonesia Institute Dirgayuza Setiawan, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri saat audiensi di Kantor Kementerian Perdagangan RI, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026).

Dijelaskan Anin, nilai ekspor Indonesia saat ini mencapai sekitar 300 miliar dolar AS, dengan sekitar 240 miliar dolar AS berasal dari berbagai sektor manufaktur dan industri yang banyak melibatkan anggota Kadin Indonesia.

“Dan di sini juga kami bekerja sama dengan Harvard University, profesornya, untuk melihat angka-angka tadi. Supaya angka-angka tadi itu benar-benar melambangkan bukan saja bisnis-bisnis besar, atau produk-produk yang sudah diketahui,” ujar Anin.

Rencananya, buku “We Buy From Indonesia” akan diluncurkan pada 8 Agustus 2026 dan dipasarkan melalui jaringan toko buku Peripus maupun Gramedia. Ke depan, buku tersebut juga direncanakan hadir dalam berbagai edisi bahasa sesuai negara mitra, seperti China Edition maupun French Edition, guna mendukung diplomasi ekonomi Indonesia.

Buku ini, kata Anin, diharapkan menjadi referensi praktis ketika Indonesia menjalin kerja sama perdagangan internasional, seperti Free Trade Agreement (FTA) maupun Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), sehingga manfaat kerja sama tersebut dapat lebih dirasakan oleh pelaku usaha di dalam negeri.

Anin juga mencontohkan sejumlah produk yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat memiliki keterkaitan dengan Indonesia, seperti sepatu On Cloud yang diproduksi di Majalengka, komponen pesawat Boeing yang diproduksi oleh industri Dirgantara Indonesia, hingga berbagai produk furnitur IKEA dan kendaraan yang digunakan di Filipina dengan komponen buatan Indonesia.

“Di sini (buku We Buy From Indonesia) ada contoh 80 pusat-pusat dunia dari Tesla, dari IKEA, dari Uniqlo yang sudah melakukan pembelian di Indonesia untuk komponennya. Hal-hal seperti ini yang ingin ditunjukkan, agar investor semakin optimistis untuk berusaha di Indonesia” kata Anin.

Anin menjelaskan, buku “We Buy From Indonesia” diterbitkan dalam tiga bahasa, yakni Indonesia, Inggris, dan Mandarin, serta memuat informasi mengenai perusahaan pembeli dan produsen Indonesia yang menjadi bagian dari rantai pasok global.

Anin menambahkan, buku tersebut bukan sekadar publikasi, tetapi juga menjadi simbol penguatan promosi perdagangan Indonesia. Kadin juga siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam membina UMKM agar mampu menembus pasar ekspor melalui sinergi dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dan jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menerangkan buku “We Buy From Indonesia” yang menjadi etalase produk dan komponen buatan Indonesia di pasar global.

ICEF-IPFE 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Pengadaan Modern yang Pertemuan Pelaku Usaha dengan 15 Ribu Buyer Pemerintah



Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia sekaligus Ketua Pelaksana ICEF-IPFE 2026 Kukrit Suryo Wicaksono (kanan) dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe (kedua dari kanan), serta Kepala LKPP Sarah Sadiqa (dua dari kiri) saat acara pembukaan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) – Indonesia Procurement Forum Expo (IPFE) 2026 yang digelar di Grand Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara (29/7/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi membuka Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) – Indonesia Procurement Forum Expo (IPFE) 2026 yang mengusung tema “Dari Digitalisasi Menuju Pengadaan Modern: Transformasi Berbasis Data untuk Indonesia Emas” di Grand Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara, pada 29–31 Juli 2026.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe, yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan penyelenggaraan ICEF-IPFE 2026 merupakan kolaborasi strategis antara Kadin Indonesia, LKPP, dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAP) untuk memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam membangun sistem pengadaan nasional yang modern, transparan, dan berdaya saing.

Menurut Juan, forum tersebut menjadi wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, penyedia barang dan jasa, serta seluruh ekosistem pengadaan nasional melalui pameran, temu bisnis (business matching), seminar, talkshow, hingga sertifikasi profesi.

“Di tengah kondisi dunia yang masih menghadapi perlambatan ekonomi, tekanan biaya produksi, ketidakpastian global, serta meningkatnya persaingan, kita membutuhkan mesin pertumbuhan baru yang mampu menggerakkan perekonomian secara cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Salah satu mesin pertumbuhan tersebut adalah belanja pemerintah,” kata Juan.

Juan menegaskan belanja pemerintah tidak hanya dimaknai sebagai penyerapan anggaran, tetapi harus menjadi instrumen strategis yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, menghidupkan UMKM, mendorong inovasi, serta memberikan kepastian pasar bagi dunia usaha.

“Karena itu, pengadaan pemerintah harus bergeser dari sekadar proses administrasi menjadi instrumen strategis pembangunan ekonomi Indonesia,” ujar Juan.

Juan juga menilai pengadaan nasional harus menjadi sarana meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha Indonesia. Menurutnya, perusahaan yang berkembang melalui pasar domestik perlu didorong untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, standarisasi, dan efisiensi agar mampu bersaing di pasar internasional.



Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe saat menyampaikan sambutannya pada pembukaan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) – Indonesia Procurement Forum Expo (IPFE) 2026 yang digelar di Grand Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara (29/7/2026).



Jajaran Pengurus Kadin Indonesia dan LKPP berfoto bersama dalam pembukaan acara Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) – Indonesia Procurement Forum Expo (IPFE) 2026 yang digelar di Grand Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara (29/7/2026).

Dijelaskan Juan, Indonesia memiliki kekuatan besar melalui belanja pemerintah yang mencapai lebih dari Rp3.000 triliun setiap tahun. Sementara itu, kebutuhan investasi infrastruktur menuju Indonesia Emas 2045 diperkirakan melebihi Rp30.000 triliun.

“Potensi ini hanya akan menghasilkan dampak maksimal apabila didukung oleh sistem pengadaan yang cepat, transparan, berbasis data, dan mampu mempertemukan kebutuhan pemerintah dengan kapasitas dunia usaha,” kata Juan.

Karena itu, Kadin Indonesia menyambut baik transformasi yang dilakukan LKPP melalui modernisasi sistem pengadaan dan penguatan katalog elektronik. Langkah tersebut dinilai mampu memberikan kepastian proses, memperluas akses pasar, meningkatkan transparansi, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi produk dalam negeri, UMKM, koperasi, serta pelaku usaha daerah. Meski demikian, Juan mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, mulai dari kesulitan UMKM dan pelaku usaha daerah masuk ke katalog elektronik akibat persoalan sertifikasi, keterbatasan modal kerja, rendahnya literasi digital, hingga belum meratanya kesiapan infrastruktur digital pengadaan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Hal-hal inilah yang perlu kita selesaikan bersama. Bukan hanya dirayakan sebagai capaian, tetapi harus benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah,” ujar Juan.

Juan menambahkan penguatan pasar domestik harus menjadi fondasi bagi pelaku usaha Indonesia untuk memperluas pasar ekspor. Menurutnya, digitalisasi merupakan langkah awal menuju sistem pengadaan modern yang berbasis data sehingga mampu meningkatkan efisiensi belanja negara, memperkuat rantai pasok nasional, menekan biaya logistik, serta menghasilkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, transformasi berbasis data juga harus berjalan seiring dengan penguatan integritas dan tata kelola yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap sistem pengadaan pemerintah.

Juan menilai ICEF-IPFE 2026 bukan sekadar pameran, melainkan marketplace kolaborasi nasional yang mempertemukan pemerintah dengan dunia usaha, investor dengan proyek, serta inovasi dengan kebutuhan pembangunan.

“Di sinilah pemerintah bertemu dengan dunia usaha, di sinilah investor bertemu proyek, di sinilah inovasi bertemu kebutuhan, dan di sinilah kolaborasi business to government maupun business to business dibangun secara nyata,” katanya.

Melalui penyelenggaraan tahun ini yang melibatkan sekitar 15.000 peserta dan 39 penyedia barang dan jasa, Kadin lanjut Juan, berharap lahir lebih banyak kerja sama investasi, business matching, kemitraan rantai pasok, serta peluang usaha baru yang memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Juan juga mendorong agar dalam enam bulan setelah penyelenggaraan ICEF-IPFE 2026 dapat terlihat hasil yang terukur, mulai dari meningkatnya realisasi kerja sama hasil business matching, bertambahnya jumlah UMKM dan koperasi yang berhasil masuk katalog elektronik, hingga tumbuhnya program pendampingan dari Kadin provinsi maupun kabupaten/kota bagi pelaku usaha daerah agar masuk ke rantai pasok pengadaan pemerintah.

Pada kesempatan tersebut, Juan menegaskan tiga komitmen utama Kadin Indonesia dalam mendukung transformasi pengadaan nasional. Pertama, memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah melalui LKPP untuk menciptakan iklim pengadaan yang sehat, kompetitif, dan transparan.



Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia sekaligus Ketua Pelaksana ICEF-IPFE 2026 Kukrit Suryo Wicaksono (kanan), Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe (kiri), serta Kepala LKPP Sarah Sadiqa (tiga dari kiri) berfoto bersama usai acara pembukaan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) – Indonesia Procurement Forum Expo (IPFE) 2026 yang digelar di Grand Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara (29/7/2026).

Kedua, memperluas partisipasi dunia usaha nasional, termasuk UMKM, koperasi, industri daerah, dan perusahaan nasional agar menjadi bagian dari rantai pasok pengadaan pemerintah sekaligus meningkatkan kapasitas dan daya saingnya.

Ketiga, menjadikan pengadaan sebagai instrumen untuk memperkuat investasi, meningkatkan daya saing industri, mendorong kesiapan pelaku usaha menuju pasar global, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami percaya bahwa ketika pemerintah, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, investor, dan asosiasi profesi berjalan bersama, maka pengadaan tidak lagi menjadi biaya pembangunan, melainkan menjadi penggerak pembangunan. Indonesia Emas 2045 dibangun oleh kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, regulator dan pelaku usaha, industri dan UMKM, serta kebijakan yang baik dengan eksekusi yang profesional,” terang Juan.

Sementara itu, Kepala LKPP Sarah Sadiqa menyampaikan, sepanjang tahun 2026 nilai transaksi melalui katalog elektronik mencapai Rp135,4 triliun yang dihasilkan dari lebih dari satu juta transaksi. Transaksi tersebut melibatkan 104 ribu penyedia dan 1,83 juta produk.

“Capaian ini menunjukkan bahwa ekosistem digital pengadaan semakin matang, semakin dipercaya oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan tentunya pelaku usaha,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dalam kerangka transformasi Indonesia, pengadaan juga harus menjadi instrumen untuk memperkuat keberpihakan negara kepada industri nasional. Hingga 24 Juli 2026, nilai transaksi produk dalam negeri telah mencapai Rp244,5 triliun atau sebesar 91,1 persen dari total transaksi penyedia. Sementara itu, nilai transaksi usaha mikro, kecil, dan koperasi sudah mencapai Rp128,4 triliun atau sebesar 47,9 persen dari total transaksi dengan jumlah pelaku usaha yang berpartisipasi sebanyak 236 ribu.

“Angka-angka ini bukan sekadar statistik semata. Di balik angka tersebut ada pabrik-pabrik yang terus berproduksi, pekerja yang mendapatkan penghasilan, pelaku UMKM yang memperoleh pasar, inovator lokal yang mendapatkan kesempatan, serta masyarakat yang merasakan manfaat pembangunan. Inilah wajah dari pengadaan barang dan jasa yang inklusif, produktif, berdampak langsung bagi perekonomian rakyat,” tutupnya.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia sekaligus Ketua Pelaksana ICEF-IPFE 2026 Kukrit Suryo Wicaksono.



Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia sekaligus Ketua Pelaksana ICEF-IPFE 2026 Kukrit Suryo Wicaksono (kiri) bersama Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Juan Permata Adoe (kanan) saat memberikan keterangan pers di sela-sela kunjungannya ke pameran Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) – Indonesia Procurement Forum Expo (IPFE) 2026 yang digelar di Grand Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara (29/7/2026).

Kadin Tegaskan Komitmen Menjadi Jembatan Pemerintah dan Dunia Usaha Hadapi Ketidakpastian Global



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat menyampaikan sambutan dalam Monthly Economic Diplomatic Breakfast bertajuk "Beyond Uncertainty: Building Indonesia's Next Economy" di Graha Sawala, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast bertajuk "Beyond Uncertainty: Building Indonesia's Next Economy" di Graha Sawala, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026). Forum ini dihadiri jajaran Duta Besar (Dubes) negara sahabat di antaranya Argentina, Iran, Italia, Tunisia, Banglades, Libya, Pakistan, Uruguay dan Vietnam.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, di tengah derasnya arus informasi dan berbagai dinamika global, dibutuhkan ruang dialog yang terbuka, praktis, dan dapat dipercaya untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai arah perekonomian Indonesia. Menurut Anin sapaan akrabnya, pertemuan rutin yang digelar Kadin Indonesia telah berkembang menjadi platform penting untuk membangun komunikasi yang konstruktif dengan komunitas diplomatik di Indonesia.

Ekonomi dunia saat ini semakin saling terhubung, tetapi pada saat yang sama juga semakin rentan terhadap berbagai gejolak. Rantai pasok, arus investasi, kebijakan industri, teknologi, ketahanan energi, ketahanan pangan, hingga geopolitik kini bergerak secara bersamaan," ujar Anin.

Anin menegaskan, kondisi tersebut menjadikan diplomasi ekonomi tidak lagi dapat dipisahkan dari dunia usaha. Hubungan antar-pemerintah harus didukung dengan implementasi konkret melalui kerja sama antar-pelaku usaha sehingga berbagai kesepakatan strategis dapat diwujudkan menjadi perdagangan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

"Kadin Indonesia siap menjadi jembatan antara pemerintah, dunia usaha, Kadin daerah, dan para mitra internasional untuk memastikan berbagai kerja sama ekonomi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Anin.

Anin juga menyampaikan bahwa Kadin Indonesia terus aktif mendukung agenda diplomasi ekonomi nasional. Salah satunya melalui pendampingan proses akses Indonesia menjadi anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) sejak 2023. Anin menyebut, dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki tahapan teknis akses OECD melalui kunjungan fact-finding mission. Karena itu, forum seperti Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast menjadi momentum penting untuk menyampaikan berbagai perkembangan positif Indonesia kepada komunitas internasional.

Selain OECD, Anin juga menyoroti sejumlah agenda diplomasi ekonomi yang dijalankan Kadin Indonesia selama satu bulan terakhir, mulai dari Indonesia-Germany Economic Dialogue bersama Presiden Republik Jerman H.E. Frank-Walter Steinmeier, partisipasi pada APEC China CEO Forum 2026, China-ASEAN Supply Chain Cooperation Forum, hingga kerja sama akademik dengan Tsinghua University dan jaringan Russell Group dari Inggris.

Berbagai aktivitas tersebut kata Anin, menunjukkan komitmen Kadin Indonesia dalam memperluas jejaring perdagangan, investasi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

"Kadin merupakan mitra strategis pemerintah sesuai amanat undang-undang. Di tengah banyaknya informasi dan berbagai distorsi yang berkembang, forum seperti ini menjadi penting untuk menghadirkan fakta dan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat serta berada di jalur yang tepat," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca perdagangan hingga sektor perbankan dinilai masih berada dalam kondisi yang terjaga.

Menko Airlangga mengatakan ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh sekitar 5,1%. Sementara itu, neraca perdagangan secara kumulatif tahun berjalan tetap mencatatkan surplus meski sempat mengalami defisit pada satu bulan terakhir.

"Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kemarin masih baik di sekitar 5,1%. Kemudian kalau kita lihat neraca perdagangan year to date juga masih positif," kata Menko Airlangga.

Menurutnya, defisit perdagangan bulanan dipengaruhi lonjakan harga impor bahan bakar minyak (BBM). Di sisi lain, ekspor komoditas utama seperti kelapa sawit, batu bara, dan feronikel masih relatif stabil sehingga pemerintah optimistis kinerja perdagangan tetap terjaga.

"Dari sisi stabilitas harga, inflasi juga masih berada dalam kisaran sasaran pemerintah sebesar 2,5% plus minus 1%. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif untuk menjaga daya saing industri nasional," sambung Menko Airlangga.

Menurutnya salah satu kebijakan yang disiapkan adalah pembebasan bea masuk impor bahan baku plastik bagi industri kimia. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan tarif bea masuk nol untuk impor LPG sebagai bahan baku industri petrokimia selama enam bulan.



(Dari kiri ke kanan) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartoto, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Hubungan Luar Negeri Bernardino M. Vega, WKU Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Riady, serta WKU Bidang Diplomasi Multilateral Andi Anzhar Cakra Wijaya saat memberikan keterangan pers usai acara Monthly Economic Diplomatic Breakfast di Graha Sawala, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026).

Airlangga mengatakan program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit perumahan terus disalurkan dengan realisasi yang cukup baik. Kondisi sektor perbankan juga tetap kuat, tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai dua digit serta penyaluran kredit yang meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya.

"Baik World Bank, IMF, maupun OECD masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5%. Jadi relatif semua menilai perekonomian kita relatif aman dan solid," terang Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady menilai perkembangan sektor kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) akan menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia pada masa mendatang.

James mengungkapkan bahwa Indonesia tengah bersiap menjadi pusat pengembangan ekosistem AI melalui pembangunan berbagai infrastruktur digital, termasuk landing point jaringan internasional di Batam dan Bitung serta pengembangan pusat data (data center) dan computing center berkapasitas besar.

"Ke depan AI akan menjadi center stage bagi Indonesia. Akan ada investasi puluhan miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun computing center dengan teknologi GPU (Graphics Processing Unit) paling mutakhir. Ini merupakan perkembangan yang sangat luar biasa," kata James.

James berharap informasi mengenai berbagai investasi strategis tersebut dapat semakin dipahami oleh dunia usaha dan komunitas internasional sehingga memperkuat optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia.



Foto bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartoto bersama jajaran pengurus bidang Luar Negeri Kadin Indonesia di sela-sela acara Monthly Economic Diplomatic Breakfast bertajuk "Beyond Uncertainty: Building Indonesia's Next Economy" di Graha Sawala, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026).

"Indonesia merupakan salah satu dari tiga kekuatan utama di kawasan Pasifik pada abad berikutnya bersama Amerika Serikat dan China (Tiongkok). Karena itu, peluang ekonomi Indonesia sangat besar," pungkas James.

Hadir dalam acara tersebut jajaran pengurus Kadin Indonesia di antaranya WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana M. Azis Syamsuddin, WKUK Bidang Pengembangan Ekspor Juan Permata Adoe, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Pahala Mansury, WKU Bidang Hubungan Luar Negeri Bernardino M. Vega, WKU Bidang Diplomasi Multilateral Andi Anzhar Cakra Wijaya, WKU Bidang Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Pembangunan Pedesaan Serta Transmigrasi Thomas Djusman dan WKU Bidang Pemasaran, Promosi, Inovasi dan Pengembangan Produk UMKM Rifda Ammarina.

Hadir pula Ketua Umum (Ketum) Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung, Ketum Kadin Provinsi Sumatra Barat Buchari Bachter, Ketum Kadin Provinsi DKI Jakarta Diana Dewi dan Ketum Kadin Provinsi Nusa Tenggara Barat, Faurani.

KABAR QUICK WINS

Rumuskan Kurikulum Berbasis Industri, Kadin Jatim dan Swisscontact Siapkan Fasilitator Job and Occupational Analysis



Peserta pelatihan Industry-Based Curriculum (IBC) berfoto bersama usai mengikuti pelatihan pembentukan fasilitator Job and Occupational Analysis (JOA) yang diselenggarakan Kadin Provinsi Jawa Timur, Kadin Institute, dan Swisscontact di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (3/7/2026).

Surabaya – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Kadin, Kadin Institute bersama Swiss Foundation for Technical Cooperation (Swisscontact) menyiapkan fasilitator Job and Occupational Analysis (JOA) dengan menggelar pelatihan Industry-Based Curriculum (IBC) di Surabaya mulai 29 Juni hingga 3 Juli 2026 guna memperkuat penyusunan kurikulum pendidikan vokasi yang benar-benar berbasis kebutuhan industri.

Pelatihan pembentukan fasilitator JOA menjadi tahapan awal untuk mencetak tenaga yang mampu melakukan analisis mendalam terhadap suatu okupasi atau jabatan. Analisis tersebut meliputi tugas dan tanggung jawab pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, tren pekerjaan di masa depan, persyaratan dasar, hingga berbagai informasi lain yang berkaitan dengan kompetensi pekerja.

Ketua Umum Kadin Provinsi Jatim Adik Dwi Putranto, mengatakan para peserta yang mengikuti pelatihan, khususnya dari unsur Kadin Provinsi Jatim, nantinya akan bertugas mendampingi industri berkolaborasi dengan sekolah, perguruan tinggi, maupun politeknik agar kurikulum yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan dunia usaha.

“Kebutuhan industri, terutama di bidang teknologi informasi, berkembang sangat cepat, sementara perubahan kurikulum membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu, pendampingan melalui fasilitator JOA menjadi jalan tengah agar kurikulum tetap relevan dengan perkembangan industri,” ujar Adik pada Jumat (03/07/2026) di Surabaya, Jatim.

Menurut Adik, harmonisasi kurikulum akan memberikan manfaat bagi dunia pendidikan maupun industri. Lulusan diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sementara proses magang juga dapat berjalan lebih efektif karena materi yang dipelajari di kampus dan sekolah telah diselaraskan dengan kebutuhan industri.

“Melalui Kadin (Jatim) Institute, kami akan mengajarkan bagaimana melakukan harmonisasi kurikulum kepada industri. Di sisi lain, guru dan dosen juga akan kami dampingi agar memiliki pemahaman yang sama dalam menyusun kurikulum berbasis kebutuhan industri,” kata Adik.

Adik menargetkan setiap fasilitator mampu mendampingi sedikitnya 10 perusahaan bersama mitra pendidikannya. Dengan 10 fasilitator yang mengikuti pelatihan angkatan pertama, Kadin Provinsi Jatim optimistis program tersebut dapat menjangkau sekitar 100 industri pada tahap awal sebelum diperluas ke seluruh daerah di Jatim.

"Kami juga akan membekali Kadin kabupaten dan kota agar memiliki kemampuan yang sama. Harapannya, semakin banyak industri yang dapat didampingi sehingga semakin banyak pula sekolah dan perguruan tinggi yang memiliki kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja," terang Adik.

Sementara itu, Senior Program Officer VET Development Swisscontact Ilham Hasbiullah, mengatakan fasilitator yang dilatih nantinya akan memiliki peran penting dalam menghasilkan dokumen analisis okupasi yang menjadi dasar penyusunan kurikulum pendidikan vokasi.

"Fasilitator nanti akan mampu mengembangkan analisis tentang sebuah okupasi yang menyangkut tugas dan tanggung jawab pekerjaan, kompetensi yang dibutuhkan, tren pekerjaan di masa depan, basic requirement, hingga berbagai informasi lain yang berkaitan dengan kompetensi seorang pekerja," kata Ilham.

Menurutnya, hasil JOA akan menjadi rujukan dalam menyusun kurikulum di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah menengah kejuruan, perguruan tinggi, hingga lembaga pelatihan kerja. Dengan demikian, materi pembelajaran benar-benar disusun berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri.

Ilham menjelaskan, selama ini penyusunan kurikulum umumnya masih dimulai dari institusi pendidikan, kemudian baru diverifikasi oleh industri. Pola tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan kompetensi antara lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

"Kalau kita ingin mengurangi skill mismatch (kesenjangan kompetensi), maka prosesnya harus dibalik. Analisis pekerjaan dilakukan terlebih dahulu di industri, baru hasilnya diterjemahkan menjadi kurikulum. Jadi kurikulum benar-benar lahir dari kebutuhan industri, bukan sebaliknya," katanya.

Pendekatan tersebut lanjut Ilham, diharapkan mampu mengurangi kesenjangan kompetensi yang selama ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran lulusan pendidikan vokasi, khususnya sekolah menengah kejuruan. Meski demikian, Ilham menegaskan persoalan pengangguran tidak hanya dipengaruhi kurikulum, melainkan juga berbagai faktor lainnya.

Selain menjadi dasar penyusunan kurikulum, hasil JOA juga akan digunakan untuk menentukan pembagian materi pembelajaran antara sekolah dan industri. Ilham mengatakan, kompetensi yang dapat dipelajari di sekolah akan dipisahkan dengan kompetensi yang lebih tepat diperoleh melalui praktik langsung di dunia usaha dan dunia industri.

"Melalui JOA kita juga bisa menentukan kompetensi mana yang cukup diajarkan di sekolah dan kompetensi mana yang harus dipelajari langsung di industri. Ini akan memperkuat implementasi sistem pembelajaran ganda atau dual system," jelasnya.

Pelatihan kali ini diikuti 10 calon fasilitator yang berasal dari unsur industri, perguruan tinggi, dan pemerintah. Selama 5 hari, peserta memperoleh pembekalan teori mengenai metode JOA, teknik menggali informasi dari narasumber industri, penyusunan hasil analisis, hingga praktik simulasi sebagai fasilitator maupun panelis industri.

Ilham mengungkapkan, hingga saat ini tim pelaksana telah menyelesaikan sekitar 80 analisis JOA di berbagai sektor melalui kerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan sejumlah mitra. Pelatihan yang diselenggarakan bersama Kadin Jawa Timur ini menjadi yang pertama digelar di lingkungan Kadin, sekaligus memperluas penerapan metode JOA di luar institusi pendidikan.

"Kami berharap ke depan setiap penyusunan kurikulum pendidikan vokasi diawali dengan Job and Occupational Analysis. Dengan begitu, kurikulum benar-benar bersifat demand driven, sesuai kebutuhan industri, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan lebih siap memasuki dunia kerja," pungkasnya.

Anindya Bakrie Ungkap Investasi Sektor Kesehatan Berpotensi Ciptakan Efek Berganda bagi Ekonomi Nasional



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie (kanan) saat menghadiri Ceremony for the Joint Venture Between Tempo Scan Group and Sino Biopharmaceutical Limited PT Tempo CTTQ Biopharmaceutical Indonesia (TCBI) di Tempo Scan Tower, Jakarta Selatan, Jumat (24/07/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menghadiri Ceremony for the Joint Venture Between Tempo Scan Group and Sino Biopharmaceutical Limited PT Tempo CTTQ Biopharmaceutical Indonesia (TCBI) di Tempo Scan Tower, Jakarta Selatan, Jumat (24/07/2026).

Usai acara, Anindya atau Anin apaan akrabnya menyampaikan apresiasi kepada Tempo Scan Group atas terjalinnya kemitraan strategis tersebut. Menurut Anin, investasi di sektor kesehatan merupakan langkah penting untuk memperkuat industri farmasi nasional sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

“Selamat kepada Tempo Scan Group. Jadi memang ini adalah satu industri yang bisa dikembangkan sehingga bisa membuat yang namanya health itu bukan hanya luxury, tapi juga suatu hal yang sangat hakiki di masyarakat,” kata Anin.

Anin mengungkapkan, berdasarkan White Paper Kadin Indonesia yang disusun bersama Kementerian Kesehatan RI, nilai ekonomi sektor kesehatan di Indonesia mencapai sekitar Rp670 triliun per tahun. Anin menilai, sektor ini memiliki dampak berganda (multiplier effect) yang besar terhadap perekonomian nasional.

“Rp670 triliun itu setiap satu rupiah yang dikeluarkan di dalam health ini menghasilkan dua sampai tiga rupiah lagi untuk multiplier effect-nya,” ujar Anin.

Menurut Anin, besarnya potensi sektor kesehatan masih belum banyak dipahami. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, investasi di sektor ini juga dapat mengurangi beban pemerintah, termasuk melalui efisiensi pembiayaan layanan kesehatan seperti BPJS Kesehatan.

Anin juga menyoroti masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku kesehatan dan farmasi. Oleh karena itu, kehadiran investasi baru dinilai dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing nasional.

“Selama ini banyak bahan yang impor. Jadi kalau misalnya bisa mengurangi impor ini, maka industri dalam negeri bisa maju,” kata Anin.

Anin menambahkan, besarnya nilai ekonomi sektor kesehatan juga membuka peluang yang luas bagi seluruh pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Anin, hal tersebut sejalan dengan struktur keanggotaan Kadin Indonesia yang didominasi oleh sekitar 60 juta UMKM, sementara perusahaan berskala besar jumlahnya jauh lebih sedikit.

“Saya rasa ini tanda-tanda bahwa memang investasi dari dalam dan luar negeri sudah mulai bergeliat. Dan ini menandakan bahwa konsumsi domestik Indonesia itu kuat. Karena selama ini kita selalu berbicara mengenai perdagangan, investasi, dan konsumsi domestik selain daripada belanja pemerintah,” tutup Anin.

KABAR PROGRAM

Kadin Dukung KUNCI BERSAMA, Anindya Bakrie Dorong Aglomerasi Jadi Motor Pertumbuhan Kawasan



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie (kanan) saat menghadiri KUNCI BERSAMA Summit 2026 bertajuk “Sinergi Lintas Batas Membangun Ekosistem dan Kemajuan Kawasan Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah Menuju Indonesia Emas Tahun 2045” yang berlangsung di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menghadiri KUNCI BERSAMA Summit 2026 bertajuk “Sinergi Lintas Batas Membangun Ekosistem dan Kemajuan Kawasan Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah Menuju Indonesia Emas Tahun 2045” yang berlangsung di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Forum tersebut menjadi ajang kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha untuk mempercepat pengembangan kawasan KUNCI BERSAMA yang mencakup wilayah Jawa Barat bagian timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur melalui pendekatan aglomerasi polisentris.

Usai acara, Anindya atau Anin sapaan akrabnya mengatakan kehadiran Kadin merupakan bentuk dukungan terhadap upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan, khususnya di wilayah Jawa Barat bagian timur yang terintegrasi dengan daerah sekitarnya.

“Kadin datang untuk mendukung KUNCI BERSAMA dalam meningkatkan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian timur, tentu bersama dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ujar Anin.

Menurut Anin, setiap kabupaten dan kota di kawasan tersebut perlu memiliki keunggulan dan fokus pengembangan masing-masing sehingga dapat saling melengkapi dalam membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi.

“Setiap kabupaten di Jawa Barat bisa mempunyai fokusnya sendiri-sendiri. Ada yang menjadi pusat keuangan, pusat logistik, pusat mode dan retail, maupun sektor-sektor unggulan lainnya,” jelas Anin.

Anin menambahkan, kawasan tersebut memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 13,5 juta jiwa. Karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang mampu menjadikan kawasan tersebut sebagai salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berfoto bersama Wakil Ketua Umum Wiayah Jawa 1 (Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat) Kadin Indonesia, Agung Suryamal Sutisna (enam dari kiri) dan pimpinan Pemerintah Kabupaten Brebes, Pangandaran, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Cilacap, Indramayu, dan Kabupaten Cirebon, serta Pemerintah Kota Cirebon dan Kota Banjar usai penandatanganan MoU mengenai sinergi program, harmonisasi kebijakan, dan pengembangan kawasan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah secara kolektif pada KUNCI BERSAMA Summit 2026 di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).



“Yang menarik, kita berbicara mengenai 13,5 juta orang di kawasan ini. Jadi kita harus memikirkan bagaimana kawasan ini bisa terus bertumbuh karena menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional,” ujar Anin.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong kawasan KUNCI BERSAMA menjadi model pengembangan kawasan berbasis aglomerasi polisentris yang mengacu pada praktik terbaik di sejumlah negara, seperti Belanda, Tiongkok, dan Jerman.

Menurut AHY, kawasan KUNCI BERSAMA memiliki total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp592 triliun, sehingga berpotensi menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

AHY menjelaskan, pembentukan kawasan tersebut berangkat dari aspirasi pemerintah daerah yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fiskal, pembangunan infrastruktur, hingga konektivitas antardaerah.

“Memang tidak mudah membangun proyek. Tidak sama dengan mengembangkan kawasan yang terintegrasi. Sering kali kita terjebak pada ego sektoral. Kita membangun sebuah proyek besar, tetapi tidak berpikir panjang bagaimana mengintegrasikan itu dengan kawasan-kawasan di sekitarnya,” kata AHY.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie memberikan buku *We Buy From Indonesia* kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di sela-sela KUNCI BERSAMA Summit 2026 di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan 10 nota kesepahaman (MoU) antara Kadin Indonesia dengan pemerintah daerah mengenai kerja sama pengembangan potensi dan perekonomian daerah serta pemberdayaan dunia usaha.

Kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Pemerintah Kabupaten Brebes, Pangandaran, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Cilacap, Indramayu, dan Kabupaten Cirebon, serta Pemerintah Kota Cirebon dan Kota Banjar.

KUNCI BERSAMA adalah Sekretariat Kerja Sama antar 10 daerah perbatasan yang berlokasi di sepanjang wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sekretariat ini dibentuk untuk memfasilitasi sinergi program, harmonisasi kebijakan, dan pengembangan kawasan perbatasan secara kolektif.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Umum Wiayah Jawa 1 (Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat) Kadin Indonesia Agung Suryamal Sutisna.



Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka secara resmi KUNCI BERSAMA Summit 2026 di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Ketum Kadin Sambut Investasi Rp5,2 Triliun LiuGong di Karawang, Indonesia Disiapkan Jadi Export Hub Alat Berat

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyampaikan sambutannya dalam acara LiuGong's Groundbreaking Ceremony di Karawang Artha Industrial Hill, Karawang, Jawa Barat, Rabu (22/07/2026).

Karawang – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan apresiasi atas keputusan LiuGong menjadikan Indonesia sebagai basis manufaktur sekaligus pusat ekspor (export hub) untuk melayani pasar global.

Hal tersebut disampaikan Anin sapaan akrabnya saat memberikan sambutan dalam acara LiuGong's Groundbreaking Ceremony pembangunan fasilitas manufaktur alat berat terpadu di Karawang Artha Industrial Hill, Karawang, Jawa Barat, Rabu (22/07/2026).

"Saya, atas nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia, mengucapkan selamat kepada keluarga besar LiuGong atas dimulainya pembangunan fasilitas manufaktur alat berat terpadu di Karawang ini. Kami juga mengucapkan selamat karena telah memilih Indonesia sebagai hub untuk melakukan ekspor ke seluruh dunia," ujar Anin.

Anin mengapresiasi komitmen investasi LiuGong yang mencapai sekitar Rp5,2 triliun di atas lahan seluas 27 hektare dengan kapasitas produksi hingga 3.000 unit alat berat per tahun. Menurut Anin, investasi tersebut sangat strategis dalam mendukung kebutuhan alat berat di tengah percepatan hilirisasi dan industrialisasi nasional, khususnya di sektor mineral.

"Kami bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI berjuang menghadirkan investasi seperti ini. Nilai investasinya sangat berarti dan akan membantu memenuhi kebutuhan alat berat seiring percepatan hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia," kata Anin.

Anin juga mengapresiasi kolaborasi LiuGong dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam pengembangan sumber daya manusia.

"Investasi bukan hanya soal modal, tetapi juga investasi pada sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan Indonesia," ujar Anin.

Lebih lanjut, Anin menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Itulah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuju 8 persen, sekaligus memastikan pembangunan yang inklusif dengan melibatkan pelaku usaha lokal," ujar Anin.

Di akhir sambutannya, Anin menilai investasi LiuGong akan memberikan sedikitnya tiga manfaat utama bagi Indonesia. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Kedua, membuka lapangan kerja.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat menghadiri acara LiuGong's Groundbreaking Ceremony di Karawang Artha Industrial Hill, Karawang, Jawa Barat, Rabu (22/07/2026).

"Ketiga, memperkuat pembangunan infrastruktur yang akan memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional. Apalagi Indonesia dipilih sebagai export hub, ini tentu sangat membanggakan," kata Anin.

Anin berharap investasi LiuGong dapat menjadi inspirasi bagi semakin banyak perusahaan Tiongkok untuk menanamkan modal di Indonesia.

"Mudah-mudahan kerja sama ini bukan hanya sukses, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lebih banyak perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi seperti ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," tutup Anin.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Kukrit Suryo Wicaksono.

Survei Kadin Business Pulse: Sentimen Dunia Usaha Melemah pada Kuartal II 2026, Rupiah dan Kebijakan Fiskal Jadi Sorotan



Peluncuran Kadin Business Pulse Q2 2026 bertajuk “Ketahanan Dunia Usaha di Tengah Pelemahan Rupiah dan Peluang ICA-CEPA” dihadiri langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (15/07/2026).



Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie saat memberikan sambutan dalam peluncuran Kadin Business Pulse Q2 2026 bertajuk “Ketahanan Dunia Usaha di Tengah Pelemahan Rupiah dan Peluang ICA-CEPA” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (15/07/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Institute merilis hasil Kadin Business Pulse Q2 2026 bertajuk “Ketahanan Dunia Usaha di Tengah Pelemahan Rupiah dan Peluang ICA-CEPA” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (15/07/2026).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, Kadin Business Pulse merupakan instrumen yang secara rutin diterbitkan setiap kuartal untuk memotret kondisi dunia usaha sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Anindya atau Anin sapaan akrabnya menyampaikan, Business Pulse menjadi dashboard bagi dunia usaha untuk melihat berbagai indikator perekonomian,

mulai dari kondisi bisnis, regulasi, birokrasi, kebijakan pemerintah, hingga daya beli masyarakat. Survei tersebut juga mencakup pelaku usaha dari berbagai skala, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), hingga perusahaan besar

Menurut Anin, sepanjang kuartal II 2026 dunia usaha menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian geopolitik akibat konflik di Timur Tengah, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kepastian regulasi, daya beli masyarakat, hingga kenaikan biaya energi.

Meski demikian, Anin menilai perhatian investor global terhadap Indonesia kini tidak lagi berfokus pada besarnya potensi ekonomi, melainkan pada kemampuan Indonesia dalam merealisasikan berbagai kebijakan.

“Sekarang dunia luar tidak lagi menanyakan potensi Indonesia. Mereka sudah paham dan percaya. Yang selalu ditanyakan adalah apakah Indonesia bisa mengeksekusi kebijakannya, apakah regulasinya memiliki kepastian, dan apakah Indonesia punya talenta untuk mencapai Indonesia Emas,” kata Anin. Menurut Anin, kondisi tersebut justru mendorong Kadin untuk semakin aktif turun ke berbagai daerah guna memperkuat komunikasi dengan pelaku usaha sekaligus menyampaikan berbagai informasi dan advokasi kebijakan.

"Di sanalah kami melihat kebutuhan terbesar. Kadin harus hadir sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus menjadi rumah bagi dunia usaha," ujar Anin.

Lebih lanjut, Anin menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai tantangan global. Ia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat bertahan di kisaran 5 persen pada 2026.

"Inflasi juga terjaga dan rasio utang terhadap PDB merupakan salah satu yang terbaik di G20," ucap Anin.

Selain itu, Anin melihat tekanan geopolitik global mulai mereda, disertai munculnya sentimen positif terhadap Indonesia. Ani menilai Indonesia tengah memasuki fase transformasi ekonomi dari berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis sumber daya manusia.

"Indonesia sedang bertransformasi dari natural resources based menjadi human resources based. Dalam setiap transisi tentu ada tantangan, sehingga kita harus menyiapkan peningkatan kualitas SDM," kata Anin.

Di sisi lain, Anin menilai dunia usaha juga perlu beradaptasi terhadap tatanan ekonomi global yang baru (new equilibrium). Menurutnya, kondisi tersebut harus dihadapi secara realistis dengan tetap menjaga optimisme.

"Ini adalah equilibrium baru. Kita tentu menginginkan rupiah menguat dan suku bunga turun, tetapi kita juga harus melihat kondisi apa adanya dengan kepala dingin. Biasanya setelah satu hingga tiga tahun, ketika kepercayaan kembali, situasi akan berbalik arah," ujar Anin.

Untuk itu, Anin mendorong pelaku usaha terus melakukan efisiensi, mempercepat adopsi teknologi, menjaga lapangan kerja, serta memperluas pasar ekspor melalui pemanfaatan berbagai perjanjian perdagangan internasional.

Lebih lanjut, Anin menyoroti masih rendahnya pemanfaatan perjanjian dagang oleh dunia usaha, termasuk Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), padahal peluang ekspor yang tersedia sangat besar.

"Sayang sekali kalau kita tidak meningkatkan ekspor karena sekitar 80 persen pelaku usaha belum mengetahui detail pemanfaatan CEPA. Padahal sebentar lagi perjanjian dengan Uni Eropa akan berjalan dan Kanada juga sudah kita tandatangani pada awal tahun," terang Anin.

Sementara itu, Direktur Insights Kadin Indonesia Institute Fakhru Fulvian, mengatakan hasil survei menunjukkan sentimen dunia usaha pada kuartal II 2026 masih mengalami pelemahan dibandingkan kuartal sebelumnya. Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian kebijakan fiskal menjadi perhatian utama pelaku usaha.

"Hasil kuartal II menunjukkan sentimen bisnis masih melemah dibandingkan kuartal I. Konsen utama pelaku usaha adalah pelemahan rupiah dan kepastian kebijakan fiskal pemerintah," ujar Fakhru.

Meski demikian, Fakhru melihat optimisme pelaku usaha mulai membaik seiring meredanya risiko geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah. Menurutnya, pelaku usaha yang berorientasi ekspor mulai melihat adanya peluang perbaikan kondisi pasar internasional.

"Pelaku usaha mulai lebih optimistis melihat perkembangan global karena risiko perang di Timur Tengah sudah lebih rendah dibandingkan kuartal I. Perusahaan yang berorientasi ekspor mulai merasakan ada upside dari kondisi ini," katanya.

Dari sisi operasional, pelemahan rupiah dinilai memberikan tekanan terbesar terhadap kenaikan biaya usaha. Pada saat yang sama, pelaku usaha juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan margin keuntungan karena belum dapat sepenuhnya meneruskan kenaikan harga bahan baku kepada konsumen yang daya belinya masih terbatas.

"Yang paling menjadi perhatian adalah kenaikan biaya operasional akibat pelemahan rupiah. Di sisi lain, pelaku usaha belum bisa sepenuhnya meneruskan kenaikan harga bahan baku karena daya beli masyarakat belum terlalu membaik," ujarnya.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Kadin Indonesia Institute menilai terdapat empat langkah prioritas yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk membangun kembali optimisme dunia usaha, yakni menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memberikan kepastian regulasi, menghadirkan arah kebijakan fiskal yang jelas, serta meningkatkan daya beli masyarakat melalui dorongan fiskal yang kuat dan kredibel.

Ia juga berharap berbagai ketidakpastian regulasi, terutama yang berkaitan dengan sektor komoditas unggulan, dapat segera diselesaikan agar tidak mengganggu kinerja ekspor maupun neraca berjalan Indonesia.

"Kalau dari dunia usaha tentu harapannya secepatnya. Ketidakpastian regulasi, terutama yang terkait komoditas unggulan, harus segera diselesaikan karena dapat mengganggu ekspor dan memberi tekanan terhadap rupiah," ujarnya.

Di sisi lain Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Institute menegaskan pemerintah perlu memprioritaskan stabilisasi nilai tukar rupiah, kepastian arah kebijakan, serta penyederhanaan birokrasi mengingat ketiga hal tersebut menjadi sumber tekanan sekaligus harapan utama pelaku usaha di tengah pelemahan sentimen bisnis.

Selain itu, dukungan afirmatif seperti kemudahan akses pembiayaan perlu diarahkan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) yang paling rentan. Sosialisasi ICA-CEPA juga perlu diperluas agar manfaat perjanjian tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh dunia usaha.

“Temuan Business Pulse Q2-2026 menegaskan bahwa dunia usaha Indonesia tengah menghadapi tekanan berlapis, mulai dari pelemahan rupiah, birokrasi, hingga minimnya pemahaman atas peluang kerja sama baru seperti ICA-CEPA. Tugas kita bersama adalah memastikan kepastian kebijakan hadir lebih cepat dari tekanan yang dirasakan pelaku usaha, sekaligus memperluas sosialisasi agar peluang seperti ICA-CEPA benar-benar dapat dimanfaatkan, khususnya oleh usaha kecil dan menengah yang paling rentan,” pungkask Mulya.

Temuan Utama Q2-2026: Sentimen Bisnis dan Investasi Terus Melemah

- Kondisi bisnis kembali melemah. Sebanyak 47,1% pelaku usaha menilai kondisi bisnis Q2-2026 memburuk dibandingkan kuartal sebelumnya, naik dari 40,5% pada Q1-2026, sementara yang menilai membaik turun menjadi 22,8% dari 25,2%. Usaha Kecil dan Menengah menjadi kelompok yang paling terdampak, dengan 50,6% menilai kondisi bisnisnya memburuk.

- Sektor industri melemah lebih tajam. Sebanyak 51,8% pelaku usaha menilai kondisi sektor industri memburuk, naik dari 44,3% pada Q1-2026, mengindikasikan tekanan permintaan dan biaya yang semakin dirasakan pada sisi produksi.
- Minat investasi terus tertahan. Sebanyak 43,5% pelaku usaha menyatakan tidak berencana melakukan investasi dalam enam bulan ke depan, naik dari 39,0% pada Q1-2026, sementara yang berencana berinvestasi turun menjadi 34,4% dari 38,6%. Usaha Kecil dan Menengah kembali menjadi kelompok paling tertekan, dengan 58,4% menyatakan tidak berencana berinvestasi.
- Birokrasi & regulasi jadi tantangan tertinggi. Tantangan birokrasi & regulasi naik menjadi 16,4% dari 14,3% pada Q1-2026, salah satunya didorong oleh aturan RKAB di sektor pertambangan, menggeser kebijakan & program pemerintah (14,8%) yang sebelumnya menjadi tantangan utama.
- Pasar dan teknologi tetap jadi sumber optimisme. Perkembangan pasar (26,6%) tetap menjadi pendorong utama perkembangan positif bisnis, didukung membaiknya kondisi pasar internasional seiring meredanya konflik geopolitik di Timur Tengah, meski perkembangan teknologi menurun menjadi 19,1% dari 22,0%.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa dan WKU Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang.



Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Husin (kiri) bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin RI, Sri Bimo Pratomo (kanan) saat membuka seminar bertajuk “Implementasi Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia (P2KDBK) dengan Pendekatan Corporate Sustainability Performance (CSP)” secara hybrid di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/07/2026).

Kadin Indonesia dan Kemenperin Dorong Implementasi P2KDBK untuk Perkuat Keselamatan dan Keberlanjutan Industri

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI menggelar seminar bertajuk “Implementasi Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia (P2KDBK) dengan Pendekatan Corporate Sustainability Performance (CSP)” secara hybrid di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/07/2026).

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin mengatakan penerapan P2KDBK tidak semata-mata merupakan kewajiban untuk memenuhi regulasi, tetapi juga bagian penting dari upaya perusahaan membangun sistem manajemen risiko yang kuat.

Saleh menjelaskan, seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 37 Tahun 2025, perusahaan industri dengan tingkat risiko tinggi dan menengah tinggi diwajibkan memiliki Sertifikat Tanda Sah P2KDBK.

Karena itu, kata Saleh, diperlukan pemahaman yang komprehensif agar implementasi regulasi tersebut dapat berjalan efektif dan tidak berhenti sebagai beban administratif semata, melainkan menjadi bagian dari budaya keselamatan dan keberlanjutan perusahaan.

“Kami meyakini keberhasilan implementasi suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh komunikasi yang terbuka, pendampingan yang memadai, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Saleh menambahkan, pendekatan CSP yang diangkat dalam seminar ini menjadi pengingat bahwa keberlanjutan perusahaan tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan dan tata kelola. Keberlanjutan juga mencakup kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko, menjaga keselamatan pekerja, melindungi lingkungan, serta memastikan keberlangsungan operasional ketika menghadapi keadaan darurat.

“Kadin Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung implementasi berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan daya saing dan keberlanjutan industri nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin RI Sri Bimo Pratomo yang hadir mewakili Direktur Jenderal IKFT Kemenperin RI Taufik Bawazier mengatakan industri kimia merupakan sektor strategis yang menjadi fondasi bagi berbagai sektor industri lainnya. Selain berperan sebagai penyedia bahan baku, industri kimia juga menjadi penggerak nilai tambah dan daya saing industri nasional.

“Pada triwulan I 2026, industri kimia tumbuh sebesar 7,41 persen, dengan nilai ekspor mencapai 6,18 miliar dolar AS dan berkontribusi sebesar 10,35 persen terhadap pertumbuhan industri pengolahan,” kata Bimo.

Menurutnya, pencapaian tersebut perlu didukung dengan penerapan sistem pengelolaan keselamatan yang kuat dan berkelanjutan. Karakteristik industri kimia yang memiliki tingkat risiko tinggi menuntut penerapan sistem pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat bahan kimia yang efektif.



Para pembicara seminar bertajuk “Implementasi Pencegahan dan Penanggulangan Keadaan Darurat Bahan Kimia (P2KDBK) dengan Pendekatan Corporate Sustainability Performance (CSP)” berfoto bersama di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).

“Kegagalan dalam pengelolaan keselamatan dapat mengganggu proses produksi, memutus rantai pasok industri hilir, serta menimbulkan dampak bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, implementasi P2KDBK dengan pendekatan Corporate Sustainability Performance menjadi langkah penting untuk memastikan perusahaan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja ekonomi, tetapi juga pada keselamatan dan keberlanjutan operasional industri,” ujarnya. Lebih lanjut, Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin RI Wiwik Pudjiastuti mengatakan penerapan P2KDBK telah memiliki dasar pengaturan, salah satunya melalui Permenperin Nomor 19 Tahun 2019.

“Di dalamnya terdapat industri-industri di bawah binaan Direktorat Industri Kimia Hulu, Ditjen IKFT, yang memiliki kewajiban untuk menerapkan P2KDBK, termasuk sertifikasinya,” kata Wiwik.

Menurutnya, penerapan P2KDBK menjadi penting mengingat industri kimia memiliki berbagai potensi risiko, baik terhadap tenaga kerja, peralatan, maupun lingkungan.

“Industri kimia merupakan salah satu industri yang rentan terhadap berbagai risiko bahaya. Risiko tersebut dapat berdampak terhadap manusia, peralatan yang dimiliki, maupun lingkungan. Karena itu, pemerintah perlu melakukan antisipasi melalui upaya pencegahan dan penanggulangan untuk mencegah serta meminimalkan risiko yang timbul,” ujarnya.

Wiwik menjelaskan, kewajiban penerapan P2KDBK ditujukan bagi industri dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang memiliki tingkat risiko tinggi dan menengah tinggi.

Sementara itu, industri dengan tingkat risiko rendah tidak memiliki kewajiban tersebut. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Federasi Industri Kimia Indonesia (FIKI) Ridwan Adipoetra mengatakan FIKI mendukung penuh program pemerintah dalam implementasi P2KDBK sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Permenperin Nomor 19 Tahun 2019.

“Implementasi P2KDBK merupakan langkah strategis untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan keadaan darurat bahan kimia, sehingga tercipta lingkungan industri yang aman bagi pekerja, masyarakat di sekitar pabrik, serta lingkungan,” kata Ridwan.

Ia menambahkan, penerapan P2KDBK juga menjadi solusi bagi perusahaan dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi dalam memenuhi persyaratan pengelolaan keselamatan bahan kimia secara sistematis, terintegrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“FIKI mengajak seluruh pelaku industri untuk berpartisipasi aktif dalam penerapan P2KDBK sebagai bagian dari upaya mewujudkan industri yang aman, berkelanjutan, dan produktif. Dengan penerapan yang baik, industri akan semakin berdaya saing, memberikan nilai tambah bagi perusahaan, melindungi pekerja dan masyarakat, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan kemajuan Indonesia,” pungkasnya.

Turut hadir sebagai narasumber di antaranya Eka Marlina dari Binus International University, Mas Ayu Elita Hafizah dari FIKI dan Ketua Komite Tetap Standarisasi & Produktivitas Kadin Indonesia Haris Munandar Nurhasan.

Kadin dan Kementerian PPPA RI Bersinergi Kembangkan Care Economy dan Daycare di Dunia Usaha



Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie bersama jajaran pengurus melakukan audiensi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifatul Choiri Fauzi di Kantor Kementerian PPPA RI, Jakarta Pusat, Senin (27/07/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kadin Indonesia dan Kementerian PPPA RI membahas peluang kolaborasi untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengembangan care economy sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan bangsa. Selain memiliki dimensi sosial yang kuat, isu tersebut juga memiliki dampak ekonomi yang sangat besar.

"Karena secara sosial, kita melihat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk perkembangan suatu bangsa menuju Indonesia Emas. Di sisi lain, ini juga merupakan aspek ekonomi yang besar," ujar Anin sapaan akrabnya.

Anin menjelaskan, sekitar 60 persen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia merupakan perempuan. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terlibat jauh lebih besar, sehingga pemberdayaan perempuan dinilai dapat mendukung visi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap menuju 8 persen.

Menurut Anin, salah satu fokus utama Kadin dalam mendukung agenda tersebut adalah pengembangan care economy.

"Indonesia mempunyai karakter masyarakat yang peduli. Ketika kita berbicara mengenai lansia, anak-anak maupun penyandang disabilitas, kita memiliki sumber daya yang kuat untuk mengembangkan care economy, baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional," kata Anin.

Anin menambahkan, sektor care economy juga berkaitan erat dengan tenaga kerja migran Indonesia yang memberikan kontribusi devisa atau remittance yang sangat besar bagi perekonomian nasional.

Sebagai tindak lanjut, Kadin berencana bekerja sama dengan Kementerian PPPA RI dalam mendorong pengembangan layanan daycare di lingkungan dunia usaha.



"Kami ingin bekerja sama dan tentu membutuhkan dukungan Ibu Menteri terkait daycare. Ini penting karena perusahaan-perusahaan anggota Kadin memiliki banyak pekerja profesional, termasuk perempuan pengusaha. Jika tersedia daycare yang memadai, anak-anak akan terjaga dengan baik, para ibu dapat bekerja lebih produktif, dan pada akhirnya roda ekonomi akan bergerak lebih baik," jelas Anin.

Anin mengatakan Kadin akan menyosialisasikan pentingnya penyediaan daycare kepada seluruh anggotanya, sekaligus menyusun gambaran mengenai standar layanan daycare yang baik agar dapat direplikasi oleh perusahaan-perusahaan anggota Kadin. Selain itu, Kadin juga akan memanfaatkan roadmap care economy yang telah disusun pemerintah sebagai referensi dalam memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia di berbagai forum internasional.

"Kami melihat roadmap tersebut sangat bermanfaat. Kadin juga aktif melakukan diplomasi ekonomi. Indonesia saat ini semakin banyak diminati di berbagai forum internasional seperti BRICS, B20, dan APEC. Kami akan terus menyuarakan perspektif dunia usaha mengenai pentingnya care economy," ujar Anin.

Sementara itu, Menteri PPPA RI Arifatul Choiri Fauzi mengatakan kolaborasi dengan Kadin menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemberdayaan perempuan di Indonesia.

"Bagaimana kita akan berkolaborasi dan bersinergi memperkuat perempuan-perempuan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan data BPS, perempuan dan anak menduduki sekitar dua pertiga dari seluruh populasi Indonesia. Artinya, perempuan dan anak mempunyai peran yang sangat penting dan strategis," kata Arifatul.

Ia menjelaskan, pemerintah bersama Kadin tengah mengidentifikasi berbagai titik kolaborasi yang dapat memperkuat program pemberdayaan perempuan.

"Hari ini kita mencoba mengkolaborasikan di titik-titik mana kita bisa bersinergi untuk memperkuat pemberdayaan perempuan. Karena kalau perempuannya berdaya, insya allah rumah tangga juga akan lebih baik, anak-anak mendapatkan pengasuhan yang optimal, dan seorang ibu mampu mengelola keluarganya dengan lebih baik," pungkasnya. Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Sosial Kadin Indonesia Nita Yudi dan WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kadin Indonesia Tatyana Sentani Sutara.



Kadin Serukan Stop Kriminalisasi Perempuan Pengusaha, Dorong Implementasi Hukum Berperspektif Gender



(Dari kiri) Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Sosial Kadin Indonesia Nita Yudi, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Veronica Tan, dan WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kadin Indonesia, Tatyana Sentani Sutara dalam acara Focus Group Discussion (FGD) di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (22/07/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Stop Kriminalisasi Perempuan Pengusaha: Mengawal Implementasi Kebijakan Berperspektif Gender, Memastikan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Khususnya Perempuan Pengusaha menuju Planet 50:50 dan Indonesia Emas 2045” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (22/07/2026).

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Sosial Kadin Indonesia Nita Yudi, menegaskan pentingnya menghentikan kriminalisasi terhadap perempuan pengusaha mengingat kontribusi mereka yang besar terhadap perekonomian nasional, khususnya melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Perempuan pengusaha jangan diremehkan atau dikriminalisasikan. Justru perempuan pengusaha, khususnya UMKM, menyumbang sekitar 62 persen PDB. Dari 65 juta UMKM di Indonesia, 60 persennya dimiliki perempuan,” ujar Nita.

Nita menjelaskan, apabila Indonesia ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sebagaimana dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto, jumlah perempuan pengusaha harus terus ditingkatkan, bukan justru dihadapkan pada persoalan kriminalisasi.

“Kalau ada masalah, harus dibantu, bukan dikriminalisasi. Kita juga perlu memastikan perempuan mendapatkan pendampingan hukum karena sering kali bahasa hukum berbeda dengan bahasa sehari-hari dan itu bisa menjadi jebakan,” kata Nita.

Sementara itu, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Veronica Tan berharap FGD ini mampu menghasilkan solusi konkret untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan, khususnya perempuan pengusaha.

Ia menjelaskan bahwa regulasi sebenarnya telah tersedia, termasuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Namun, tantangan terbesar masih terletak pada implementasi dan pendampingan hukumnya.

“Regulasinya sebenarnya sudah ada. Yang perlu diperkuat adalah implementasinya, bagaimana hakim maupun jaksa melihat perkara dengan perspektif perempuan serta memastikan layanan dan pendampingan hukumnya berjalan dengan baik,” ujar Veronica.

Ia berharap forum ini dapat menjadi awal penyusunan peta jalan (roadmap) jangka panjang, termasuk membangun komunitas pendamping hukum yang memiliki perspektif yang sama dalam memberikan perlindungan kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum.

“Harapannya bukan hanya menghasilkan solusi untuk tahun ini, tetapi juga membentuk komunitas pendamping hukum yang berperspektif sama. Perempuan tidak meminta diistimewakan, tetapi hanya menginginkan keadilan. Negara harus melindungi siapa pun, tidak boleh ada yang tertinggal,” katanya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) Nannie Hadi Tjahjanto, berharap FGD ini mampu melahirkan solusi dalam menghadapi berbagai bentuk kekerasan maupun persoalan hukum yang dialami perempuan pengusaha. Ia menilai perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga dan bangsa, terutama saat menghadapi masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19.

“Perempuan memiliki peran penting sebagai pemersatu keluarga, bangsa, dan ketahanan negara. Karena itu mari seluruh organisasi perempuan dan komunitas bergerak bersama untuk mendukung dan memperkuat perempuan,” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kadin Indonesia Tatyana Sentani Sutara dan Ketua Komite Tetap Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kadin Indonesia Jurika Fratiwi.



Foto bersama para pembicara dengan para peserta FGD bertajuk “Stop Kriminalisasi Perempuan Pengusaha: Mengawal Implementasi Kebijakan Berperspektif Gender, Memastikan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Khususnya Perempuan Pengusaha menuju Planet 50:50 dan Indonesia Emas 2045” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (22/07/2026).

Kadin Indonesia Dorong Penguatan Ekonomi Umat sebagai Pilar Daya Saing Bangsa di Kancah Global Pada KUII VIII 2026



Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah (enam dari kanan) saat hadir menjadi pembicara dalam Sidang Pleno XII Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan ekonomi umat sebagai bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah saat menjadi pembicara dalam Sidang Pleno XII Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Mengusung tema “Penguatan Ekonomi Berkelanjutan dan Penguatan Daya Saing Bisnis Internasional”, Titi memaparkan bahwa kekuatan ekonomi umat Islam akan turut menentukan posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi global yang kian ketat ke depan.

Dalam paparannya, Titi mengidentifikasi tiga persoalan mendasar yang masih menghambat kemandirian ekonomi nasional: konsentrasi kepemilikan modal pada segelintir pihak yang membuat kedaulatan ekonomi belum sepenuhnya tercapai, kebijakan yang dinilai belum cukup memihak pelaku UMKM dan sektor ekonomi syariah, serta rendahnya adopsi teknologi digital di kalangan pengusaha Muslim.

Meski demikian, ia memaparkan sejumlah indikator makroekonomi yang menggembirakan sepanjang 2026. Ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen pada kuartal pertama, laju inflasi terjaga di angka 2,42 persen, dan tingkat kepercayaan konsumen berada pada posisi 122,9 mencerminkan optimisme publik terhadap prospek perekonomian.

Namun, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut belum sejalan dengan posisi daya saing global Indonesia. Merujuk pada IMD World Competitiveness Ranking 2026, Indonesia menempati peringkat ke-48 dari 70 negara yang disurvei, dengan efisiensi bisnis dan mutu infrastruktur menjadi titik lemah yang perlu segera dibenahi.

Titi menyoroti besarnya potensi ekonomi syariah nasional, mulai dari nilai aset keuangan syariah yang terus tumbuh, kinerja ekspor produk halal yang kian ekspansif, hingga jumlah produk bersertifikat halal yang terus bertambah. Ia menyebut pemerintah telah menetapkan target ambisius untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, melalui penguatan tiga elemen utama: industri halal, sektor keuangan syariah, dan ekosistem usaha yang saling terintegrasi.

Ia menambahkan, permintaan produk halal di pasar global terus menanjak, dan Indonesia sejatinya memiliki modal kuat pada sejumlah sektor unggulan seperti modest fashion, wisata ramah Muslim, farmasi dan kosmetik halal, hingga industri makanan halal. Sektor-sektor ini, menurutnya, perlu terus dikuatkan agar Indonesia mampu naik kelas menjadi pemain utama dalam rantai nilai global.

Sebagai penopang utama perekonomian nasional, UMKM tercatat mempekerjakan lebih dari 120 juta orang dari sekitar 65 juta unit usaha yang ada, serta menyumbang kurang lebih 62 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Melihat skala kontribusi tersebut, Titi mendesak agar kemudahan akses pembiayaan, percepatan digitalisasi, dukungan sertifikasi halal, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dijadikan agenda prioritas dalam kebijakan pemberdayaan UMKM.

Ia juga menggarisbawahi peran krusial transformasi digital dalam mendongkrak efisiensi dan daya saing pelaku usaha. Optimalisasi kecerdasan buatan, penguatan infrastruktur pusat data nasional, serta perluasan literasi digital dinilai dapat membuka jalan bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan produktivitas.

Selain isu digital, Titi turut mendorong percepatan pembangunan ekonomi hijau lewat pengembangan energi terbarukan, mekanisme perdagangan karbon, skema pembiayaan berkelanjutan, dan hilirisasi sumber daya alam. Baginya, hilirisasi bukan sekadar memperkuat basis industri domestik, melainkan juga menjadi pengungkit daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional.

Selain isu digital, Titi turut mendorong percepatan pembangunan ekonomi hijau lewat pengembangan energi terbarukan, mekanisme perdagangan karbon, skema pembiayaan berkelanjutan, dan hilirisasi sumber daya alam. Baginya, hilirisasi bukan sekadar memperkuat basis industri domestik, melainkan juga menjadi pengungkit daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional.

Pada aspek perdagangan internasional, Titi memandang optimis peluang yang terbuka bagi Indonesia melalui berbagai skema kerja sama ekonomi lintas negara, termasuk langkah akses ke OECD dan rampungnya sejumlah perjanjian dagang internasional. Kendati begitu,

ia mengingatkan bahwa keterbatasan akses pembiayaan formal yang masih dialami jutaan pelaku UMKM, serta kebutuhan untuk memperkuat kredibilitas kelembagaan, tetap menjadi pekerjaan rumah bersama.

Titi turut menekankan peran strategis instrumen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) dalam memperkuat fondasi ekonomi umat. Menurutnya, pengelolaan zakat yang optimal, pengembangan wakaf produktif, penerbitan Green Sukuk, skema Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), penguatan koperasi syariah, serta pengelolaan dana sosial Islam secara profesional dapat memperluas akses pembiayaan masyarakat sekaligus menekan kesenjangan ekonomi.

Di penghujung paparannya, Titi Khoiriah menyampaikan lima poin rekomendasi strategis untuk menjadi bahan pertimbangan Kongres Umat Islam Indonesia VIII:

1. Penguatan regulasi yang berpihak pada pelaku UMKM;
2. Percepatan pembangunan ekosistem ekonomi syariah yang terintegrasi;
3. Peningkatan investasi infrastruktur disertai reformasi birokrasi;
4. Percepatan hilirisasi industri dan transisi menuju ekonomi hijau;
5. Perluasan literasi digital serta akses pembiayaan formal bagi jutaan pelaku UMKM yang selama ini belum terjangkau layanan perbankan.

Pemaparan tersebut ditutup dengan pernyataan yang menuai apresiasi dari para peserta sidang pleno: "Ketika umat kuat dan maju, Indonesia juga akan menjadi bangsa yang kuat, maju, dan berdaya saing di tingkat global."

Melalui forum ini, Kadin Indonesia berharap gagasan yang disampaikan dapat memperkaya perumusan arah kebijakan pemberdayaan ekonomi umat, sejalan dengan cita-cita mewujudkan Indonesia yang mandiri, berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing di panggung internasional.

KABAR LUAR NEGERI

Surplus Perdagangan Indonesia-Tiongkok Tembus 5,8 Miliar Dolar AS, Kadin Dorong Kolaborasi Green Energy dan Teknologi Masa Depan



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie saat memberikan sambutan dalam Indonesia-China Partnership Forum: "Advancing Green Energy and Future Technology" di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (23/07/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan kemitraan strategis komprehensif Indonesia dan Tiongkok terus menunjukkan penguatan, ditandai dengan meningkatnya perdagangan, investasi, serta kolaborasi di berbagai sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi kedua negara.

Hal tersebut disampaikan Anindya atau Anin sapaan akrabnya dalam Indonesia-China Partnership Forum: "Advancing Green Energy and Future Technology" di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (23/07/2026).

Anin mengatakan hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok terus menunjukkan tren positif. Nilai perdagangan kedua negara pada 2025 mencapai sekitar 168 miliar dolar AS, sementara pada semester I 2026 telah menembus 100 miliar dolar AS.

"Ini merupakan satu pertumbuhan yang luar biasa," ujar Anin.

Selain perdagangan yang terus meningkat, Indonesia juga mencatat surplus perdagangan dengan Tiongkok sekitar 5,8 miliar dolar AS pada semester pertama 2026. Menurut Anin, capaian tersebut didorong oleh meningkatnya ekspor produk bernilai tambah hasil hilirisasi.

"Terima kasih untuk investasi dari teman-teman Tionghoa di Indonesia. Kali ini kita berhasil mengekspor barang-barang yang mempunyai nilai tambah sehingga surplusnya menjadi 5,8 miliar dolar AS dalam enam bulan terakhir ini," kata Anin.

Di bidang investasi, Anin menyebut realisasi investasi dari Tiongkok dan Hong Kong ke Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 20 miliar dolar AS, menjadikannya kontributor investasi terbesar di Indonesia.

"Jadi memang Tionghoa ini mempunyai dampak yang besar bagi perdagangan maupun investasi," ujar Anin.

Lebih lanjut, Anin juga menyoroti implementasi Local Currency Transaction (LCT) antara Bank Indonesia dan otoritas moneter Tiongkok yang dinilai semakin memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.

"Transaksi antara rupiah dan yuan yang langsung rencananya dari 30 miliar dolar AS sudah ditingkatkan menjadi 60 miliar dolar AS. Dan kira-kira sebulan yang lalu kami ke Bank Indonesia, transaksi langsung antara rupiah dan yuan sudah naik 300 persen," kata Anin.

Indonesia dan Tiongkok juga memiliki peluang besar membangun rantai pasok global (global supply chain) yang semakin terintegrasi. Hal itu, menurut Anin, terlihat saat menghadiri China International Supply Chain Expo (CISCE) di Beijing yang berlangsung pada 22-26 Juni 2026.

Anin berharap sinergi tersebut dapat terus diperkuat, termasuk melalui Trade Expo Indonesia yang akan digelar pada Oktober mendatang dengan target transaksi melampaui capaian tahun sebelumnya sebesar 20,8 miliar dolar AS.

Anin menambahkan, kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Tiongkok yang telah dibangun kedua pemerintah perlu terus diwujudkan melalui kolaborasi nyata antara pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan.

"Saya melihat bahwa kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Tiongkok yang sudah dibuat begitu baik oleh government to government memang mesti direalisasikan dengan event-event yang baik seperti hari ini. Tentu merupakan kehormatan Kadin bisa diajak menjadi bagian dari ini semua," ujarnya.

Lebih jauh, Anin menilai tema forum tersebut sangat relevan dengan arah pengembangan kerja sama kedua negara, khususnya di bidang energi hijau, kesehatan, dan teknologi masa depan.

"Kalau kita lihat temanya (acara Indonesia-China Partnership Forum) tepat sekali, bahwa ini mengenai green energy, health, dan juga future technology. China (Tiongkok) benar-benar memimpin dalam ketiga bidang ini," kata Anin.

Menurut Anin, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat kolaborasi dengan Tiongkok, baik melalui pengembangan mineral kritis seperti nikel, tembaga, dan bauksit maupun pemanfaatan energi baru terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, surya, dan angin. Anin menilai dukungan teknologi dari Tiongkok akan menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan potensi tersebut sekaligus mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.



Sesi foto bersama para pembicara dan peserta Indonesia-China Partnership Forum: "Advancing Green Energy and Future Technology" di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (23/07/2026).

Selain itu, Anin menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia sebagai fondasi kerja sama jangka panjang. Indonesia, kata Anin, memiliki bonus demografi yang harus dimanfaatkan untuk mewujudkan Indonesia Emas.

"Indonesia mempunyai sejumlah manusia yang jumlahnya 287 juta dan masih muda, 60 persen itu di bawah 40 tahun. Tapi dalam waktu 20 tahun kita mesti mencapai Indonesia Emas dan bonus demografi ini tidak akan terulang lagi. Jadi di sini kita juga butuh bekerja sama dan memastikan bahwa pertumbuhan ini tidak saja untuk dinikmati segelintir kelompok, tapi juga untuk kebaikan masyarakat Indonesia dan Tionghoa secara umum," ujar Anin.

Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok Djauhari Oratmangun mengatakan pemerintah terus mempromosikan berbagai peluang investasi kepada pelaku usaha Tiongkok. Hingga Juni 2026, investasi dari Tiongkok dan Hong Kong ke Indonesia telah melampaui 9 miliar dolar AS, setelah pada 2025 nilainya mencapai lebih dari 20 miliar dolar AS.

"Tentunya tadi kami menyampaikan paparan mengenai potensi untuk berinvestasi di Indonesia karena kita lihat bahwa potensi itu sangat kuat. Sampai bulan Juni saja investasi dari China dan Hong Kong ke Indonesia sudah lebih dari 9 miliar dolar AS. Tahun lalu China (Tiongkok) dan Hong Kong di atas 20 miliar dolar AS. Perdagangan juga luar biasa," ujarnya.

Djauhari mengatakan forum ini secara khusus mengangkat dua sektor yang akan menentukan masa depan hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok. Pada sektor energi hijau, ia menegaskan Indonesia terus mempercepat agenda transisi energi melalui pengembangan berbagai sektor strategis.

Menurutnya, langkah tersebut membuka ruang kolaborasi yang semakin luas dengan Tiongkok yang selama ini menjadi salah satu pemain utama dalam industri energi bersih dan manufaktur teknologi.

“Kami terus memperluas energi terbarukan, mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, memperkuat industri baterai, mendorong efisiensi energi, dan membangun kawasan industri hijau,” katanya.

Selain energi hijau, Indonesia juga menempatkan penguasaan teknologi masa depan sebagai agenda strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ia menilai perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan hingga otomasi industri akan menjadi penentu arah pertumbuhan ekonomi global dalam beberapa dekade mendatang.

“Masa depan ekonomi akan ditentukan oleh teknologi seperti artificial intelligence, smart manufacturing, digital industry, green technology, automation, dan inovasi berbasis riset. Indonesia ingin menjadi bagian aktif dari perubahan ini,” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) Jona Widhagdo Putri, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Andi Maulana, Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri RI Zelda Wulan Kartika dan Penasihat Menteri Urusan Ekonomi dan Perdagangan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, Li Hongwei.



Sesi foto bersama para pembicara Indonesia-China Partnership Forum yang diantaranya terdiri dari pengurus Kadin Indonesia, Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT), perwakilan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, pada Kamis (23/7/2026).

Kadin Dorong Kerja Sama Indonesia-Swis, Fokus Trading Academy hingga Investasi Logistik

Duta Besar Republik Indonesia untuk Swis, I Ngurah Swajaya menjelaskan mengenai program Trading Academy saat audiensi dengan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie di The Convergence Indonesia, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menggelar audiensi dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Swis I Ngurah Swajaya, di The Convergence Indonesia, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/07/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama ekonomi Indonesia-Swis, mulai dari perdagangan, investasi, pengembangan teknologi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perdagangan global.

Anindya atau Anin sapaan akrabnya mengatakan Swis merupakan mitra strategis yang dapat menjadi acuan bagi Indonesia, tidak hanya sebagai pusat keuangan dunia, tetapi juga dalam pengembangan teknologi dan pembangunan merek (branding).

“Swis itu bukan saja suatu negara besar di bidang finansial, tapi dari sisi teknologi dan branding itu sangat diakui. Dan ini justru mesti menjadi suatu acuan buat Indonesia bekerja sama dengan Swis. Apalagi kita mempunyai Free Trade Agreement (FTA) sendiri sekitar empat tahun yang lalu,” ujar Anin.

Anin menjelaskan, hubungan dagang kedua negara juga menunjukkan kinerja positif dengan surplus perdagangan Indonesia mencapai sekitar 2,5 miliar dolar AS per tahun. Karena itu, Kadin Indonesia mendorong penguatan kerja sama yang lebih konkret.

“Yang pertama fokusnya bagaimana kita bisa belajar menggiatkan atau memodernisasi trading kita, maka kita bilang Trading Academy. Yang kedua fokusnya di bidang logistik, ditambah upaya investasi di bidang perkapalan dan juga pelabuhan,” kata Anin.

Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Swis I Ngurah Swajaya, mengapresiasi dukungan Kadin Indonesia dalam memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.

“Kami merasa sangat dibantu dan direspons dengan baik oleh Kadin Indonesia terkait dengan upaya-upaya kita untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Switzerland (Swis),” ujarnya.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie (dua dari kanan) menjelaskan konten buku We Buy From Indonesia saat audiensi dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Swis, I Ngurah Swajaya (kiri) di The Convergence Indonesia, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2026).



Audiensi Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Swis, I Ngurah Swajaya di The Convergence Indonesia, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2026).

Ia menjelaskan bahwa perdagangan Indonesia-Swis terus mengalami peningkatan, sementara Indonesia juga menjadi salah satu tujuan investasi perusahaan Swis. Ke depan, menurutnya, perhatian perlu diberikan kepada investasi perusahaan kecil dan menengah (UKM) Swiss yang berbasis teknologi, inovasi, dan rendah karbon.

"Saya laporkan ke Pak Ketum bahwa yang perlu juga kita perhatikan adalah investasi oleh perusahaan kecil dan menengah di Swiss, tetapi berbasis teknologi. Kalau kita bicara mengenai berbasis teknologi ini inovasi dan juga yang rendah karbon," katanya.

Selain investasi, Ngurah Swajaya menilai Swis memiliki posisi strategis sebagai salah satu global commodity trading hub terbesar di dunia. Karena itu, Indonesia ingin memanfaatkan peluang tersebut tidak hanya untuk meningkatkan ekspor komoditas, tetapi juga meningkatkan kapasitas pelaku usaha nasional melalui pendidikan dan pelatihan perdagangan global.

"Beliau (Ketum Kadin) berkenan nanti di Jenewa akan bertemu dengan mereka dan bicara mengenai tidak hanya bagaimana meningkatkan ekspor komoditas kita, tetapi juga bagaimana meningkatkan melalui pendidikan agar lebih mumpuni kita dalam konteks global trading hub untuk berbagai jenis komoditas," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Bilateral Swis dan Liechtenstein Kadin Indonesia Francis Wanandi, menyampaikan apresiasi atas perhatian Ketua Umum Kadin terhadap penguatan hubungan dengan Swis.

"Terima kasih saya mendapat perhatian dari Pak Ketum terhadap Swis ini yang kita rasakan sama-sama bisa memberikan suatu added value yang cukup besar kepada Indonesia. Dan kita harapkan kerja sama yang semakin erat antara kedua negara ini bisa membantu terutama dari sisi private sector untuk bisa membesarkan industri-industri di Indonesia," pungkas Francis.



Anindya Bakrie Terima Audiensi Dubes Sri Lanka, Sepakat Perkuat Hubungan Dagang, Investasi dan Business Council

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie bersama Duta Besar Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Indonesia dan ASEAN Shashikala Premawardhana usai audiensi di The Convergence Indonesia, Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2026).

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menerima audiensi Duta Besar Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Indonesia dan ASEAN Shashikala Premawardhana di The Convergence Indonesia, Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan, Rabu (22/7/2026). Pertemuan tersebut membahas upaya memperkuat hubungan bisnis, perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Sri Lanka melalui penguatan kerja sama antar-dunia usaha.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan Indonesia dan Sri Lanka memiliki hubungan persahabatan yang telah terjalin sejak lama.

“Secara historis, kalau kita ingat Konferensi Asia-Afrika hingga Gerakan Non-Blok, Sri Lanka merupakan salah satu pelopor bersama Indonesia. Selain itu, hubungan people-to-people kedua negara juga sudah terjalin sejak lama,” ujar Anindya atau Anin sapaan akrabnya.

Kunjungan Dubes Sri Lanka kata Anin, bertujuan untuk memastikan hubungan antar-dunia usaha (business-to-business/B2B) berjalan seiring dengan hubungan antar-pemerintah yang selama ini telah terjalin baik. “Nilai perdagangan (Indonesia-Sri Lanka) saat ini sekitar 500-600 juta dolar AS per tahun. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkannya dan juga membuat neraca perdagangan menjadi lebih berimbang,” kata Anin.

Selain perdagangan, Anin mengatakan kedua negara juga membahas peluang peningkatan investasi.

“Di sisi lain, Ibu Dubes juga menyampaikan ada sejumlah proyek di Sri Lanka yang berpotensi menarik bagi pelaku usaha Indonesia untuk menjadi pelopor kerja sama yang lebih luas,” ujar Anin.

Kerja sama tersebut kata Anin, dapat diwujudkan melalui berbagai skema, mulai dari kerja sama antar-kamar dagang kedua negara, pembentukan High Level Business Council, hingga kemitraan langsung antar-pelaku usaha.

“Kadin Indonesia tentu dengan senang hati akan memelopori sekaligus memfasilitasi berbagai bentuk kerja sama tersebut,” kata Anin.

Sementara itu, Dubes Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Indonesia dan ASEAN Shashikala Premawardhana, mengatakan kunjungannya bertujuan mempererat hubungan bisnis antara kedua negara yang selama ini telah memiliki ikatan sejarah yang panjang.

"Kami ingin memperkuat koneksi business-to-business. Secara historis, hubungan Sri Lanka dan Indonesia telah terjalin sejak era Gerakan Non-Blok, bahkan jauh sebelumnya. Kedua negara memiliki hubungan peradaban yang erat," ujarnya.

Shashikala mengatakan kedua pihak sepakat untuk menghidupkan kembali berbagai inisiatif kerja sama yang telah dibahas sebelumnya, termasuk pembentukan Indonesia-Sri Lanka Business Council serta mengaktifkan kembali nota kesepahaman (MoU) antara Kadin Indonesia dan Ceylon Chamber of Commerce yang telah lama tertunda. Selain itu, kedua negara juga akan meningkatkan partisipasi dalam berbagai kegiatan promosi dagang.

"Kami akan berpartisipasi dalam Indonesia Expo dan juga mengundang Kadin Indonesia untuk mengikuti Sri Lanka Expo yang akan diselenggarakan pada Januari mendatang. Kami berharap hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara dapat semakin erat. Kami juga ingin memperkenalkan para investor Sri Lanka yang telah berinvestasi secara signifikan di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi kedua negara," pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M. Vega.



Foto bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie (empat dari kiri), Duta Besar Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Indonesia dan ASEAN Shashikala Premawardhana (tiga dari kanan), Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino M. Vega (tiga dari kanan) dengan anggota Komite Bilateral Kadin Indonesia, Kadin GEO, serta perwakilan dari Kedutaan Besar Sri Lanka.



Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Davao City, Agus Trenggono (tiga dari kanan) dan Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kadin Indonesia Devi Erna Rachmawati (dua dari kanan) berfoto bersama para delegasi dari Filipina dalam Networking Meeting on Stronger Agribusiness Partnership between Indonesia and Mindanao yang berlangsung di House of Indonesia, Davao City, pada Sabtu, (18/7/2026).

Indonesia dan Davao Perkuat Kemitraan Agribisnis Melalui Networking Meeting dan Penandatanganan MoU B2B Bidang Pertanian

Davao, Filipina – Dalam upaya memperkuat hubungan ekonomi dan kerja sama strategis antara Indonesia dan Filipina, khususnya di wilayah Mindanao, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Davao City menyelenggarakan Networking Meeting on Stronger Agribusiness Partnership between Indonesia and Mindanao yang berlangsung di House of Indonesia, Davao City, pada Sabtu, 18 Juli 2026.

Acara ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan perdagangan, investasi, dan kerja sama agribisnis antara pelaku usaha Indonesia dan Filipina, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan pertanian berkelanjutan di kawasan ASEAN.

Kegiatan dibuka oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Davao City Agus Trenggono, yang menegaskan komitmen pemerintah Indonesia melalui diplomasi ekonomi untuk terus mendorong peningkatan perdagangan, investasi, dan kerja sama bisnis antara Indonesia dan Filipina, khususnya di wilayah Mindanao yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan agribisnis.

Puncak acara ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Business to Business (B2B) Trade and Investment di bidang pertanian sebagai langkah konkret dalam memperkuat kemitraan strategis antara perusahaan Indonesia dan Filipina.

Prosesi penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Devi Erna Rachmawati yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan NEXTANI Indonesia, bersama Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Davao City Agus Trenggono, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan investasi dan kerja sama bisnis kedua negara.

Dalam sambutannya, Devi menyampaikan bahwa Indonesia dan Filipina memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun ekosistem agribisnis ASEAN yang lebih kuat melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan investor.

"Indonesia dan Filipina memiliki visi yang sama dalam mewujudkan ketahanan pangan kawasan. Melalui kerja sama perdagangan, investasi, transfer teknologi, inovasi pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia, kita dapat membangun sektor pertanian ASEAN yang lebih modern, berdaya saing, dan berkelanjutan," kata Devi.

Selain penandatanganan MoU, kegiatan ini juga menjadi wadah business networking dan business matching antara pelaku usaha kedua negara untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama di bidang perdagangan komoditas pertanian, investasi sektor agribisnis, transfer teknologi pertanian, pupuk organik dan pertanian berkelanjutan, smart farming dan digital agriculture, ketahanan pangan dan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Melalui kegiatan ini, Indonesia dan Filipina kembali menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral melalui kolaborasi sektor swasta, peningkatan investasi, perdagangan, inovasi, dan transfer teknologi pertanian.

Kerja sama yang terjalin diharapkan dapat menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem agribisnis yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan ASEAN serta mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Filipina.



Para Delegasi Bisnis dari Indonesia dan Filipina berfoto bersama usai acara Networking Meeting on Stronger Agribusiness Partnership between Indonesia and Mindanao yang berlangsung di House of Indonesia, Davao City, pada Sabtu, (18/7/2026).

Kadin Indonesia dan Hubei Business Council Tiongkok, Jajaki Kerja Sama Strategis di Bidang Pertanian



Vice President of China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Hubei Sub-Council Hubei, Shi Minghui berjabat tangan dengan Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kadin Indonesia, Devi Erna Rachmawati usai pertemuan di Menara Kadin Indonesia, Rabu (08/07/2026).

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar pertemuan strategis dengan Hubei Business Council Tiongkok yang berlangsung di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (08/07/2026).

Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kadin Indonesia Devi Erna Rachmawati mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai potensi kerja sama di sektor pertanian, di antaranya peningkatan perdagangan produk pertanian, investasi agribisnis, transfer teknologi pertanian modern, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, riset dan inovasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pertukaran keahlian.

Devi juga menyampaikan bahwa kerja sama antara Kadin Indonesia dan Hubei Business Council memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi sektor pertanian Indonesia menjadi lebih modern, produktif, dan berdaya saing global.

Kadin Indonesia berkomitmen membangun kemitraan internasional yang memberikan manfaat nyata bagi petani, pelaku usaha dan industri pertanian nasional. Kolaborasi dengan Hubei Business Council diharapkan dapat membuka peluang investasi, transfer teknologi, serta memperluas akses pasar bagi produk pertanian Indonesia," ujar Devi.

Dijelaskan Devi, kerja sama difokuskan pada lima program strategis yakni peningkatan produktivitas padi melalui teknologi pertanian presisi. Kemudian investasi industri pupuk hayati, biostimulan dan pestisida ramah lingkungan.

"Ketiga, pengembangan kawasan hilirisasi hasil pertanian dan industri pangan, keempat, pembangunan pusat inovasi Indonesia-Hubei dan kelima pembukaan akses ekspor produk pertanian Indonesia ke pasar Tiongkok melalui jaringan perdagangan Hubei," terang Devi.

Kelima bidang tersebut, lanjut Devi, sejalan dengan agenda ketahanan pangan Indonesia sekaligus memanfaatkan keunggulan Hubei dalam riset, manufaktur mesin pertanian, teknologi digital dan industri pengolahan pangan.

“Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen Kadin Indonesia dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Tiongkok serta mendukung pembangunan sektor pertanian yang inovatif, berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia,” kata Devi.

Sementara itu, Vice President of CCPIT Hubei (China Council for the Promotion of International Trade, Hubei Sub-Council) Shi Minghui menyampaikan apresiasi atas sambutan Kadin Indonesia dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengembangkan kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan.

“Hubei memiliki pengalaman yang kuat dalam pengembangan teknologi pertanian, industri pangan, logistik dan perdagangan internasional yang diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi kolaborasi kedua belah pihak,” kata Shi.

Melalui peninjauan ini, Kadin Indonesia dan Hubei Business Council Tiongkok berharap dapat melanjutkan pembahasan ke tahap kerja sama yang lebih konkret, termasuk penyusunan program bersama, misi dagang, business matching, investasi, serta kolaborasi riset dan inovasi pertanian.



Vice President of China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Hubei Sub-Council Hubei (tiga dari kanan), Shi Minghui dan Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kadin Indonesia, Devi Erna Rachmawati (tiga dari kiri) usai menandatangani kerja sama di sektor investasi, transfer teknologi, serta akses pasar bagi produk pertanian, di Menara Kadin Indonesia, Rabu (08/07/2026).

Kadin Indonesia Perkuat Ekspor UMKM dan Produk Pertanian ke Jepang melalui Kolaborasi Strategis



Foto bersama jajaran Tokyo SMEs, Kadin Indonesia Bidang Pertanian, Kadin Indonesia Bidang UMKM, Kadin Indonesia Komite Bilateral Jepang, Kadin Provinsi DKI Jakarta, Kedutaan Besar RI untuk Jepang, serta mitra bisnis usai pertemuan business matching, di Tokyo, Jepang, pada 31 Juli 2026.

Tokyo – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus memperkuat diplomasi ekonomi melalui kolaborasi strategis antara Tokyo SMEs, Kadin Indonesia Komite Bilateral Jepang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pertanian, Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Kadin Indonesia, Kadin Provinsi DKI Jakarta, serta mitra bisnis di Jepang untuk memperluas akses pasar produk unggulan Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung di Tokyo, Jepang, pada 31 Juli 2026, turut dihadiri oleh Duta Besar Jepang Nurmala Kartini Sjahrir sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Jepang, khususnya di Sektor Pertanian dan UMKM.

Kolaborasi ini bertujuan untuk menjembatani para pelaku usaha Indonesia agar mampu menembus pasar Jepang melalui peningkatan kualitas produk, standardisasi, sertifikasi, business matching, serta penguatan jaringan distribusi. Kadin Indonesia berkomitmen menjadi penghubung antara produsen Indonesia dengan calon importir, distributor, dan investor di Jepang.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian Kadin Indonesia Devi Erna Rachmawati, menyampaikan bahwa Jepang merupakan salah satu pasar strategis dengan permintaan tinggi terhadap produk pertanian berkualitas dan ramah lingkungan.

“Kolaborasi ini merupakan langkah nyata Kadin Indonesia dalam memperkuat ekspor nasional. Kami ingin memastikan produk-produk UMKM dan pertanian Indonesia mampu bersaing di pasar Jepang melalui peningkatan kualitas, inovasi, serta kemitraan bisnis yang berkelanjutan,” kata Devi.

Dalam tahap awal, anggota Kadin Indonesia Bidang Pertanian akan memprioritaskan ekspor beberapa komoditas unggulan, antara lain:

1. Tempe sebagai produk pangan berbasis protein nabati yang semakin diminati pasar internasional.
2. Cocopeat sebagai media tanam ramah lingkungan untuk sektor hortikultura dan greenhouse.
3. Pupuk Organik yang mendukung pertanian berkelanjutan dan sejalan dengan tren green agriculture di Jepang.

Selain memperluas perdagangan, kerja sama ini juga membuka peluang investasi, transfer teknologi, pengembangan industri hilir, serta peningkatan kapasitas UMKM Indonesia agar memenuhi standar pasar global.

Melalui sinergi antara Tokyo SMEs, Kadin Indonesia Komite Bilateral Jepang Bidang Pertanian, Kadin Indonesia Bidang UMKM, Kadin Provinsi DKI Jakarta, pemerintah, serta mitra bisnis Jepang, diharapkan nilai ekspor Indonesia terus meningkat dan semakin banyak pelaku usaha nasional yang berhasil memasuki pasar Jepang.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen Kadin Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan perdagangan internasional, pengembangan UMKM, serta modernisasi sektor pertanian menuju Indonesia yang lebih berdaya saing di pasar global.

Titi Khoiriah Ungkap Peran Penting Pengusaha Perempuan jadi Penggerak Transformasi dan Ketahanan Ekonomi



(Dari kanan) Wakil Ketua Umum Bidang Diplomasi Multilateral Kadin Indonesia Andi Anzhar Cakra Wijaya, Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah, Ketua Komite Tetap Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) dan D-8 Kadin Indonesia Mohamad Bawazeer dan Ketua Komite Tetap Perjanjian Luar Negeri Mufti Hamka berfoto bersama di sela-sela The 40th Board of Directors Meeting of the Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) di Ankara, Turki (29/6/2026).

Ankara – Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Titi Khoiriah, menegaskan pentingnya peran kamar dagang dalam memperkuat kapasitas dan akses pasar bagi wirausaha muda dan perempuan. Hal tersebut disampaikan dalam *Panel Discussion* bertajuk “*Innovation & Entrepreneurship: Young and Women Entrepreneurs*” dalam acara The 40th Board of Directors Meeting of the Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) di Ankara, Turki, pada 29 Juni 2026.

Titi menjelaskan bahwa kamar dagang memiliki empat prioritas utama dalam mendorong pengembangan dunia usaha. Prioritas pertama adalah memperluas akses ke pasar internasional melalui misi dagang dan perdagangan digital.

“Prioritas kedua adalah membangun kepemimpinan dan pendidikan eksekutif bagi para wirausaha agar mampu bersaing di tingkat global. Mengapa ini penting? Peningkatan kapasitas, profesionalisme, serta kemampuan melihat peluang pasar internasional menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan pelaku usaha,” ujar Titi.

Selanjutnya, kamar dagang kata Titi juga berperan memfasilitasi akses investasi dan pembiayaan melalui koneksi dengan perbankan, lembaga keuangan mikro, hingga investor institusi.

“Prioritas keempat adalah mendorong penyusunan kebijakan berbasis data, sekaligus memperkuat layanan keanggotaan, inkubasi bisnis, dan pendampingan bagi wirausaha, khususnya perempuan,” terang Titi.

Lebih lanjut, Titi menilai pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan memiliki dampak ekonomi yang sangat besar. Perempuan yang berhasil membangun usaha tidak hanya mampu menciptakan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta memperkuat ketahanan ekonomi.



Wakil Ketua Umum Bidang Diplomasi Multilateral Kadin Indonesia Andi Anzhar Cakra Wijaya (kiri) usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kadin Indonesia dan The Islamic Chamber Training Academy (30/6/2026).

"Ketika perempuan menjadi pengusaha yang sukses, mereka dapat membangun kekayaan, berinvestasi secara finansial, menciptakan lapangan kerja, membuka berbagai peluang, serta berkontribusi penuh terhadap ketahanan dan pertumbuhan ekonomi," kata Titi.

Titi menambahkan, perempuan merupakan salah satu penggerak utama transformasi ekonomi. Karena itu, organisasi seperti ICCD memiliki peran strategis sebagai platform yang menghubungkan para pengusaha perempuan dengan jejaring bisnis internasional serta membuka akses yang lebih luas ke pasar global.

Dalam kesempatan tersebut, Titi juga membagikan pengalaman profesionalnya sebagai Presiden Direktur sekaligus Komisaris Independen di bank milik pemerintah daerah (Bank Banten). Pengalaman tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa akses terhadap jaringan bisnis dan pembiayaan menjadi faktor penting dalam memperluas peluang usaha.

Meski demikian, Titi mengakui masih banyak wirausaha muda, terutama perempuan, yang menghadapi tantangan memperoleh akses pembiayaan karena belum memiliki skala usaha maupun aset yang memadai.

"Di sinilah peran kamar dagang menjadi sangat penting, yakni membantu mempromosikan wirausaha perempuan ke jejaring global, membuka akses pasar internasional, sekaligus memperluas akses terhadap pembiayaan," pungkas Titi.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Diplomasi Multilateral Kadin Indonesia Andi Anzhar Cakra Wijaya, melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kadin Indonesia dan The Islamic Chamber Training Academy pada 30 Juni 2026.



Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Indonesia Titi Khoiriah (dua dari kiri) saat menjadi pembicara dalam *Panel Discussion* bertajuk "*Innovation & Entrepreneurship: Young and Women Entrepreneurs*" dalam acara The 40th Board of Directors Meeting of the Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) di Ankara, Turki (29/6/2026).

KADIN DAERAH



Anindya Bakrie Ajak Investor Global Lirik Maluku Utara, Kadin Siap Dorong Investasi Lebih Inklusif

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dan Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda berfoto bersama jajaran pengurus Kadin Provinsi Maluku Utara periode 2026-2031 yang baru dilantik, di Bella Hotel Ternate, Maluku Utara pada Sabtu (25/7/2026).

Ternate – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie resmi melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus Kadin Provinsi Maluku Utara periode 2026-2031 yang berlangsung di Bella Hotel Ternate, Maluku Utara pada Sabtu (25/07/2026).

Dalam sambutannya Anindya atau Anin sapaan akrabnya mengatakan pihaknya akan terus membawa potensi investasi Maluku Utara dalam setiap pertemuan dengan investor di dalam maupun luar negeri agar semakin banyak modal yang masuk ke daerah.

“Saya tentunya akan menghimbau kepada setiap investor yang kita temui, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk melirik Maluku Utara secara serius,” kata Anin.

Menurut Anin, daya saing Maluku Utara saat ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang menjadi tertinggi secara nasional. Pada Semester I 2026, ekonomi provinsi tersebut tumbuh 19,64 persen secara tahunan (year on year), jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,61 persen.

“Saya rasa semua itu akan mengikuti potensi investasi yang ada,” kata Anin.

Kinerja tersebut, lanjut Anin, menjadi modal kuat bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menawarkan proyek-proyek investasi yang lebih kompetitif kepada investor. Anin menilai likuiditas pendanaan masih tersedia sehingga tantangan berikutnya adalah memastikan proposal investasi yang disusun mampu menjawab kebutuhan pasar dan memberikan kepastian bagi calon investor.

“Saya rasa likuiditas itu ada di pusat dan juga di daerah. Tinggal kita pastikan bersama Kadin (Provinsi) Maluku Utara bahwa proposal investasinya menarik. Dan itu sudah terbukti,” ujar Anin.

Anin mengungkapkan, besarnya minat investor asing terhadap Maluku Utara tercermin dari realisasi penanaman modal asing yang telah mencapai Rp357 triliun. Bahkan, hampir 18 persen investasi asal Tiongkok di Indonesia kini mengalir ke provinsi tersebut, memperlihatkan posisi Maluku Utara sebagai salah satu tujuan utama investasi berbasis sumber daya alam dan industri pengolahan.

Meski demikian, Anin menegaskan keberhasilan menarik investasi tidak cukup diukur dari besarnya nilai modal yang masuk. Menurut Anin, agenda berikutnya adalah memperluas dampak ekonomi agar manfaat investasi dirasakan lebih merata oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal.



Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie dan Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda saat menghadiri pengukuhan dan pelantikan jajaran pengurus Kadin Provinsi Maluku Utara periode 2026-2031 yang berlangsung di Bella Hotel Ternate, Maluku Utara pada Sabtu (25/7/2026).

"Yang penting bagaimana investasi ini bisa lebih besar lagi dan semakin inklusif, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara," terang Anin.

Lebih lanjut, Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan pemerintah daerah siap membangun kemitraan yang lebih erat dengan Kadin untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

"Saya menunjukkan langsung bahwa Maluku Utara adalah salah satu basis investasi terbesar di Indonesia dengan nilai mencapai puluhan miliar dolar AS. Namun, tantangan terbesar kita saat ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang masif tersebut terasa hingga ke tingkat UMKM lokal dan sektor pendukung," kata Sherly.

Sherly mengatakan ekspansi industri di Maluku Utara juga membuka kebutuhan baru terhadap infrastruktur dan rantai pasok. Salah satu contoh terlihat di Halmahera Tengah, di mana pertumbuhan kawasan industri mendorong lonjakan jumlah penduduk dari sekitar 30 ribu menjadi 100 ribu jiwa, sehingga kebutuhan logistik, pangan, hingga perumahan meningkat signifikan.

"Kurang lebih 95 persen barang kebutuhan ritel masih dipasok dari luar Maluku Utara. Di satu sisi ini adalah tantangan pemerintah, namun di sisi lain ini merupakan peluang investasi emas bagi anggota Kadin. Pasokan telur, daging ayam, sayur-mayur, hingga logistik antar-pulau adalah sektor riil yang sangat terbuka lebar," tambahnya.

Karena itu, Sherly meminta Kadin Provinsi Maluku Utara lebih berorientasi pada hasil konkret melalui penguatan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pendampingan usaha bagi pelaku UMKM.

"Fokus pada output dan dampak, kurangi seremonial. Jika anggota Kadin naik kelas dan menghasilkan cuan, maka daerah akan sejahtera dan damai," tegas Sherly.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Maluku Utara Muksin Thalib, menyampaikan kesiapannya untuk menjadikan Kadin Provinsi Maluku Utara sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly.

"Kami siap menjadi lokomotif penggerak ekonomi, menyinergikan seluruh elemen pengusaha daerah dan mendukung penuh program strategis Pemerintah Provinsi Maluku Utara menuju Malut Bangkit dan Sejahtera," katanya.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko, WKU Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro, WKU Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia Andi Yuslim Patawari dan WKU Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang.

Anindya Bakrie Lantik Pengurus Kadin Kalteng 2026-2031, Dorong Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Palangkaraya – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie resmi melantik jajaran pengurus Kadin Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masa bakti 2026–2031 bertajuk *“Sinergi Dunia Usaha untuk Mewujudkan Kalteng Berkah, Kalteng Maju dan Kalteng Sejahtera”* di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Provinsi Kalteng, Jumat (10/07/2026).

Anin sapaan akrabnya dalam sambutannya menegaskan bahwa Kadin adalah mitra strategis pemerintah sekaligus wadah dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga ke daerah. Dijelaskan Anin bahwa Kalteng memiliki potensi besar di sektor pangan, energi, dan sumber daya alam yang perlu dioptimalkan melalui sinergi antara pemerintah dan dunia usaha.

“Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan sinergi yang kuat, daerah ini dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional,” jelas Anin.

Anin juga mendorong pengusaha lokal agar mampu menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri melalui peningkatan kapasitas, daya saing, dan kolaborasi. “Pengusaha Kalimantan Tengah harus terus berkembang, naik kelas dan berkontribusi bagi kemajuan ekonomi daerah maupun nasional,” kata Anin.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Provinsi Kalteng Rahmat Hamka menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada jajaran pengurus yang baru dilantik, serta menegaskan komitmen Kadin untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalteng dalam mendukung pembangunan daerah.

"Kepercayaan ini adalah amanah yang akan kami jalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan dunia usaha dan pembangunan Kalimantan Tengah," kata Rahmat.

Rahmat menambahkan bahwa Kadin akan terus mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda sebagai upaya memperkuat perekonomian daerah.

"Kami berharap semakin banyak generasi muda berani menjadi wirausaha dan mampu menciptakan lapangan kerja serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian Kalimantan Tengah," papar Rahmat.

Lebih jauh, Gubernur Provinsi Kalteng Agustiar Sabran menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalteng untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berpihak kepada masyarakat.

"Setiap investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Prioritaskan tenaga kerja lokal dan tingkatkan kualitas sumber daya manusia agar pembangunan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat," pungkas Agustiar.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James T. Riady, WKUK Bidang Hukum dan HAM, Sarana/Prasarana Kadin Indonesia M. Azis Syamsuddin, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Rotorasiko dan WKU Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang.



Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie resmi melantik jajaran pengurus Kadin Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masa bakti 2026-2031 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Provinsi Kalteng, Jumat (10/7/2026).

Kadin Kalsel Tekankan Kepatuhan Korporasi Lewat Sistem Administrasi Badan Hukum



Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Shinta Laksmi Dewi membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Optimalisasi Kepatuhan Korporasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan Kewajiban Pelaporan Tahunan RUPS serta Mitigasi Risiko Pemblokiran Akses Perseroan” di Galaxy Hotel Banjarmasin, Kalsel pada Kamis (02/07/2026).

Banjarmasin – Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Shinta Laksmi Dewi, menegaskan pentingnya peningkatan kepatuhan korporasi terhadap ketentuan administrasi badan hukum sebagai upaya memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Hal itu disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Optimalisasi Kepatuhan Korporasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan Kewajiban Pelaporan Tahunan RUPS serta Mitigasi Risiko Pemblokiran Akses Perseroan” di Galaxy Hotel Banjarmasin, Kalsel pada Kamis (02/07/2026).

Shinta mengatakan kondisi perdagangan global, termasuk kebijakan tarif yang diterapkan Amerika Serikat, menjadi tantangan yang perlu dicermati dunia usaha. Karena itu, pelaku usaha harus memahami berbagai perubahan regulasi yang dapat memengaruhi aktivitas perdagangan maupun keberlangsungan bisnis.

“Melalui kegiatan ini, para pelaku usaha diharapkan memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum yang harus dipenuhi sehingga mampu menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku,” ujar Shinta.

Menurut Shinta, masih terdapat perusahaan yang mendirikan badan usaha hanya untuk memenuhi persyaratan administratif, namun belum menjalankan seluruh kewajiban korporasi secara optimal.

“Kepatuhan terhadap regulasi bukan sekadar formalitas. Pelaku usaha juga harus memahami sanksi apabila mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan,” kata Shinta.

Shinta menambahkan, kepatuhan akan memberikan berbagai manfaat, mulai dari kepastian hukum, meningkatnya kepercayaan publik, hingga terciptanya transparansi dalam tata kelola perusahaan. Sebaliknya, perusahaan yang tidak patuh berpotensi menghadapi berbagai konsekuensi, seperti lemahnya perlindungan hukum, menurunnya transparansi, hingga berkurangnya kredibilitas di mata publik maupun mitra usaha.

“Karena itu, seluruh pelaku usaha perlu memahami dan melaksanakan kewajibannya sesuai regulasi yang telah terintegrasi dalam sistem pemerintahan agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan berkelanjutan,” pungkash Shinta.



Focus Group Discussion (FGD) bertema “Optimalisasi Kepatuhan Korporasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan Kewajiban Pelaporan Tahunan RUPS serta Mitigasi Risiko Pemblokiran Akses Perseroan” digelar di Galaxy Hotel Banjarmasin, Kalsel pada Kamis (02/07/2026).

Festival Fulan Fehan IV Perkuat Pariwisata Belu, Kadin NTT Dorong Masuk Kalender Wisata Dunia



Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nusa Tenggara Timur (NTT) Bobby Lianto (kiri) menghadiri Festival Fulan Fehan IV bertema “Dance for Friendship” kawasan wisata Fulan Fehan, Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, pada Sabtu (27/06/2026).

Belu – Festival Fulan Fehan IV bertema “Dance for Friendship” kembali membuktikan diri sebagai salah satu festival budaya terbesar di Nusa Tenggara Timur.

Digelar di kawasan wisata Fulan Fehan, Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, pada Sabtu (27/06/2026), festival ini tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga memperkuat posisi Belu sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nusa Tenggara Timur (NTT) Bobby Lianto mengatakan bahwa Festival Fulan Fehan telah berkembang jauh melampaui festival budaya daerah dan kini layak disejajarkan dengan festival bertaraf internasional.

“Keunikan festival ini tidak dimiliki daerah lain. Pertunjukan seni, musik, dan tari dipadukan dengan panorama alam Fulan Fehan yang luar biasa indah. Ini menjadi kekuatan besar untuk menarik wisatawan dunia,” ujar Bobby.

Bobby mengatakan perpaduan budaya, alam, dan keramahan masyarakat Belu menjadi modal besar untuk mengembangkan sektor pariwisata sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat.

Ia juga menilai kehadiran delegasi dari Australia, termasuk Wali Kota Darwin, membuka peluang kerja sama yang lebih luas di bidang pariwisata, perdagangan, dan investasi.

“Salah satu peluang yang didorong adalah pembukaan jalur kunjungan kapal pesiar ke Nusa Tenggara Timur sehingga mampu mendatangkan lebih banyak wisatawan mancanegara,” kata Bobby.

Selain itu, Bobby berharap Festival Fulan Fehan ditetapkan sebagai agenda wisata tahunan yang dipromosikan secara konsisten di tingkat nasional maupun internasional agar wisatawan dapat memasukkan Belu sebagai destinasi utama setiap tahunnya.

Lebih lanjut, Bobby turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Belu yang telah sukses menyelenggarakan festival dengan baik. “Antusiasme para tamu dari dalam dan luar negeri menjadi bukti bahwa Festival Fulan Fehan memiliki daya tarik yang kuat dan berpotensi menjadi ikon pariwisata Nusa Tenggara Timur,” tutur Bobby.

Dalam waktu dekat, Bobby Lianto bersama sejumlah kepala daerah di NTT dijadwalkan menghadiri kegiatan Darwin Fusion pada 9–11 Juli 2026 di Australia. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kerja sama antara NTT dan Kota Darwin, termasuk mendukung program Friendship City antara Kota Kupang dan Darwin.

“Melalui sinergi tersebut, Kadin Provinsi NTT berharap promosi pariwisata, investasi, dan perdagangan dapat semakin berkembang sehingga Festival Fulan Fehan menjadi pintu masuk bagi wisatawan internasional untuk mengenal kekayaan budaya dan keindahan alam Nusa Tenggara Timur,” pungkas Bobby.

Kadin Jatim Gelar Sarasehan Nasional: Kupas Aturan Kemasan Polos dan Pelarangan Bahan Tambahan yang Menekan Sektor Strategis Tembakau



Ketua Umum Kadin Provinsi Jatim Adik Dwi Putranto (tiga dari kiri) bersama Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa (empat dari kiri) menghadiri Sarasehan Nasional bertajuk “Standardisasi Kemasan dan Pelarangan Bahan Tambahan Lain pada Produk Hasil Tembakau: Solusi atau Pengulangan Kegagalan Kebijakan Pengendalian Tembakau?” di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Selasa (30/06/2026).

Surabaya – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar Sarasehan Nasional bertajuk “Standardisasi Kemasan dan Pelarangan Bahan Tambahan Lain pada Produk Hasil Tembakau: Solusi atau Pengulangan Kegagalan Kebijakan Pengendalian Tembakau?” di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Selasa (30/06/2026).

Sarasehan ini digelar guna membahas rencana kebijakan kemasan rokok polos (plain packaging), batas tar nik yang menyalahi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pelarangan bahan tambahan lain pada produk hasil tembakau yang dinilai akan mempengaruhi keberlangsungan ekosistem pertembakauan nasional.

Ketua Umum Kadin Provinsi Jatim Adik Dwi Putranto menjelaskan bahwa dialog ini digelar setelah Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) mengenai pengaturan produk tembakau dan rokok elektronik yang merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan konsultasi publik batas maksimal nikotin dan tar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menuai banyak penolakan di tengah masyarakat. Wacana kebijakan tersebut dinilai akan mematikan sektor tembakau nasional.

Adik memandang kebijakan tersebut perlu dibahas secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mengingat sektor pertembakauan memiliki kontribusi strategis terhadap perekonomian nasional maupun daerah.

“Di saat yang sama, Jatim selalu menjadi pusat ekosistem pertembakauan Indonesia. Provinsi ini menyumbang 43,9% produksi tembakau nasional dan memberikan kontribusi 70% terhadap penerimaan cukai hasil tembakau nasional atau mencapai Rp161,24 triliun pada 2024. Sektor ini juga menopang penerimaan daerah melalui pajak rokok Rp14 triliun dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp3,57 triliun pada tahun lalu,” kata Adik.

Kontribusi tersebut lanjut Adik, tidak hanya tercermin pada penerimaan negara dan daerah, tetapi juga penyerapan tenaga kerja. Ekosistem pertembakauan di Jatim menopang kehidupan lebih dari 90.000 tenaga kerja langsung, 387.000 petani tembakau dan cengkeh, serta ribuan pelaku usaha mikro dan sektor pendukung lainnya. Dengan karakteristik tersebut, industri hasil tembakau dipandang sebagai bagian strategis dari rantai ekonomi yang saling terhubung mulai dari sektor hulu hingga hilir.

Dikatakan Adik, kebijakan mengenai standarisasi kemasan dan pelarangan bahan tambahan lain pada produk hasil tembakau memerlukan pembahasan yang komprehensif karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh industri, tetapi juga oleh jutaan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada ekosistem pertembakauan.

“Menekan industri legal secara berlebihan sama saja dengan menyuburkan ekosistem kriminalitas ekonomi yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, Kadin Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa kebijakan publik yang baik harus didasarkan pada asas keterpaduan, keadilan, dan keseimbangan berbasis data empiris. Bukan atas dasar sentimen atau tekanan ideologis sepihak,” ujar Adik.



Ketua Umum Kadin Provinsi Jatim, Adik Dwi Putranto bersama Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa serta jajaran pengurus Kadin Provinsi Jatim saat akan menghadiri Sarasehan Nasional bertajuk "Standardisasi Kemasan dan Pelarangan Bahan Tambahan Lain pada Produk Hasil Tembakau, di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Selasa (30/06/2026).

Lebih lagi peta kebijakan makro di tingkat pemerintah pusat yang merupakan arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sudah jelas, tegas, dan pragmatis. Adik menjelaskan, pemerintah pusat menaruh target pendapatan yang sangat optimis pada sektor cukai hasil tembakau guna menopang keberlanjutan APBN sekaligus untuk membiayai berbagai program strategis nasional.

"Logika pemerintahan Presiden Prabowo adalah logika pertumbuhan. Pemerintah membutuhkan ruang fiskal yang sehat, aman, dan dapat diprediksi," kata Adik.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menyatakan seluruh pihak dapat menyampaikan pandangan berdasarkan data, kajian ilmiah, dan pengalaman di lapangan. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dari sarasehan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang proporsional, inklusif, dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan.

"Kadin sebagai mitra strategis, kita harus menjembatani kepentingan petani, pengusaha, agar supaya kita bisa didengar dan jangan sampai PHK yang tadi sudah kelihatan angkanya tersebut bertambah besar dan akhirnya banyak pengangguran yang terjadi," tutur Erwin.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kementerian Kesehatan RI Hanifah Rogayah mengatakan bahwa pemerintah terus membuka ruang dialog dalam penyusunan kebijakan pengendalian produk tembakau. Menurutnya, pengaturan mengenai standarisasi kemasan dan pelarangan bahan tambahan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi remaja dan anak-anak, melalui regulasi yang berbasis bukti ilmiah.

"Ketika kita menyusun RPMK ini tentu ada berbagai masyarakat dari berbagai kementerian lembaga dan pemerhati semua," kata Hanifah.

Akademisi Hukum Universitas Jember Fendi Setiawan mengungkapkan dua kebijakan tersebut merupakan bagian dari regulasi turunan PP Nomor 28 Tahun 2024 yang perlu dikaji secara menyeluruh karena berdampak luas terhadap berbagai sektor.

Fendi menilai pembahasan kebijakan tidak boleh hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi, penerimaan negara, petani, dan industri hasil tembakau.

"Forum ini harus mampu memetakan secara komprehensif dampak serta berbagai persoalan yang akan timbul akibat penerapan standardisasi kemasan dan pelarangan bahan tambahan pada produk hasil tembakau. Dari perspektif ekonomi, penerimaan cukai, maupun keberlangsungan industri, berbagai kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak yang serius," ujarnya.

Ia juga menyoroti rencana revisi Peraturan Menteri Kesehatan mengenai pencantuman peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau yang dinilai akan semakin memperketat ketentuan kemasan. Selain itu, Fendi meminta agar pengaturan pembatasan kandungan tar maupun bahan tambahan didasarkan pada kajian ilmiah yang kuat serta memiliki mekanisme pengawasan yang jelas.

"Jika memang terdapat larangan, maka harus ada dasar ilmiah yang jelas. Sebaliknya, apabila masih dimungkinkan berdasarkan hasil pembuktian ilmiah, maka kepastian hukumnya juga harus ditegaskan agar tidak menimbulkan multitafsir," katanya.

Fendi berharap penyusunan regulasi tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian sesuai amanat PP Nomor 28 Tahun 2024.

"Pertanyaan saya sederhana, apakah dalam proses penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut telah dilakukan koordinasi secara memadai dengan Kementerian Keuangan sebagaimana diwajibkan oleh PP Nomor 28 Tahun 2024? Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh prosedur pembentukan regulasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

Tekan Inflasi Jangka Panjang, Kadin Aceh Minta Fondasi Ekonomi Daerah Diperkuat



Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Aceh Teuku Jailani (dua dari kanan) mewakili Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung menghadiri High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi Aceh di Hotel Harmoni, Langsa, Aceh pada Senin (06/07/2026).

Langsa, Aceh – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Aceh mendorong penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) hingga tingkat kabupaten/kota sekaligus mempercepat pengembangan sektor produksi lokal sebagai strategi jangka panjang menjaga stabilitas harga di Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Aceh Teuku Jailani yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Provinsi Aceh Muhammad Iqbal Piyeung dalam acara High Level Meeting TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh bertajuk “Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Keuangan untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Aceh Pascabencana di Hotel Harmoni, Langsa, Aceh pada Senin (06/07/2026).

Dikatakan Teuku, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup mengandalkan forum koordinasi yang bersifat seremonial. Yang lebih penting adalah komunikasi yang berlangsung secara aktif, terstruktur dan berkelanjutan antar-pemangku kepentingan sehingga setiap kebijakan dapat saling mendukung.

“Kolaborasi hanya akan efektif jika dibangun di atas koordinasi yang kuat dan pertukaran informasi yang berjalan baik, mulai dari perencanaan hingga langkah antisipasi di lapangan,” ujarnya.

Teuku juga menilai kelembagaan TPID di daerah perlu diperkuat dengan melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN, BUMD, pelaku usaha serta Kadin Kabupaten/Kota. Sinergi tersebut dinilai akan mempercepat respons terhadap potensi gejolak harga kebutuhan pokok.

“Selain memperkuat koordinasi, Kadin (Provinsi) Aceh menilai peningkatan kapasitas produksi dalam daerah menjadi langkah strategis untuk menekan inflasi,” kata Teuku.

Selama ini, lanjut Teuku, komoditas seperti telur ayam dan daging ayam masih bergantung pada pasokan dari luar Aceh sehingga rentan terhadap kenaikan biaya distribusi dan logistik.

“Inflasi juga makin meningkat bila terjadi bencana dan gangguan pada infrastruktur jalan dan jembatan,” ujar Teuku.

Lebih lanjut dikatakan Teuku, posisi geografis Aceh yang relatif jauh dari sentra produksi nasional, menyebabkan biaya angkut menjadi lebih tinggi dan berpengaruh langsung terhadap harga di tingkat konsumen. Karena itu, Aceh dinilai perlu mempercepat pembangunan industri peternakan ayam petelur dan ayam pedaging agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari produksi lokal.

Ia meyakini penguatan sektor produksi akan memperpendek rantai pasok, meningkatkan ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru. Kadin Provinsi Aceh, siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat investasi, distribusi, perdagangan dan pengembangan sektor-sektor produktif.

“Pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui intervensi jangka pendek. Fondasi ekonomi daerah harus diperkuat melalui peningkatan kapasitas produksi agar stabilitas harga dapat terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Teuku.

Kadin Manggarai Timur Salurkan 107 Paket Sembako untuk Korban Gempa di Kisol



(Dari Kanan) Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie, Ketua Dewan Perdagangan Tailan (Board of Trade of Thailand) Poj Aramwattananont, serta Perdana Menteri Kerajaan Tailan H.E. Anutin Charnvirakul dalam acara Indonesia-Thailand Business Forum di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).

Manggarai Timur – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyalurkan 107 paket sembako kepada warga terdampak gempa melalui Posko Paroki St. Yosef Kisol, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Kamis, 20 Agustus 2026.

Bantuan itu dihimpun secara gotong royong oleh pengurus Kadin Kabupaten Manggarai Timur bersama Ketua Umum Kadin Provinsi NTT Bobby Lianto. Ketua Kadin Kabupaten Manggarai Timur Maximillian Firman Demorin memimpin langsung penyerahan bantuan tersebut.

Firman mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas Kadin terhadap masyarakat yang terdampak gempa. Menurut dia, kepedulian terhadap korban bencana perlu diwujudkan melalui tindakan nyata sesuai kemampuan masing-masing pihak.

"Dalam kondisi seperti sekarang, yang bisa kita lakukan harus segera kita lakukan. Kadin Kabupaten Manggarai Timur memilih bergerak dengan kemampuan yang ada agar bantuan bisa segera dirasakan masyarakat yang membutuhkan," kata Firman.

Dia mengatakan kebutuhan masyarakat setelah gempa tidak hanya berlangsung selama satu atau dua hari. Karena itu, bantuan kebutuhan pokok perlu dilakukan secara berkelanjutan selama kondisi warga belum sepenuhnya pulih.

"Yang kita harapkan adalah solidaritas ini terus bergerak. Tidak harus menunggu besar untuk mulai membantu. Setiap pihak bisa mengambil bagian sesuai kemampuan dan jangkauannya," ujarnya.

Kisol merupakan salah satu wilayah yang terdampak gempa. Sejumlah rumah dilaporkan rusak dan roboh. Sebagian warga mendirikan tenda secara mandiri dan memilih beristirahat di luar rumah untuk mengantisipasi gempa susulan.

Seorang warga di wilayah tersebut juga meninggal setelah tertimpa reruntuhan pada hari pertama gempa.

Posko Paroki St. Yosef Kisol mulai beroperasi pada Selasa, 18 Agustus 2026. Posko itu menjadi salah satu titik pendataan sekaligus penyaluran bantuan bagi keluarga terdampak di wilayah pelayanan Paroki Kisol.

Firman mengatakan Kadin Kabupaten Manggarai Timur memahami bahwa dampak gempa tersebar di sejumlah wilayah. Beberapa daerah mengalami kerusakan lebih berat dan memiliki akses yang lebih sulit.

Karena itu, dia berharap gerakan bantuan dapat diperluas sesuai kapasitas dan jangkauan masing-masing pihak.

"Berdasarkan informasi yang kami terima melalui Kadin Provinsi NTT, bantuan Kadin di tingkat nasional juga sedang dalam proses. Kita berharap nantinya dukungan dalam skala yang lebih besar dapat menjangkau lebih luas dan masuk lebih dalam ke wilayah-wilayah yang membutuhkan," kata Firman.

Menurut dia, seluruh wilayah terdampak perlu mendapat perhatian.

"Semua yang terdampak adalah saudara kita. Kita bergerak dari apa yang bisa dilakukan sekarang, sambil terus mendorong agar bantuan yang lebih luas dapat menjangkau daerah-daerah dengan kebutuhan yang lebih besar," ujarnya.

Pastor Paroki St. Yosef Kisol RD Agustinus Rame mengapresiasi bantuan tersebut. Dia menyampaikan terima kasih kepada Kadin Kabupaten Manggarai Timur dan Kadin Provinsi NTT atas kepedulian terhadap warga terdampak gempa.

Agustinus juga mengapresiasi pengurus Kadin yang tetap membantu masyarakat meski sebagian di antaranya turut merasakan dampak gempa.

Dia mendoakan agar jajaran Kadin Manggarai Timur dan Kadin Provinsi NTT diberikan kesehatan, kelancaran, serta kesuksesan dalam menjalankan karya dan pelayanan kepada masyarakat.



Kadin NTT Gerak Cepat Salurkan Bantuan ke 7 Wilayah Terdampak Gempa Flores

Kupang – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bergerak cepat merespons dampak gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah di Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Respons dilakukan melalui tujuh Dewan Pengurus Kadin Daerah yang berada di Kabupaten Nagekeo, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Jajaran Kadin di daerah langsung melakukan pemantauan kondisi lapangan, mendata kebutuhan masyarakat, serta menyalurkan bantuan awal kepada warga terdampak.

Ketua Umum Kadin Provinsi NTT Bobby Lianto mengatakan koordinasi dengan para ketua Kadin daerah dilakukan segera setelah gempa terjadi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat dapat dipantau sekaligus mempercepat distribusi bantuan ke wilayah yang membutuhkan.

Bantuan awal diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak, antara lain sembako, terpal, uang tunai, dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Bantuan terutama diberikan kepada masyarakat yang harus mengungsi dan bertahan di ruang terbuka karena rumah mereka terdampak gempa.

Di Kabupaten Sikka, Ketua Kadin Kabupaten Sikka Hari Japira turun langsung memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat terdampak. Bantuan juga diberikan kepada korban yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit serta disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Sikka. melihat kondisi warga sekaligus menyerahkan bantuan.

Sementara itu, di Kabupaten Ende, Ketua Kadin Kabupaten Ende Haji Heri Jufri memimpin langsung penyaluran bantuan ke sejumlah wilayah terdampak. Tim Kadin sempat mengalami kendala akses karena sejumlah ruas jalan tertutup material longsor dan mengalami gangguan akibat gempa.

Dengan dukungan alat berat serta kerja sama tim di lapangan, rombongan Kadin akhirnya dapat melewati sejumlah titik yang sulit dijangkau. Tim kemudian melanjutkan perjalanan untuk melihat kondisi masyarakat sekaligus menyalurkan bantuan.

Pergerakan serupa juga dilakukan jajaran Kadin Kabupaten Nagekeo dan sejumlah kabupaten lainnya. Kadin Provinsi NTT memastikan koordinasi antarwilayah terus dilakukan agar bantuan tidak hanya diberikan kepada daerah yang mudah dijangkau, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat di lokasi yang menghadapi kendala akses.

Bobby mengatakan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah masih cukup besar. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketersediaan makanan dan minuman di Kabupaten Nagekeo.

Menurut laporan Ketua Kadin Kabupaten Nagekeo Sambu Airelius, sejumlah toko dan tempat usaha turut terdampak gempa sehingga aktivitas perdagangan mengalami gangguan. Kondisi tersebut berdampak pada ketersediaan serta distribusi kebutuhan dasar masyarakat.

“Di Nagekeo masih ada kendala dalam hal suplai makanan dan minuman karena toko-toko yang terdampak gempa. Ini menjadi perhatian kami,” kata Bobby.

Untuk memperkuat respons kemanusiaan, Bobby telah menyampaikan perkembangan kondisi di lapangan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie. Kadin Provinsi NTT juga mengupayakan tambahan bantuan berupa lampu tenaga surya, genset, serta kebutuhan lainnya yang diperlukan selama masa tanggap darurat.

Bobby menegaskan Kadin Provinsi NTT bersama jajaran Kadin daerah akan terus hadir di tengah masyarakat selama proses penanganan bencana. Menurutnya, Ka tidak hanya memiliki fungsi dalam bidang ekonomi dan dunia usaha, tetapi juga memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam aksi sosial dan kemanusiaan ketika masyarakat menghadapi bencana.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, kata Bobby, menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan perlu diwujudkan melalui kepedulian, solidaritas, dan gotong royong.

“Kemerdekaan bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang kepedulian dan gotong royong. Ketika masyarakat sedang menghadapi musibah, kita harus hadir dan membantu,” ujarnya.

Kadin Kabupaten Sikka dan PSMTI Salurkan Bantuan untuk Keluarga Korban Gempa Flores NTT



Ketua Kadin Kabupaten Sikka Harry Jepira menyerahkan bantuan kepada korban gempa pada Sabtu, 15 Agustus 2026, di RSUD dr. T.C. Hillers, Kabupaten Maumere, NTT.

Maumere – Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap korban bencana gempa bumi yang mengguncang Flores dengan kekuatan 7,7 magnitudo, Ketua Kadin Kabupaten Sikka Harry Jepira bersama Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kabupaten Sikka Raymundus Sunnur menyerahkan bantuan kepada keluarga dari dua korban yang meninggal dunia akibat bencana tersebut.

Penyerahan bantuan dilaksanakan pada Sabtu, 15 Agustus 2026, sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di RSUD dr. T.C. Hillers, Kabupaten Maumere, NTT.

Harry mengatakan, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab sosial untuk hadir membantu masyarakat yang mengalami musibah.

Bantuan tersebut diserahkan sebagai wujud keprihatinan sekaligus dukungan moral kepada keluarga korban yang tengah menghadapi suasana duka akibat bencana gempa.

“Kami hadir untuk menyampaikan rasa duka dan memberikan sedikit bantuan kepada keluarga korban. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban keluarga,” ujar Harry.

Sementara itu, Ketua PSMTI Kabupaten Sikka Raymundus Sunnur, menyampaikan bahwa kepedulian terhadap sesama merupakan bagian penting dari semangat kebersamaan masyarakat Sikka, khususnya dalam menghadapi situasi bencana.

“Bantuan ini menjadi tanda bahwa mereka tidak menghadapi musibah ini sendirian,” kata Raymundus.

Kadin Kabupaten Sikka dan PSMTI Kabupaten Sikka belasungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban serta berharap masyarakat tetap tenang, saling membantu, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

Kegiatan penyerahan bantuan ini menjadi bagian dari semangat solidaritas, kepedulian, dan gotong royong masyarakat Sikka dalam menghadapi bencana yang menimpa wilayah Flores.





Pray For NTT

Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

15 Agustus 2026

Donasi untuk korban bencana

Nomor Rekening : 1210096018506

Atas Nama : Kadin Indonesia

Bank : Mandiri

Cabang : KCP Jakarta Fakhruddin

QRIS QR Code Standar
Pembayaran Nasional



KADIN INDONESIA

NMID : ID2024312079690

A01



SATU QRIS UNTUK SEMUA

Cek aplikasi penyelenggara
di: www.aspi-qr.is

Dicetak oleh : 93600008
Versi Cetak : 1.0-2024.01.26

Cara bayar dengan QRIS



Kadin.Indonesia.Official

X kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial

kadinindonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id

SAYEMBARA DESAIN LOGO HUT KE-58 KADIN INDONESIA & FOTOGRAFI UMKM



3-31 AGUSTUS 2026

- Terbuka untuk umum, perorangan/kelompok
- Tidak dikenakan biaya pendaftaran
- Setiap peserta diperkenankan mengirim maksimal 2 (dua) karya



Juara 1

**Rp 10.000.000 + Sertifikat + Logo
digunakan secara resmi**

Juara 2

Rp 5.000.000 + Sertifikat

Juara 3

Rp 3.000.000 + Sertifikat

10 finalis terbaik

E-Sertifikat penghargaan



Link Pendaftaran & Pengiriman Karya

- **Logo :**
<https://event.kadin.id/HUTKadinKe58>
- **Fotografi :**
<https://event.kadin.id/KompetisiFotografiUMKM>

INFORMASI SELENGKAPNYA



Implementasi P2KDBK Dengan Pendekatan Corporate Sustainability Performance (CSP)



Taufik Bawazier

Direktur Jenderal Industri Kimia,
Farmasi, dan Tekstil
Kementerian Perindustrian



Saleh Husin

Wakil Ketua Umum Bidang
Perindustrian Kadin Indonesia



Wiwik Pudjiastuti

Direktur Industri Kimia Hulu
Kementerian Perindustrian



Eka Marlina

Binus International
University



Mas Ayu Elita Hafizah

Federasi Industri Kimia
Indonesia (FIKI)



Moderator:

Setyabudhi Zuber

Responsible Care Indonesia



SCAN HERE

Contact Person
Citra
(0822-4246-0147)

<https://bit.ly/SosialisasiKadinP2KDBK>

Selasa, 21 Juli 2026 | 13.00 - 16.00 | Online Meeting



PROGRAM PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN (PPNK)

KADIN - LEMHANNAS RI ANGKATAN VII

5-11 Oktober 2026



GEDUNG LEMHANNAS RI, JAKARTA PUSAT

Pendaftaran dibuka untuk **PENGURUS/ANGGOTA KADIN**



INFORMASI & REGISTRASI: SCAN QR
ATAU KUNJUNGI **EVENT.KADIN.ID**





APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)

Bisa ke Luar Negeri Tanpa Visa!

ABTC adalah kartu perjalanan pebisnis yang berlaku di negara-negara anggota APEC yang menerapkan skema KPP APEC sebanyak 19 negara anggota, kecuali Amerika Serikat dan Kanada.



APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC) berlaku di 19 negara:



Australia



Jepang



Rusia



Brunei
Darussalam



Korea Selatan



Selandia Baru



Cile



Malaysia



Singapura



China



Meksiko



Tailan



Filipina



Papua Nugini



Taiwan



Hong Kong



Peru



Vietnam



Indonesia



Keuntungan Memiliki ABTC:



Bebas visa untuk negara-negara APEC, kecuali Amerika Serikat dan Kanada



Bisa menetap 90 hari per kunjungan



Jalur ekspres VIP di imigrasi bandara



Persyaratan Permohonan Surat Rekomendasi APEC BUSINESS TRAVEL CARD (ABTC)

- 1 Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Eksekutif Kadin Indonesia, dilengkapi dengan kop surat perusahaan, data pemohon, tanda tangan pimpinan & stempel Perusahaan
- 2 Scan paspor pemohon masa berlaku min. 2 tahun
- 3 Scan KTA Kadin aktif 2026 (nama dalam KTAB harus sama dengan yang mengajukan)
- 4 Scan NIB perusahaan
- 5 Scan ABTC terakhir (untuk perpanjangan ABTC)/optional



layanan.abtc@gmail.com



<https://trade.layanankadin.id/abtc>

Layanan Dokumen Ekspor

Kadin Indonesia membuka layanan dokumen ekspor, seperti Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO), Certificate of Export Goods, Certificate of Free Sale, serta legalisir dokumen ekspor dengan mudah dan cepat.

COO merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengeksport.

Jenis SKA/COO

SKA Preferensi

Jenis SKA/COO sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara/kelompok negara tujuan.

SKA Non Preferensi

Adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu.

Tahapan Membuat Dokumen Ekspor:



- 1 Buka laman <https://trade.kadin.id>
- 2 Log in atau Mendaftar Akun
- 3 Melengkapi Data-data perusahaan
- 4 Melakukan Pembayaran
- 5 Dokumen siap dicetak dan digunakan

Jenis Formulir COO

Form China	Form untuk barang yang termasuk dalam Perjanjian Perdagangan Bebas CHINA-ASEAN yang menggunakan Common Effective Preferential Tariff Scheme yang diekspor ke CHINA - dibutuhkan CoO Kemendag.
Form B	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang tersebut diproduksi di Indonesia.
Form B with Notification	Form untuk barang yang diproduksi di Indonesia dengan pemberitahuan.
Form ASEAN-India	Form yang membutuhkan sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan barang diproduksi di Indonesia dan memenuhi persyaratan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-INDIA - wajib melampirkan SKA Kemendag.
Form A	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang diproduksi di Indonesia, dan memenuhi persyaratan Generalized System of Preferences.
Form D	Form untuk barang yang diproduksi di Indonesia dan memenuhi persyaratan ASEAN Common Effective Preferential Tariff Scheme - wajib melampirkan SKA Kemendag.
Form Textile Product	Form untuk produk tekstil dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan barang diproduksi di Indonesia
Form Certificate of Export Goods	Form untuk barang dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barang tersebut diproduksi di banyak negara.
Form Certificate of Free Sale	Form untuk bahan makanan yang diproduksi di Indonesia dan tersedia secara bebas untuk dijual di Indonesia dan pasar luar negeri.



GUNAKAN ATA CARNET UNTUK KEPERLUAN EKSPOR SEMENTARA

APA ITU ATA CARNET?

ATA Carnet adalah sistem dan dokumen untuk kegiatan impor/ekspor sementara yang dapat dipergunakan dalam cakupan wilayah 81 negara.

Carnet merupakan dokumen pabean internasional yang diterima sebagai pemberitahuan pabean dan mencakup jaminan yang berlaku secara internasional.

Secara sederhana, ATA Carnet diistilahkan sebagai **"Paspor untuk Barang"**. Penerapan ATA Carnet dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat prosedur impor dan ekspor sementara sebagai upaya memfasilitasi dunia bisnis internasional.

PENGGUNA ATA CARNET

Pebisnis

Teknisi

**Penyelenggara
Pameran**

**Profesional,
perorangan/tim**

Kru Film

**Dokter/
Ahli Bedah**

Arsitek

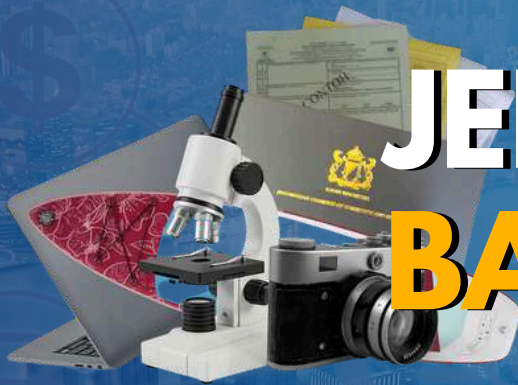
Seniman

Engineer

Peneliti

Tim Olahraga

Grup Musik



JENIS-JENIS BARANG

Penerapan **ATA Carnet** dilakukan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Izin Masuk/Penerimaan Sementara (Convention On Temporary Admission), Istanbul 1990. Barang-barang yang diperbolehkan masuk ke Indonesia dengan menggunakan ATA Carnet diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 228 tahun 2014 mengenai Impor Sementara, yaitu barang-barang untuk tujuan sebagai berikut:

1

Untuk keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan atau kegiatan sejenis

2

Untuk peralatan profesional atau tenaga ahli

3

Untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, atau kebudayaan

4

Untuk keperluan pribadi wisatawan dan/atau barang yang diimpor untuk tujuan olahraga

5

Untuk tujuan kemanusiaan

Sementara itu, penggunaan ATA Carnet di negara tujuan selain Indonesia disesuaikan dengan aturan masing-masing negara tersebut mengenai penetapan tujuan barang yang menggunakan ATA Carnet.

PERSYARATAN PENERBITAN ATA CARNET

Salinan (*copy*) identitas diri Pemegang Carnet atau yang mewakili

Surat Kuasa Pemegang Carnet kepada yang mewakili

Salinan (*copy*) Kartu Tanda Keanggotaan Kadin

Salinan (*copy*) NPWP Perusahaan/Perorangan

Salinan (*copy*) SIUP, TDP, dan Domisili Perusahaan

Dokumen Deskripsi Barang, Foto Berwarna, Keterangan dimensi barang, negara pembuat barang dan harga barang

Rencana Perjalanan Barang

Surat Undangan penyelenggaraan dari negara asal

Menandatangani surat pernyataan bermaterai

Meletakkan Jaminan

NEGARA-NEGARA YANG MENERBITKAN DAN MENERIMA **ATA CARNET UNTUK KEPERLUAN EKSPOR DAN IMPOR SEMENTARA:**

- | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Afrika Selatan | 28. Inggris | 55. Pakistan |
| 2. Amerika Serikat | 29. Iran | 56. Pantai Gading |
| 3. Albania | 30. Irlandia | 57. Prancis |
| 4. Algeria | 31. Islandia | 58. Peru |
| 5. Andora | 32. Israel | 59. Polandia |
| 6. Arab Saudi | 33. Italia | 60. Portugal |
| 7. Australia | 34. Jepang | 61. Qatar |
| 8. Austria | 35. Jerman | 62. Republik Ceko |
| 9. Bahrain | 36. Kanada | 63. Rumania |
| 10. Belanda | 37. Kazakstan | 64. Rusia |
| 11. Belarus | 38. Korea Selatan | 65. Selandia Baru |
| 12. Belgia | 39. Latvia | 66. Senegal |
| 13. Bosnia Herzegovina | 40. Libanon | 67. Serbia |
| 14. Bulgaria | 41. Lithuania | 68. Singapura |
| 15. Chili | 42. Luksemburg | 69. Slowakia |
| 16. China | 43. Makau | 70. Slowenia |
| 17. Kroasia | 44. Madagaskar | 71. Spanyol |
| 18. Siprus | 45. Malaysia | 72. Sri Lanka |
| 19. Denmark | 46. Malta | 73. Swedia |
| 20. Estonia | 47. Maroko | 74. Swis |
| 21. Finlandia | 48. Mauritius | 75. Tailan |
| 22. Filipina | 49. Makedonia Utara | 76. Tunisia |
| 23. Gibraltar | 50. Meksiko | 77. Turki |
| 24. Hong Kong | 51. Moldova | 78. Ukraina |
| 25. Hungaria | 52. Mongolia | 79. Uni Emirat Arab |
| 26. India | 53. Montenegro | 80. Vietnam |
| 27. Indonesia | 54. Norwegia | 81. Yunani |



Dokumen **Ata Carnet** dikeluarkan oleh: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia

Kontak:

Menara Kadin Indonesia Lantai 24, 29
Jl. HR Rasuna Said X-5 Kav.2-3
Kuningan, Jakarta



Telp. (021) 5274484



atacarnet.idn@kadin.id

atau

atacarnetindonesia@gmail.com

Cantumkan subject email:

- **Pengajuan ATA Carnet** (jika akan mengajukan ATA Carnet)
- **Info ATA Carnet** (jika ingin mendapatkan informasi mengenai ATA Carnet)





Cara Mendaftar Menjadi Anggota Kadin

Akses Situs Resmi

<https://kadin.id/keanggotaan>



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id

Tata Cara Daftar Menjadi Anggota Kadin

1

Daftar Akun

Buka *laman* <https://anggota.kadin.id>

5

Pembayaran

Lakukan pembayaran melalui sistem anggota Kadin

2

Verifikasi Akun

Klik link verifikasi yang dikirimkan ke email anda

6

Validasi Pembayaran

Bagian Keuangan Sekretariat Kadin Indonesia akan memvalidasi pembayaran anda

3

Isi Data Perusahaan/Asosiasi

Lengkapi informasi perusahaan atau asosiasi anda

7

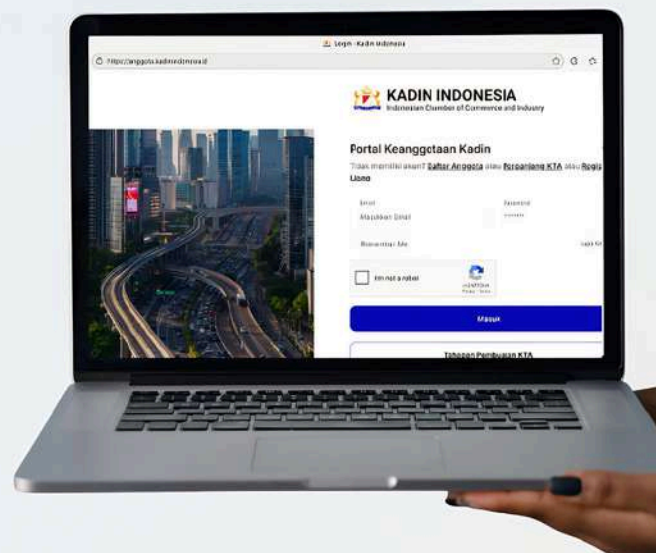
Menjadi Anggota Resmi

Setelah divalidasi, anda resmi menjadi anggota! KTA dan invoice dikirimkan ke email anda

4

Verifikasi oleh Admin

Admin Kadin akan memverifikasi data anda



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id

KTA & SBU

Mengapa harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kompetensi, maupun SBU Non-Konstruksi dari Kadin Indonesia?



- KTA dan SBU Kadin dapat **meningkatkan kepercayaan** terhadap perusahaan anda
- Memiliki KTA menunjukkan bahwa **bisnis anda diakui dan terhubung dengan jaringan bisnis yang kuat**
- Kepemilikan KTA Kadin dan SBU dari Kadin **memenuhi kelengkapan prasyarat mengikuti tender pengadaan barang dan jasa**
- KTA dan SBU dari Kadin adalah **dokumen penting bagi perusahaan pemasok barang dan jasa untuk pemerintah atau swasta**
- KTA dan SBU dari Kadin **menunjukkan standar kualitas, integritas dan kompetensi** yang diperlukan perusahaan untuk melayani pemerintah atau klien swasta



Manfaat Keanggotaan Kadin

Tumbuhkan bisnis melalui network dan kolaborasi

Akses terhadap pasar

Dukungan advokasi

Akses terhadap transformasi digital

Scaling up skill/kemampuan wirausaha dan pekerja

Dukungan dalam penerapan TKDN

Kemudahan pembuatan surat keterangan untuk bisnis

Pendampingan menuju Net Zero

Kesempatan promosi

Update terhadap perkembangan ekonomi dan bisnis

Terlibat dalam penyusunan kebijakan industrial

Potongan harga produk/jasa



Saatnya **Level Up** dan **Maksimalkan Potensi Bisnismu**



Daftar segera menjadi anggota Kadin



anggota@kadinindonesia.id



(+62) 85695410875



kadin.id/keanggotaan

Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 24 dan 29
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12950



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinindonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id



Direktur Eksekutif Kadin Indonesia: Pipin Moh. Saeful Arifin

Penerbit: Kadin Communication Office | **Penanggung Jawab:** Kepala Kantor Komunikasi Kadin Indonesia, Primus Dorimulu | **Redaktur Pelaksana:** Taufik Zulkarnaen

Redaksi: Arita Gloria, Ari Kristiana K, Bagus Dharmawan, Nurdin, Sabrina Hutajulu, Hariwicahyo Utomo, Luthfiah Ramadhani Sugiono, Fery Hasibuan

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lt. 24, 29, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp. 021- 527503 | humas@kadin.id



Kadin.Indonesia.Official



kadin_indonesia



kadinindonesiaofficial



kadinIndonesia



Kamar Dagang dan Industri Indonesia



kadin.id